



MAKROEKONOMI: DIGITALISASI, EKONOMI HIJAU, DAN INTEGRASI GLOBAL



**KESATUAN
PRESS**



Jan Horas Veryady Purba

**MAKROEKONOMI:
DIGITALISASI, EKONOMI HIJAU,
DAN INTEGRASI GLOBAL**

Jan Horas Veryady Purba



MAKROEKONOMI: Digitalisasi, Ekonomi Hijau dan Integrasi Global

Penulis: Jan Horas Veryady Purba
Editor: Jeremy Hans Immanuel
Cover: Jan Horas Veryady Purba
Ukuran: xii, 234 hlm, Uk: 15,5x23 cm

**KESATUAN
PRESS**



PENERBIT KESATUAN PRESS

Anggota IKAPI (366/ Anggota Luar Biasa/JBA/2020)

Kampus IBI Kesatuan

Jalan Ranggagading No.1 Bogor 16123

email: kesatuanpress@ibik.ac.id

ISBN :

Copyright @2025 Pada Penulis

Cetakan Pertama: **Oktober** 2025

Dilarang memperbanyak, mencetak ataupun menerbitkan sebagian maupun seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) di pidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dengan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai di maksud pada Ayat [1] di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Kesatuan Press dengan bangga menghadirkan buku *Makroekonomi: Digitalisasi, Ekonomi Hijau, dan Integrasi Global*, sebuah karya yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika ekonomi makro dalam berbagai konteks. Dalam era perubahan cepat dan kompleksitas ekonomi yang semakin meningkat, pemahaman tentang kebijakan fiskal, moneter, perdagangan internasional, serta tantangan ekonomi hijau dan digital menjadi semakin penting. Buku ini tidak hanya menjelaskan prinsip-prinsip dasar ekonomi makro, tetapi juga mengulas bagaimana kebijakan ekonomi dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Kesatuan Press berkomitmen untuk terus menghadirkan literatur berkualitas tinggi yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran kritis.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini memberikan manfaat yang luas dan menjadi referensi utama bagi siapa pun yang tertarik mendalami ekonomi makro.

Kesatuan Press Bogor, Indonesia

KATA PENGANTAR

Ekonomi makro memainkan peran sentral dalam memahami bagaimana suatu negara mengelola sumber daya, menghadapi tantangan ekonomi, serta merancang kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Buku ini hadir sebagai panduan komprehensif bagi pembaca yang ingin mendalami prinsip-prinsip dasar, teori, serta perkembangan terbaru dalam ekonomi makro.

Dengan cakupan yang luas, buku ini mengulas konsep fundamental seperti pendapatan nasional, permintaan dan penawaran agregat, hingga interaksi kebijakan fiskal dan moneter dalam model IS-LM. Selain itu, pembahasan mengenai inflasi, nilai tukar, dan neraca pembayaran memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kebijakan ekonomi dapat menjaga stabilitas makroekonomi. Tidak hanya itu, buku ini juga membahas tantangan kontemporer seperti ekonomi digital, ekonomi hijau, serta dampak perubahan teknologi terhadap pasar tenaga kerja dan kebijakan ekonomi global.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas perekonomian global, pemahaman mengenai krisis ekonomi dan strategi mitigasi menjadi semakin penting. Bab-bab dalam buku ini menyajikan analisis historis, kasus-kasus nyata, serta strategi kebijakan yang dapat digunakan untuk menanggulangi ketidakstabilan ekonomi.

Harapan kami, buku ini tidak hanya menjadi referensi akademik tetapi juga dapat digunakan sebagai alat analisis bagi pembuat kebijakan, peneliti, dan masyarakat luas yang ingin memahami dinamika ekonomi makro secara mendalam.

Dengan penuh rasa syukur, kami ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada **Prof. Dr. Bungaran Saragih, M.Ec.** yang telah mengajarkan Ilmu Ekonomi Makro kepada penulis selama studi Strata-2 dan Strata-3 di IPB, serta nasihat dan motivasi yang sangat berharga. Terima kasih kepada **Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara**, atas bimbingannya sejak awal karier penulis di STIE Kesatuan, Januari 1997, serta penghargaan dan rasa hormat kepada **Prof. Dr. Bambang Pamungkas** (Rektor IBI Kesatuan), **Prof. Bonar P. Pasaribu**, dan **Bapak Ir. Permadi Tirtarahardja**, yang telah menjadi sumber inspirasi dan mendorong Penulis untuk produktif dalam berkarya.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Penerbit Kesatuan Press, seluruh jajaran Struktural IBI Kesatuan, Rekan rekan Dosen, Perpustakaan IBIK, dan Staf di IBI Kesatuan, atas dukungan luar biasa yang telah diberikan. Kontribusi, semangat, dan kerja sama dari berbagai pihak ini telah menjadi bagian penting dalam terwujudnya karya ini.

Kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta kepada penerbit, yang telah memberikan kesempatan untuk menerbitkan karya ini. *Last but not least*, terima kasih kepada semua keluarga

besar, dan secara khusus kepada Cucu - **Grachella Christy Abrina br, Sigumonrong**

Tidak ada gading yang tak retak, oleh karena itu, kami dengan senang hati menyambut setiap masukan dan kritik demi penyempurnaan buku ini. Kami berharap karya ini dapat bermanfaat dan menjadi rujukan dalam penelitian maupun publikasi ilmiah. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih yang tulus atas segala dukungan dan apresiasi yang telah diberikan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat serta menjadi sumber inspirasi bagi pembaca dalam memahami dan mengembangkan ekonomi makro yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Bogor, Oktober 2025
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Transformasi Makroekonomi	2
1.2 Tantangan dan Peluang di Era Global-Digital	6
1.3 Dinamika Kebijakan Makroekonomi di Era Disrupsi	10
1.3.1. Ketidakpastian Global dan Respons Kebijakan	12
1.3.2. Perubahan Paradigma: Dari Stabilisasi ke Transformasi Struktural	14
1.3.3. Tantangan Koordinasi Kebijakan Lintas Sektor dan Negara	15
BAB 2. TRANSFORMASI KEBIJAKAN MAKROEKONOMI DI ERA GLOBAL DAN DIGITAL	17
2.1 Peran Bank Sentral dalam Menjaga Stabilitas Nilai Tukar dan Sistem Keuangan	19
2.2 Kebijakan Sisi Penawaran (<i>Supply-Side Policy</i>).....	21
2.2.1 Deregulasi dan Reformasi Struktural dalam Ekonomi	21
2.2.2 Peningkatan Produktivitas dan Inovasi Teknologi	23
2.2.3 Investasi dalam Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	25
2.3 Kebijakan Perdagangan dan Investasi	27
2.3.1 Kebijakan Proteksionisme vs. Perdagangan Bebas	27
2.3.2 Regulasi Investasi Asing dan Strategi Peningkatan Daya Saing	29
<hr/>	
1. Daftar Isi	vii

2.3.3	Dampak Globalisasi terhadap Kebijakan Ekonomi Domestik	31
2.4	Stabilitas Makroekonomi dan Krisis Ekonomi	32
2.4.1	Strategi Mitigasi Risiko Makroekonomi	32
2.4.2	Peran Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Menghadapi Krisis Ekonomi	34
2.4.3	Studi Kasus Krisis Ekonomi Global dan Respons Kebijakan	36
2.5	Digitalisasi dan Kebijakan Makroekonomi Modern	37
2.5.1	Pengaruh <i>Fintech</i> dan Digital Banking terhadap Kebijakan Moneter	37
2.5.2	Peran Digitalisasi dalam Pengelolaan Fiskal dan Sistem Pajak	39
2.5.3	Kebijakan Ekonomi dalam Menghadapi Revolusi Digital	41
2.6	Tantangan dan Masa Depan Kebijakan Makroekonomi	44
2.6.1	Integrasi Kebijakan Ekonomi dalam Era Globalisasi	44
2.6.2	Keberlanjutan dan Ekonomi Hijau dalam Kebijakan Makroekonomi	45
2.6.3	Prediksi Tren Kebijakan Makroekonomi di Masa Depan	47
BAB 3.	EKONOMI DIGITAL DAN MAKROEKONOMI	49
3.1	Transformasi Digital dalam Sistem Ekonomi	50
3.1.1	Evolusi Ekonomi dari Industri Tradisional ke Ekonomi Berbasis Digital	50
3.1.2	Digitalisasi Sektor Bisnis dan Dampaknya terhadap Produktivitas	52

3.1.3	Big Data, Artificial Intelligence, dan Otomatisasi dalam Kebijakan Ekonomi	54
3.2	Dampak <i>Fintech</i> dan Digital Banking terhadap Kebijakan Moneter	57
3.2.1	Peran <i>Fintech</i> dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan	57
3.2.2	Dampak Digital Banking terhadap Stabilitas Sistem Keuangan	59
3.2.3	Adaptasi Kebijakan Moneter dalam Menghadapi Digitalisasi Transaksi	61
3.3	Peran Digitalisasi dalam Pertumbuhan Ekonomi	62
3.3.1	Kontribusi Sektor Digital terhadap PDB dan Lapangan Kerja	62
3.3.2	Ekonomi Platform dan Pengaruhnya terhadap Persaingan Pasar	64
3.3.3	Regulasi Digital dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi	66
BAB 4.	EKONOMI HIJAU DAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN	69
4.1	Konsep Ekonomi Hijau dan Pertumbuhan Berkelanjutan	71
4.1.1	Definisi dan Prinsip Ekonomi Hijau	71
4.1.2	Peran Energi Terbarukan dalam Ekonomi Makro	73
4.2	Dampak Perubahan Iklim terhadap Ekonomi Makro	76
4.2.1	Risiko Ekonomi akibat Perubahan Iklim dan Bencana Lingkungan	76
4.2.2	Pengaruh Emisi Karbon terhadap Produktivitas Industri	79

4.2.3	Adaptasi Kebijakan Ekonomi untuk Mengurangi Dampak Lingkungan	81
4.3	Strategi Fiskal dan Moneter untuk Mendukung Transisi Energi	84
4.3.1	Subsidi Energi Hijau dan Insentif Pajak bagi Perusahaan Ramah Lingkungan	84
4.3.2	Peran Bank Sentral dalam Pembiayaan Proyek Ekonomi Hijau	86
4.3.3	Reformasi Kebijakan Fiskal untuk Mendukung Ekonomi Berbasis Ekologi	90
BAB 5. INSTITUSI DAN KUALITAS TATA KELOLA EKONOMI		93
5.1	Peran Institusi dalam Pertumbuhan Ekonomi	94
5.1.1	Teori Institusional dan Dampaknya terhadap Efisiensi Ekonomi	94
5.1.2	Hubungan antara Kelembagaan dan Inovasi Ekonomi	101
5.1.3	Kasus Sukses Reformasi Institusi di Berbagai Negara	106
5.2	Regulasi, Korupsi, dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi	110
5.2.1	Regulasi Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing dan Investasi	110
5.2.2	Dampak Korupsi terhadap Stabilitas Ekonomi dan Pertumbuhan	114
5.2.3	Transparansi Kebijakan dan Pengaruhnya terhadap Kepercayaan Pasar	121
5.3	Ekonomi Politik dan Pengaruh Kebijakan terhadap Stabilitas Makro	125

5.3.1	Interaksi antara Ekonomi dan Kebijakan Politik	125
5.3.2	Peran Kebijakan Publik dalam Menjaga Keseimbangan Ekonomi	130
5.3.3	Tantangan Kebijakan Ekonomi dalam Menghadapi Gejolak Politik Global	134
BAB 6. EKONOMI GLOBAL DAN INTEGRASI INTERNASIONAL		139
6.1	Dampak Ekonomi Global terhadap Ekonomi Domestik	141
6.1.1	Globalisasi dan Ketergantungan Ekonomi Antar Negara	141
6.1.2	Perubahan Pasar Global dan Dampaknya terhadap Sektor Domestik	145
6.1.3	Adaptasi Ekonomi Nasional dalam Menghadapi Persaingan Global	149
6.2	Peran Lembaga Internasional	153
6.2.1	Fungsi dan Kebijakan Lembaga Ekonomi Global	153
6.2.2	Dampak Intervensi IMF dan Bank Dunia terhadap Stabilitas Ekonomi	157
6.3	Kebijakan Proteksionisme dan Perdagangan Bebas	162
6.3.1	Perbandingan Kebijakan Proteksionisme dan Liberalisasi Perdagangan	162
6.3.2	Dampak Tarif Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	167
6.3.3	Negosiasi Perjanjian Perdagangan Internasional dan Keseimbangan Ekonomi	171

BAB 7. TANTANGAN EKONOMI MAKRO KEDEPAN	177
7.1 Revolusi Teknologi dan Perubahan Ekonomi	179
7.1.1 Digitalisasi dan Dampaknya terhadap Model Bisnis Global	179
7.1.2 Peran Otomatisasi dan AI dalam Pasar Tenaga Kerja Dunia	186
7.2 Implikasi Ekonomi Makro terhadap Kesejahteraan	190
7.2.1 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan	190
7.2.2 Ekonomi Inklusif dan Strategi Pemerataan Kesejahteraan	194
7.3 Prediksi Tren Ekonomi Global	200
7.3.1 Tantangan Ekonomi dalam Menghadapi Disrupsi Teknologi	200
7.3.2 Perubahan Geopolitik dan Dampaknya terhadap Ekonomi Global	207
7.3.3 Proyeksi Kebijakan Ekonomi dalam Menghadapi Ketidakpastian Masa Depan	213
BAB 8. PENUTUP	217
8.1 Refleksi atas Transformasi Kebijakan Makroekonomi	218
8.2 Implikasi Strategis bagi Pembuat Kebijakan dan Akademisi	219
8.3 Arah Masa Depan: Integrasi, Inovasi, dan Keberlanjutan	220
8.4 Penutup dan Harapan	221
DATAR PUSTAKA	223
PENULIS	234

BAB 1.

PENDAHULUAN

Learning Objectives:

1. Memahami alasan dan konteks transformasi kebijakan makroekonomi.
2. Mengidentifikasi tantangan dan peluang di era globalisasi dan digitalisasi.
3. Menjelaskan dampak disrupsi terhadap kebijakan ekonomi nasional.
4. Menganalisis respons kebijakan terhadap ketidakpastian global.
5. Menyadari pergeseran paradigma dari stabilisasi menuju transformasi struktural.
6. Menilai pentingnya koordinasi kebijakan antar sektor dan antar negara.

Bab ini membuka pembahasan dengan menelusuri evolusi kebijakan makroekonomi dari pendekatan konvensional menuju paradigma baru yang lebih adaptif, interdisipliner, dan berbasis teknologi. Di tengah keterhubungan global dan disrupsi digital yang semakin intens, kebijakan makro dituntut untuk tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga mendorong transformasi struktural dan keberlanjutan jangka panjang. Melalui pemetaan latar belakang, tantangan, peluang, serta dinamika kebijakan di era disrupsi, bab ini membangun fondasi konseptual bagi analisis kebijakan yang lebih mendalam di bagian-bagian selanjutnya.

1.1 Latar Belakang Transformasi Makroekonomi

Kebijakan makroekonomi modern berakar pada dinamika pasca-Bretton Woods, ketika stabilitas nilai tukar menjadi prioritas utama dalam menjaga keseimbangan eksternal dan internal suatu negara. Sistem nilai tukar tetap yang berlaku saat itu menuntut koordinasi ketat antara kebijakan moneter dan fiskal untuk menghindari defisit neraca pembayaran dan tekanan terhadap cadangan devisa. Dalam konteks ini, pengendalian inflasi dan disiplin fiskal menjadi instrumen utama untuk menjaga kredibilitas ekonomi nasional. Bank sentral berperan sebagai penjaga stabilitas harga, sementara pemerintah berfokus pada pengelolaan anggaran yang berimbang dan pengendalian utang publik.

Namun, runtuhnya sistem Bretton Woods pada awal 1970-an menandai pergeseran besar dalam arsitektur kebijakan makroekonomi global. Negara-negara mulai mengadopsi sistem nilai tukar mengambang, yang memberikan fleksibilitas lebih besar namun juga meningkatkan volatilitas pasar. Globalisasi ekonomi yang semakin intensif—ditandai oleh liberalisasi perdagangan, deregulasi sektor keuangan, dan mobilitas modal internasional—memaksa negara untuk menyesuaikan strategi makro mereka terhadap dinamika eksternal. Kebijakan moneter tidak lagi hanya berorientasi domestik, tetapi harus mempertimbangkan dampak dari pergerakan suku bunga global, arus investasi portofolio, dan ekspektasi pasar internasional.

Integrasi pasar keuangan dan perdagangan lintas negara juga memperluas cakupan dan kompleksitas kebijakan makroekonomi. Negara-negara berkembang, khususnya, menghadapi tantangan ganda: menjaga stabilitas makro dalam lingkungan global yang tidak pasti, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, kebijakan makro mulai bergeser dari pendekatan reaktif menuju pendekatan yang lebih strategis dan antisipatif. Fokus tidak lagi terbatas pada stabilisasi jangka pendek, tetapi juga mencakup reformasi struktural, peningkatan daya saing, dan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan iklim global. Evolusi ini menjadi fondasi penting bagi transformasi kebijakan makroekonomi di era digital dan disrupsi kontemporer.

Dalam dua dekade terakhir, revolusi digital telah menjadi kekuatan utama yang mengubah struktur ekonomi global. Teknologi informasi, internet, kecerdasan buatan, dan komputasi awan telah melahirkan sektor-sektor baru yang berbasis data dan inovasi, seperti ekonomi platform, *fintech*, dan industri kreatif digital. Pertumbuhan pesat sektor-sektor ini telah menggeser pusat gravitasi ekonomi dari manufaktur dan jasa konvensional ke model bisnis yang lebih fleksibel, terdesentralisasi, dan berbasis teknologi. Akibatnya, kebijakan makroekonomi tidak lagi dapat mengandalkan indikator tradisional semata, melainkan harus memahami dinamika baru yang muncul dari ekonomi digital.

Transformasi ini juga menimbulkan tantangan serius dalam hal ketimpangan digital dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Meskipun teknologi membuka peluang besar bagi efisiensi dan inklusi, tidak semua kelompok masyarakat atau wilayah memiliki akses yang setara terhadap infrastruktur digital, literasi teknologi, dan modal inovasi. Ketimpangan ini berpotensi memperlebar jurang sosial-ekonomi dan menghambat efektivitas kebijakan makro yang bersifat universal. Di sisi lain, perubahan pola konsumsi dan produksi yang dipicu oleh digitalisasi turut memengaruhi indikator makro seperti inflasi, produktivitas, dan pengangguran. Misalnya, harga barang digital yang cenderung deflasi, serta otomatisasi yang mengubah struktur pasar tenaga kerja.

Selain itu, revolusi digital beririsan dengan tuntutan global terhadap keberlanjutan dan transisi menuju ekonomi hijau. Teknologi memungkinkan efisiensi energi, pengurangan emisi, dan pengelolaan sumber daya yang lebih cerdas, namun juga menciptakan jejak karbon baru melalui konsumsi energi digital dan limbah elektronik. Kebijakan makroekonomi kini dituntut untuk mengintegrasikan dimensi lingkungan ke dalam perencanaan fiskal dan moneter, serta mendorong investasi pada sektor-sektor berkelanjutan. Dengan demikian, transformasi digital bukan hanya soal inovasi teknologi, tetapi juga soal bagaimana kebijakan makro merespons perubahan struktural yang kompleks dan multidimensi.

Transformasi struktural yang dipicu oleh globalisasi dan digitalisasi menuntut pendekatan kebijakan makroekonomi yang jauh lebih adaptif dibandingkan era sebelumnya. Ketika guncangan ekonomi dapat berasal dari sektor teknologi, geopolitik, atau bahkan perubahan iklim, respons kebijakan tidak bisa lagi bersifat linier atau sektoral. Dibutuhkan integrasi lintas disiplin—antara ekonomi, teknologi, lingkungan, dan politik publik—untuk merancang strategi makro yang mampu menjawab kompleksitas zaman. Pendekatan interdisipliner ini memungkinkan pembuat kebijakan untuk memahami interaksi antara variabel makro dan dinamika sosial-teknologis yang saling memengaruhi.

Lebih dari itu, kebijakan makro masa kini harus berbasis data dan analitik yang real-time agar mampu

merespons perubahan dengan presisi dan kecepatan. Teknologi digital menyediakan peluang besar untuk mengumpulkan, memproses, dan memvisualisasikan data ekonomi secara dinamis, sehingga perumusan kebijakan dapat lebih evidence-based dan kontekstual. Dalam kerangka ini, stabilitas makro bukan lagi sekadar tujuan akhir, melainkan fondasi strategis bagi inovasi ekonomi, ketahanan sosial, dan keberlanjutan jangka panjang. Negara yang mampu menjaga stabilitas sambil mendorong transformasi akan lebih siap menghadapi disrupsi dan memanfaatkan peluang global secara optimal.

1.2 Tantangan dan Peluang di Era Global-Digital

Era global-digital membawa tingkat keterhubungan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perdagangan internasional kini tidak hanya melibatkan barang dan jasa fisik, tetapi juga aliran data, algoritma, dan layanan digital lintas batas. Investasi lintas negara semakin dipengaruhi oleh sentimen pasar global yang bergerak cepat melalui *platform digital* dan media sosial. Teknologi memungkinkan integrasi rantai pasok global secara real-time, mempercepat inovasi dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha dari berbagai skala. Dalam konteks ini, kebijakan makroekonomi memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif, efisien, dan berbasis inovasi, terutama jika mampu memanfaatkan teknologi untuk memperkuat koordinasi fiskal, moneter, dan struktural.

Namun, keterhubungan ekstrem ini juga membawa risiko sistemik yang kompleks dan sulit dikendalikan. Volatilitas pasar keuangan global dapat menyebar dengan cepat melalui kanal digital, memicu tekanan terhadap nilai tukar, inflasi, dan arus modal di negara-negara berkembang. Ketergantungan pada teknologi juga menciptakan kerentanan baru, seperti serangan siber terhadap sistem keuangan atau disrupsi digital terhadap sektor riil. Selain itu, kebijakan ekonomi suatu negara kini dapat memiliki efek limpahan (*spillover*) yang signifikan terhadap negara lain, sehingga koordinasi internasional menjadi semakin penting namun juga semakin rumit. Dalam kondisi ini, kebijakan makroekonomi harus dirancang dengan sensitivitas tinggi terhadap dinamika global, serta dilengkapi dengan mekanisme mitigasi risiko dan adaptasi yang tangguh.

Salah satu tantangan paling nyata dalam era global-digital adalah meningkatnya volatilitas pasar global yang berdampak langsung terhadap stabilitas makroekonomi domestik. Perubahan suku bunga acuan di negara maju, seperti Amerika Serikat atau Uni Eropa, dapat memicu arus modal keluar dari negara berkembang, menekan nilai tukar dan meningkatkan tekanan inflasi. Konflik geopolitik, seperti perang dagang atau ketegangan regional, juga dapat mengganggu perdagangan internasional dan menciptakan ketidakpastian yang memengaruhi ekspektasi pelaku pasar. Di sisi lain, guncangan harga komoditas—baik karena faktor alam maupun spekulasi pasar—dapat mengganggu neraca

perdagangan dan fiskal negara pengimpor maupun pengekspor. Dalam konteks ini, kebijakan makroekonomi harus mampu merespons secara cepat dan fleksibel terhadap dinamika eksternal yang tidak selalu dapat diprediksi.

Tantangan kedua adalah risiko sistemik lintas sektor yang semakin kompleks akibat ketergantungan pada teknologi digital. Sistem keuangan modern sangat bergantung pada infrastruktur digital, mulai dari sistem pembayaran hingga pengelolaan data transaksi. Serangan siber atau gangguan teknis terhadap sistem ini dapat menimbulkan kepanikan pasar dan gangguan ekonomi yang luas. Selain itu, disrupsi rantai pasok global akibat krisis logistik, pandemi, atau kebijakan proteksionis dapat menghambat produksi dan distribusi barang, memicu inflasi, dan menurunkan produktivitas. Risiko-risiko ini bersifat lintas sektor dan tidak dapat ditangani oleh satu kebijakan tunggal, sehingga menuntut pendekatan makro yang lebih holistik dan berbasis mitigasi risiko.

Tantangan ketiga adalah fragmentasi kebijakan yang sering kali menghambat efektivitas respons makroekonomi. Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan struktural masih menghadapi kendala institusional, seperti silo antar kementerian, perbedaan mandat lembaga, dan konflik kepentingan politik. Akibatnya, kebijakan yang seharusnya saling mendukung justru berjalan sendiri-sendiri atau bahkan saling bertentangan. Misalnya, stimulus fiskal yang ekspansif

dapat bertabrakan dengan kebijakan moneter yang ketat, menciptakan sinyal campuran bagi pasar. Untuk mengatasi fragmentasi ini, diperlukan kerangka koordinasi yang kuat, berbasis data, dan didukung oleh tata kelola yang transparan serta komitmen politik yang konsisten.

Di tengah kompleksitas dan ketidakpastian yang dihadirkan oleh era global-digital, muncul pula peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat efektivitas kebijakan makroekonomi. Salah satu peluang utama adalah digitalisasi kebijakan, di mana teknologi memungkinkan pengumpulan dan analisis data ekonomi secara real-time. Dengan dukungan sistem informasi yang canggih, pembuat kebijakan dapat memantau indikator makro seperti inflasi, konsumsi, dan investasi dengan presisi tinggi, serta merespons perubahan secara cepat dan terukur. Proyeksi makroekonomi pun menjadi lebih akurat, karena didasarkan pada data granular dan algoritma prediktif yang mampu menangkap pola dinamis dalam perekonomian.

Selain itu, era digital membuka ruang bagi integrasi kebijakan lintas sektor melalui pendekatan berbasis platform dan interoperabilitas data. Kebijakan fiskal, moneter, dan pembangunan struktural yang sebelumnya berjalan dalam silo dapat disinergikan melalui sistem digital yang terintegrasi. Misalnya, data perpajakan dapat dihubungkan dengan data konsumsi dan investasi untuk merancang insentif fiskal yang lebih tepat sasaran. Begitu pula kebijakan moneter dapat disesuaikan dengan

dinamika sektor riil secara lebih responsif. Integrasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kebijakan, tetapi juga memperkuat daya dorong transformasi ekonomi secara menyeluruh.

Peluang ketiga terletak pada inovasi dalam tata kelola kebijakan (*governance*). Teknologi seperti *blockchain*, kecerdasan buatan (AI), dan big data membuka ruang bagi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih luas dalam proses perumusan kebijakan. Sistem berbasis *blockchain*, misalnya, dapat digunakan untuk melacak aliran dana publik secara transparan, sementara AI dapat membantu menganalisis dampak kebijakan secara cepat dan objektif. Partisipasi publik pun dapat difasilitasi melalui *platform digital* yang memungkinkan konsultasi kebijakan secara terbuka. Dengan demikian, tantangan era global-digital bukan hanya soal kompleksitas teknis, tetapi juga soal kapasitas institusional dan keberanian untuk merancang kebijakan yang transformatif, inklusif, dan berorientasi masa depan.

1.3 Dinamika Kebijakan Makroekonomi di Era Disrupsi

Disrupsi digital telah mengubah cara ekonomi beroperasi, dari pola produksi hingga sistem pembayaran, menciptakan dinamika baru yang belum sepenuhnya tercakup dalam kerangka kebijakan makro tradisional. Ketegangan geopolitik—seperti perang dagang, konflik regional, dan fragmentasi aliansi

ekonomi—menambah lapisan ketidakpastian yang memengaruhi arus perdagangan, investasi, dan stabilitas nilai tukar. Sementara itu, krisis iklim menuntut transformasi struktural yang mendalam, termasuk transisi energi, perubahan pola konsumsi, dan reformasi fiskal yang berorientasi pada keberlanjutan. Ketiga faktor ini saling berinteraksi, menciptakan lanskap makroekonomi yang lebih kompleks, dinamis, dan rentan terhadap guncangan multidimensi.

Tabel 1.1. Dinamika Kebijakan Makroekonomi di Era Disrupsi

Aspek Utama	Mekanisme	Contoh Implementasi	Dampak yang Diharapkan
Ketidakpastian Global dan Respons Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis risiko global • Instrumen kontinjensi • Sistem peringatan dini 	<ul style="list-style-type: none"> • Respons terhadap suku bunga <i>The Fed</i> • Kebijakan stabilisasi nilai tukar dan perlindungan sosial 	Ketahanan ekonomi, respons cepat terhadap guncangan, perlindungan kelompok rentan
Perubahan Paradigma: Stabilisasi → Transformasi Struktural	<ul style="list-style-type: none"> • Digitalisasi dan inovasi • Diversifikasi ekonomi • Integrasi kebijakan hijau 	<ul style="list-style-type: none"> • Investasi SDM dan teknologi • Reformasi fiskal untuk transisi energi 	Peningkatan produktivitas, jangka panjang, adaptabilitas sistem ekonomi
Tantangan Koordinasi Lintas Sektor dan Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Sinergi fiscal • industri-digital • Kerja sama internasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi BI dan Kemenkeu • Negosiasi pajak digital dan regulasi <i>fintech</i> 	Efektivitas kebijakan, pengurangan risiko sistemik, optimalisasi peluang global

Dalam konteks ini, kebijakan makroekonomi tidak lagi cukup hanya bersifat responsif terhadap fluktuasi jangka pendek, melainkan harus dirancang untuk resiliensi dan fleksibilitas jangka panjang. Negara perlu membangun kapasitas untuk menghadapi guncangan yang tidak terduga, baik dari sisi teknologi, geopolitik, maupun lingkungan. Ini mencakup diversifikasi instrumen kebijakan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi untuk deteksi dini dan respons cepat. Kebijakan yang resilien bukan hanya mampu bertahan dalam krisis, tetapi juga mampu beradaptasi dan memanfaatkan peluang yang muncul dari perubahan struktural global. Dengan demikian, ketidakpastian bukan hanya tantangan, tetapi juga pemicu inovasi dalam desain kebijakan makroekonomi yang lebih tangguh dan transformatif.

1.3.1. Ketidakpastian Global dan Respons Kebijakan

Dalam era global-digital, guncangan eksternal seperti pandemi, konflik regional, dan perubahan kebijakan ekonomi negara besar dapat menyebar dengan sangat cepat dan memicu efek domino terhadap indikator makroekonomi domestik. Misalnya, keputusan The Fed untuk menaikkan suku bunga dapat menyebabkan capital outflow dari negara berkembang, menekan nilai tukar dan meningkatkan beban utang luar negeri. Kebijakan industri Tiongkok yang berubah secara tiba-tiba dapat mengganggu rantai pasok global, memicu kelangkaan bahan baku, dan mendorong inflasi. Guncangan semacam

ini tidak lagi bersifat lokal atau sektoral, melainkan sistemik dan lintas batas, sehingga menuntut respons kebijakan yang lebih terintegrasi dan berbasis analisis risiko global.

Kecepatan transmisi guncangan kini diperkuat oleh kanal digital dan keuangan yang sangat terhubung. Informasi pasar, sentimen investor, dan keputusan bisnis menyebar dalam hitungan detik melalui *platform digital*, memengaruhi ekspektasi dan perilaku ekonomi secara luas. Namun, dampak dari guncangan tersebut sering kali asimetris, tergantung pada struktur ekonomi, ketahanan fiskal, dan kerentanan sosial masing-masing negara. Sektor informal, UMKM, dan kelompok rentan biasanya mengalami tekanan yang lebih besar dibandingkan sektor formal atau korporasi besar. Oleh karena itu, kebijakan makro harus mampu mengidentifikasi titik-titik kerentanan dan merancang intervensi yang bersifat targeted dan inklusif.

Dalam menghadapi guncangan semacam ini, negara membutuhkan instrumen kebijakan yang bersifat kontinjensi dan adaptif. Artinya, kebijakan tidak hanya dirancang untuk kondisi normal, tetapi juga untuk skenario ekstrem yang mungkin terjadi. Ini mencakup fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran, ruang gerak dalam kebijakan moneter, serta mekanisme otomatis untuk perlindungan sosial dan stabilisasi sektor riil. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk membangun sistem peringatan dini, simulasi kebijakan, dan evaluasi dampak secara real-time. Dengan pendekatan ini, kebijakan

makroekonomi tidak hanya menjadi alat stabilisasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk membangun ketahanan dan daya saing ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

1.3.2. Perubahan Paradigma: Dari Stabilisasi ke Transformasi Struktural

Dalam konteks ekonomi global yang semakin kompleks dan terdigitalisasi, kebijakan makroekonomi tidak lagi cukup hanya berfokus pada pengendalian inflasi dan pencapaian pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Meskipun kedua indikator tersebut tetap penting, mereka tidak lagi mencerminkan keseluruhan kesehatan dan ketahanan ekonomi nasional. Fokus kebijakan kini bergeser ke arah transformasi struktural yang lebih dalam, terutama dalam hal peningkatan produktivitas melalui digitalisasi dan inovasi. Teknologi bukan hanya alat bantu, tetapi menjadi penggerak utama efisiensi, daya saing, dan penciptaan nilai tambah baru dalam berbagai sektor ekonomi.

Selain transformasi produktivitas, kebijakan makro juga harus memperkuat ketahanan ekonomi terhadap guncangan eksternal dan internal. Ketahanan ini mencakup kemampuan sistem ekonomi untuk menyerap dan pulih dari krisis, baik yang bersumber dari pasar global, perubahan iklim, maupun disrupsi teknologi. Kebijakan fiskal dan moneter harus dirancang dengan fleksibilitas dan ruang kontinjensi, sementara kebijakan struktural harus mendorong diversifikasi ekonomi dan

penguatan kapasitas lokal. Ketahanan bukan hanya soal stabilitas, tetapi juga soal adaptabilitas dan kemampuan untuk berinovasi di tengah tekanan.

Yang tak kalah penting, paradigma baru kebijakan makroekonomi menempatkan keberlanjutan jangka panjang sebagai komponen inti, termasuk transisi menuju energi bersih dan pembangunan ekonomi hijau. Ini menuntut integrasi antara kebijakan makro dan kebijakan sektoral seperti energi, lingkungan, dan industri. Pendekatan berbasis sistem dan data menjadi kunci untuk memahami interaksi antar sektor, mengukur dampak kebijakan secara holistik, dan merancang strategi yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan makroekonomi masa kini harus bersifat transformatif, lintas sektor, dan berorientasi pada masa depan.

1.3.3. Tantangan Koordinasi Kebijakan Lintas Sektor dan Negara

Dalam ekonomi global yang semakin saling terhubung, efektivitas kebijakan makroekonomi tidak lagi bergantung semata pada kualitas desain kebijakan, tetapi juga pada tingkat koordinasi lintas sektor. Sinergi antara kebijakan fiskal dan kebijakan industri, misalnya, menjadi krusial dalam mendorong transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Insentif fiskal yang dirancang tanpa mempertimbangkan kebutuhan sektor industri digital dapat berujung pada ketidakefisienan

atau bahkan distorsi pasar. Sebaliknya, kebijakan industri yang tidak didukung oleh alokasi anggaran yang memadai akan kehilangan daya dorongnya. Oleh karena itu, pendekatan lintas sektor yang terintegrasi menjadi syarat utama bagi kebijakan makro yang transformatif.

Koordinasi juga harus terjadi antar lembaga, terutama antara bank sentral, kementerian keuangan, dan otoritas digital. Ketika kebijakan moneter memengaruhi suku bunga dan likuiditas, sementara kebijakan fiskal menentukan arah belanja dan pajak, maka komunikasi dan harmonisasi antar lembaga menjadi sangat penting untuk menghindari sinyal kebijakan yang kontradiktif. Di era digital, peran otoritas teknologi dan data juga semakin sentral, karena mereka mengelola infrastruktur digital yang menjadi tulang punggung sistem pembayaran, perpajakan, dan distribusi bantuan sosial. Tanpa koordinasi yang erat, kebijakan makro bisa kehilangan efektivitasnya atau bahkan menimbulkan risiko sistemik baru.

Koordinasi antarnegara menjadi keharusan dalam menghadapi isu lintas batas seperti pajak digital, regulasi *fintech*, dan krisis keuangan global. Harmonisasi kebijakan mencegah arbitrase regulasi dan perlombaan ke dasar, sementara penanganan krisis membutuhkan kerja sama internasional yang tangguh. Untuk itu, diperlukan kapasitas institusional yang kuat, kerangka kerja fleksibel, dan tata kelola yang transparan agar kebijakan makroekonomi mampu menjawab tantangan global secara efektif.

BAB 2.

TRANSFORMASI KEBIJAKAN MAKROEKONOMI DI ERA GLOBAL DAN DIGITAL

Learning Objectives:

1. Menjelaskan peran bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan ketahanan sistem keuangan.
2. Menganalisis kebijakan sisi penawaran, termasuk deregulasi, peningkatan produktivitas, dan investasi sumber daya manusia.
3. Mengevaluasi kebijakan perdagangan dan investasi dalam konteks globalisasi dan daya saing nasional.
4. Menilai strategi stabilisasi makroekonomi dalam menghadapi krisis, melalui kebijakan fiskal dan moneter.
5. Mendiskusikan dampak digitalisasi—seperti *fintech*, perbankan digital, dan ekonomi hijau—terhadap kebijakan makroekonomi modern.

Dalam dekade terakhir, kebijakan makroekonomi mengalami pergeseran mendasar dari pendekatan konvensional menuju strategi yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berbasis inovasi. Bab ini mengkaji bagaimana reformasi struktural, peningkatan produktivitas, dan investasi dalam sumber daya manusia menjadi fondasi utama dalam kebijakan sisi penawaran yang berorientasi jangka panjang. Di tengah tekanan globalisasi dan dinamika perdagangan internasional, negara dituntut untuk merancang kebijakan perdagangan dan investasi yang tidak hanya melindungi kepentingan domestik, tetapi juga meningkatkan daya saing dalam pasar global yang semakin terbuka dan kompleks.

Transformasi ini semakin dipercepat oleh digitalisasi, yang mengubah cara bank sentral dan pemerintah mengelola kebijakan moneter dan fiskal. *Fintech*, digital banking, dan sistem pajak berbasis teknologi menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru dalam menjaga stabilitas makroekonomi, terutama saat menghadapi krisis global dan disrupsi sistemik. Bab ini juga mengajak mahasiswa untuk mengevaluasi arah kebijakan masa depan, termasuk integrasi ekonomi hijau, keberlanjutan fiskal, dan prediksi tren kebijakan dalam era digital yang terus berkembang. Dengan pendekatan analitis dan berbasis studi kasus, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan merumuskan kebijakan makroekonomi yang relevan, resilien, dan visioner.

2.1 Peran Bank Sentral dalam Menjaga Stabilitas Nilai Tukar dan Sistem Keuangan

Bank sentral memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, termasuk pengelolaan nilai tukar dan ketahanan sistem keuangan.

Tabel 2.1. Peran Bank Sentral

Fungsi Utama	Mekanisme	Contoh	Hasil yang Diharapkan
Stabilitas Nilai Tukar	<ul style="list-style-type: none"> • Intervensi pasar valuta asing • Pengelolaan cadangan devisa • Penyesuaian suku bunga 	<ul style="list-style-type: none"> • Intervensi BI di pasar valas • Suku bunga acuan BI-Rate 	Nilai tukar stabil, kepercayaan investor, daya saing ekspor
Ketahanan Sistem Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan sektor perbankan • Penilaian kecukupan modal dan risiko 	<ul style="list-style-type: none"> • Stress test perbankan • Laporan neraca bank 	Sistem keuangan efisien, mencegah krisis likuiditas
Kebijakan Makroprudensial	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio LTV • Pembatasan kredit konsumtif • Cadangan stabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Aturan LTV oleh BI • Pengetatan kredit properti 	Mencegah gelembung aset, mengurangi risiko sistemik
Koordinasi dan Transparansi Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Sinergi dengan otoritas fiskal • Komunikasi kebijakan yang jelas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pernyataan publik BI • Forum koordinasi fiskal-moneter 	Kepercayaan pasar, efektivitas transmisi kebijakan

Bank sentral memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan ketahanan sistem keuangan sebagai pilar utama kestabilan ekonomi makro. Melalui pengendalian moneter, regulasi keuangan, serta intervensi pasar, bank sentral bertanggung jawab memastikan sistem keuangan berjalan efisien dan tahan terhadap guncangan (Mankiw, 2014).

Dalam menjaga stabilitas nilai tukar, bank sentral dapat melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk mencegah fluktuasi tajam yang mengancam stabilitas harga atau ekspor-impor. Selain itu, cadangan devisa dikelola untuk menjaga kepercayaan investor internasional, mendanai kebutuhan neraca pembayaran, dan mempertahankan nilai tukar dalam kisaran yang stabil. Tingkat suku bunga juga berpengaruh signifikan terhadap arus modal, karena suku bunga tinggi menarik investasi asing yang memperkuat nilai tukar, sementara suku bunga rendah mendorong pelemahan nilai tukar yang dapat meningkatkan daya saing ekspor (Blanchard & Johnson, 2013).

Di sisi lain, ketahanan sistem keuangan dijaga melalui pengawasan dan regulasi ketat terhadap sektor perbankan dan lembaga keuangan. Bank sentral mengawasi kecukupan modal, manajemen risiko, serta kesehatan neraca bank untuk mencegah krisis likuiditas. Kepercayaan publik terhadap sistem perbankan sangat penting dalam menjaga kestabilan ekonomi karena sektor ini merupakan jalur utama transmisi kebijakan moneter.

Selain itu, kebijakan makroprudensial diterapkan untuk mengurangi risiko sistemik yang dapat menjalar antar lembaga keuangan. Misalnya, pengaturan rasio pinjaman terhadap nilai agunan (LTV), pembatasan kredit konsumtif, dan pembentukan cadangan stabilitas menjadi alat pencegah gelembung aset atau eksposur risiko berlebihan. Ketika dilakukan secara terukur, kebijakan ini memperkuat resistensi sistem keuangan terhadap tekanan eksternal maupun domestik (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2014).

Dengan demikian, bank sentral bukan hanya penjaga inflasi, tetapi juga pelindung kestabilan nilai tukar dan penjaga integritas sistem keuangan. Peran ganda ini menuntut koordinasi erat dengan otoritas fiskal dan transparansi kebijakan untuk membangun kepercayaan pasar dan masyarakat.

2.2 Kebijakan Sisi Penawaran (*Supply-Side Policy*)

2.2.1 Deregulasi dan Reformasi Struktural dalam Ekonomi

Deregulasi dan reformasi struktural merupakan pilar penting dalam meningkatkan efisiensi pasar dan menciptakan ekonomi yang dinamis serta berdaya saing tinggi. Deregulasi mengacu pada pengurangan hambatan administratif dan penyederhanaan aturan yang berlebihan, sementara reformasi struktural mencakup pembaruan institusi, regulasi, serta kerangka kerja

ekonomi demi memperbaiki fondasi jangka panjang pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2014).

Deregulasi berperan dalam menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi investasi. Dengan mengurangi birokrasi dan mempercepat proses perizinan, pelaku usaha lebih mudah mengakses pasar dan memulai bisnis. Ini meningkatkan persaingan, efisiensi produksi, dan mendorong inovasi. Deregulasi di sektor keuangan, tenaga kerja, dan logistik sering kali dikaitkan dengan peningkatan produktivitas nasional serta kemudahan berbisnis, yang menjadi daya tarik utama bagi investor domestik maupun asing (Blanchard & Johnson, 2013).

Sementara itu, reformasi struktural bertujuan mengatasi hambatan jangka panjang dalam sistem ekonomi. Reformasi ini bisa mencakup liberalisasi pasar, penguatan sistem hukum, reformasi perpajakan, serta modernisasi administrasi publik. Dengan institusi yang lebih transparan dan responsif, ekonomi menjadi lebih adaptif terhadap perubahan global dan lebih mampu bersaing di tingkat internasional. Hal ini sangat penting dalam menghadapi era teknologi dan integrasi perdagangan dunia (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2014).

Deregulasi dan reformasi struktural yang terintegrasi juga meningkatkan kredibilitas kebijakan ekonomi dan memperbaiki persepsi investor. Negara-negara yang konsisten melaksanakan reformasi cenderung mengalami peningkatan dalam peringkat kemudahan berbisnis, menurunnya biaya transaksi, dan

bertambahnya lapangan kerja yang berkualitas. Namun, proses ini harus dilakukan secara bertahap dan disertai perlindungan terhadap kelompok rentan agar dampaknya inklusif.

Dengan demikian, deregulasi dan reformasi struktural adalah kunci untuk menciptakan ekonomi yang efisien, kompetitif, dan berkelanjutan. Keduanya menjadi fondasi dalam mentransformasi sistem ekonomi agar lebih responsif terhadap dinamika global dan mampu menjawab tantangan pembangunan jangka panjang.

2.2.2 Peningkatan Produktivitas dan Inovasi Teknologi

Peningkatan produktivitas dan inovasi teknologi memainkan peran sentral dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan daya saing industri. Di era digital, teknologi tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi juga pendorong utama perubahan model bisnis dan efisiensi operasional. Penggunaan kecerdasan buatan (AI), robotika, *Internet of Things* (IoT), dan otomatisasi telah mengubah cara perusahaan memproduksi barang dan jasa, memangkas biaya, serta meningkatkan kecepatan dan kualitas produksi (Mankiw, 2014).

Efisiensi produksi meningkat signifikan karena teknologi mampu menggantikan proses manual yang lambat dan rentan kesalahan. Misalnya, dalam manufaktur, adopsi smart factories memungkinkan optimalisasi energi, kontrol kualitas real-time, dan

pengurangan waktu henti mesin. Di sektor jasa, sistem berbasis cloud dan big data mempermudah analisis konsumen dan pengambilan keputusan bisnis. Dengan demikian, teknologi mendorong ekspansi usaha ke pasar baru secara lebih cepat dan fleksibel (Blanchard & Johnson, 2013).

Untuk mempercepat inovasi, pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan kebijakan insentif penelitian dan pengembangan (R&D), khususnya bagi industri strategis. Bentuk insentif ini dapat berupa potongan pajak R&D, pendanaan hibah, kemitraan triple-helix (pemerintah-industri-akademisi), serta pembentukan pusat inovasi. Kebijakan tersebut memberikan dorongan finansial dan regulasi agar sektor swasta lebih berani mengambil risiko dalam menciptakan produk atau teknologi baru (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2014).

Industri strategis—seperti energi terbarukan, teknologi informasi, bioteknologi, dan manufaktur berorientasi ekspor—sering kali menjadi prioritas dalam kebijakan inovasi nasional. Insentif pada sektor-sektor ini menghasilkan efek ganda, yaitu mendorong pertumbuhan sektor unggulan sekaligus menciptakan lapangan kerja berbasis keterampilan tinggi. Negara yang sukses menerapkan kebijakan inovasi cenderung mengalami lompatan produktivitas dan posisi yang kuat dalam rantai nilai global.

Dengan kata lain, sinergi antara teknologi dan kebijakan inovasi menjadi kunci utama dalam

memperkuat daya saing ekonomi nasional. Pemerintah perlu menciptakan ekosistem inovasi yang mendukung riset, inklusif terhadap UMKM, serta adaptif terhadap disrupsi global.

2.2.3 Investasi dalam Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Investasi dalam pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Pendidikan tidak hanya meningkatkan kapasitas individu dalam memahami dan menggunakan informasi, tetapi juga memperbesar potensi produktivitas tenaga kerja secara nasional. Mankiw (2014) menekankan bahwa peningkatan tingkat pendidikan berkorelasi positif dengan output per pekerja dan efisiensi proses produksi di berbagai sektor ekonomi.

Semakin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja, semakin besar kontribusinya terhadap produktivitas dan inovasi. Pekerja terdidik lebih cepat mengadaptasi teknologi baru, lebih fleksibel terhadap perubahan pasar, dan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi. Selain itu, pendidikan juga meningkatkan partisipasi sosial dan memperkuat pembangunan institusi yang demokratis dan inklusif, yang sangat penting dalam ekosistem pembangunan jangka panjang (Blanchard & Johnson, 2013).

Di era revolusi industri 4.0 dan digitalisasi, pendidikan formal saja tidak cukup. Diperlukan strategi

berkelanjutan melalui pelatihan keterampilan (*reskilling* dan *upskilling*) agar tenaga kerja dapat terus relevan dengan perkembangan teknologi. Program pelatihan vokasional, pendidikan teknis, dan sertifikasi digital menjadi elemen penting untuk menyiapkan angkatan kerja yang adaptif terhadap kebutuhan industri baru seperti AI, data science, dan teknologi hijau (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2014).

Tabel 2.2. Kebijakan Sisi Penawaran

Strategi Utama	Mekanisme	Contoh	Hasil yang Diharapkan
Deregulasi dan Reformasi Struktural	<ul style="list-style-type: none"> • Penyederhanaan regulasi • Modernisasi institusi • Reformasi perpajakan dan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Reformasi birokrasi • Deregulasi sektor logistik dan keuangan 	Efisiensi pasar, peningkatan investasi, daya saing ekonomi
Peningkatan Produktivitas dan Inovasi Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Insentif R&D • Dukungan triple-helix • Adopsi teknologi digital dan otomatisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Hibah inovasi • Pusat teknologi nasional • Smart factories 	Lonjakan produktivitas, ekspansi pasar, posisi kuat dalam rantai nilai global
Investasi dalam Pendidikan dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan formal dan vokasional • Reskilling dan <i>upskilling</i> • Kemitraan industri-akademisi 	<ul style="list-style-type: none"> • Program sertifikasi digital • Pelatihan AI dan data science • Beasiswa teknis 	Tenaga kerja adaptif, pertumbuhan inklusif, keunggulan kompetitif jangka panjang

Pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama dalam merancang kebijakan pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan dunia kerja. Insentif untuk perusahaan yang mengembangkan pelatihan internal, kurikulum adaptif yang berbasis kompetensi industri, serta kemitraan dengan institusi pendidikan tinggi adalah contoh langkah strategis yang memperkuat kesiapan SDM nasional.

Dengan demikian, investasi pada pendidikan dan pengembangan keterampilan adalah investasi jangka panjang yang paling strategis bagi masa depan ekonomi. Negara yang konsisten membangun kualitas SDM akan memiliki keunggulan kompetitif yang sulit ditiru dan lebih mampu beradaptasi di tengah disrupsi global.

2.3 Kebijakan Perdagangan dan Investasi

2.3.1 Kebijakan Proteksionisme vs. Perdagangan Bebas

Proteksionisme dan perdagangan bebas merupakan dua pendekatan utama dalam kebijakan perdagangan internasional, dengan dampak berbeda terhadap perekonomian domestik dan daya saing industri nasional. Proteksionisme melibatkan kebijakan seperti tarif, kuota impor, dan subsidi domestik untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing. Sebaliknya, perdagangan bebas menekankan keterbukaan pasar dan penghapusan hambatan perdagangan untuk mendorong efisiensi dan inovasi (Mankiw, 2014).

Keuntungan proteksionisme bagi ekonomi domestik antara lain adalah perlindungan terhadap industri baru (*infant industries*) dan penyelamatan lapangan kerja lokal. Dengan membatasi barang impor, perusahaan domestik memiliki ruang untuk tumbuh dan bersaing tanpa tekanan dari produk asing yang lebih murah. Selain itu, kebijakan protektif bisa digunakan untuk menjaga kedaulatan pangan atau keamanan nasional di sektor strategis. Namun, proteksionisme juga menimbulkan biaya ekonomi, seperti harga barang yang lebih mahal bagi konsumen, kurangnya insentif efisiensi bagi produsen, dan risiko balasan dagang dari negara mitra (Blanchard & Johnson, 2013).

Di sisi lain, liberalisasi perdagangan atau perdagangan bebas membuka akses pasar yang luas dan meningkatkan efisiensi melalui spesialisasi dan keunggulan komparatif. Negara dapat mengimpor barang yang lebih murah atau berkualitas dari luar, sementara industri dalam negeri dapat mengeksport produk unggulan secara lebih kompetitif. Dalam jangka panjang, ini mendorong inovasi, alih teknologi, dan investasi asing langsung (FDI), yang memperkuat posisi industri nasional di pasar global (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2014).

Namun, liberalisasi juga menimbulkan tantangan bagi industri domestik yang belum kompetitif. Beberapa sektor dapat mengalami penurunan produksi atau kehilangan pasar, menyebabkan pengangguran struktural. Oleh karena itu, transisi ke perdagangan bebas

perlu diimbangi dengan kebijakan pendamping seperti pelatihan tenaga kerja, penguatan UMKM, serta pembangunan infrastruktur dan regulasi yang mendukung transformasi ekonomi.

Dengan demikian, pemilihan antara proteksionisme dan perdagangan bebas harus mempertimbangkan kondisi struktural perekonomian, kesiapan industri nasional, dan tujuan jangka panjang pembangunan. Dalam banyak kasus, pendekatan hibrida yang adaptif dan bertahap menjadi strategi yang paling rasional.

2.3.2 Regulasi Investasi Asing dan Strategi Peningkatan Daya Saing

Regulasi investasi asing memainkan peran sentral dalam menarik aliran modal internasional dan memperkuat kapasitas inovatif dalam negeri. Investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/*FDI) tidak hanya membawa dana segar ke sektor produktif, tetapi juga transfer teknologi, keahlian manajerial, dan integrasi ke dalam rantai pasok global. Pemerintah yang menyusun kebijakan investasi yang transparan, stabil, dan ramah bisnis cenderung lebih sukses menarik investor jangka panjang yang dapat mendukung transformasi struktural ekonomi (Mankiw, 2014).

Kebijakan investasi yang baik mencakup perlindungan hukum, kemudahan perizinan, insentif fiskal, dan kepastian kontrak. Ketika hambatan regulasi dikurangi dan prosedur investasi disederhanakan, daya tarik suatu negara sebagai tujuan investasi meningkat.

Selain itu, adanya perjanjian bilateral atau multilateral investasi (BITs) juga memperkuat kepastian hukum bagi investor asing, sehingga menumbuhkan kepercayaan dan minat terhadap sektor-sektor strategis seperti manufaktur, energi, dan teknologi (Blanchard & Johnson, 2013).

Untuk meningkatkan daya saing industri nasional, pemerintah mendorong pengembangan industri berbasis ekspor melalui berbagai strategi. Ini mencakup pembangunan kawasan ekonomi khusus, insentif bagi perusahaan berorientasi ekspor, penguatan pelabuhan dan infrastruktur logistik, serta pembukaan akses pasar melalui perjanjian dagang internasional. Industri ekspor yang kuat membantu negara memperoleh devisa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas karena tekanan kompetisi global mendorong efisiensi dan inovasi (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2014).

Kemitraan strategis antara investor asing dan pelaku usaha lokal juga menjadi sarana penting dalam mendorong alih teknologi dan pengembangan kapasitas. Pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang mendorong joint ventures, lokalisasi konten, atau transfer pengetahuan dalam sektor unggulan. Tujuannya adalah agar manfaat FDI tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memperkuat industri dalam negeri secara berkelanjutan.

Dengan demikian, regulasi investasi yang progresif dan strategi penguatan ekspor saling melengkapi dalam

memperkuat fondasi ekonomi nasional. Keterbukaan yang selektif, ditopang kebijakan industri yang cerdas, akan menciptakan sinergi antara modal asing dan kapasitas domestik dalam menghadapi persaingan global.

2.3.3 Dampak Globalisasi terhadap Kebijakan Ekonomi Domestik

Globalisasi telah mengubah lanskap kebijakan ekonomi domestik di seluruh dunia, terutama melalui integrasi ekonomi global yang semakin dalam. Negara-negara, terutama yang sedang berkembang, kini harus beradaptasi dengan sistem perdagangan bebas, arus modal yang bergerak cepat, serta ketergantungan pada pasar global. Hal ini menciptakan peluang pertumbuhan, tetapi juga memunculkan tantangan kebijakan yang kompleks dan multidimensi (Mankiw, 2014).

Bagi negara berkembang, integrasi global menawarkan akses ke pasar ekspor, aliran investasi asing langsung (FDI), serta transfer teknologi dan keterampilan. Namun, keterbukaan ini juga membawa risiko terhadap ketahanan industri domestik yang belum kompetitif. Persaingan dengan produk impor, volatilitas harga komoditas, serta ketergantungan terhadap keputusan ekonomi negara maju menjadi tantangan besar yang memengaruhi stabilitas makro dan arah kebijakan ekonomi (Blanchard & Johnson, 2013).

Di sektor tenaga kerja, globalisasi menyebabkan terjadinya restrukturisasi pasar kerja. Pekerjaan padat karya cenderung berpindah ke negara dengan biaya

tenaga kerja lebih rendah, sementara di negara maju terjadi pergeseran ke sektor jasa dan teknologi tinggi. Di sisi lain, digitalisasi global menciptakan peluang baru seperti *freelancing*, *remote working*, dan ekonomi platform. Namun, ini juga menimbulkan tantangan berupa ketimpangan keterampilan, ketidakpastian kerja, dan lemahnya perlindungan sosial bagi pekerja informal (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2014).

Ekonomi digital yang dipicu globalisasi menuntut negara untuk menyesuaikan kebijakan fiskal, pendidikan, dan infrastruktur digital. Pajak digital, regulasi data lintas batas, dan dukungan terhadap UMKM berbasis teknologi menjadi agenda utama dalam kebijakan publik. Negara yang mampu menavigasi era digital dengan regulasi yang adaptif akan lebih siap memanfaatkan peluang pasar global dan memperkuat daya saing domestik.

Dengan demikian, globalisasi menghadirkan peluang dan tekanan sekaligus bagi kebijakan ekonomi domestik. Diperlukan strategi nasional yang tangguh—berbasis inovasi, pendidikan, dan perlindungan sosial—agar negara berkembang tidak hanya menjadi pasar konsumsi global, tetapi juga pemain aktif dalam ekonomi dunia.

2.4 Stabilitas Makroekonomi dan Krisis Ekonomi

2.4.1 Strategi Mitigasi Risiko Makroekonomi

Strategi mitigasi risiko makroekonomi sangat penting bagi negara untuk menjaga stabilitas fiskal,

moneter, dan sistem keuangan di tengah ketidakpastian global. Ketika risiko seperti inflasi tinggi, defisit anggaran, krisis nilai tukar, atau gangguan sektor keuangan muncul, tanggapan yang tepat dari otoritas fiskal dan moneter menjadi penentu ketahanan ekonomi jangka panjang (Mankiw, 2014).

Pengelolaan risiko fiskal mencakup pengendalian defisit anggaran, efisiensi belanja publik, serta perencanaan utang yang berkelanjutan. Pemerintah perlu menyusun anggaran yang realistis dengan skenario stres fiskal, menyeimbangkan belanja pembangunan dan perlindungan sosial, serta menjaga rasio utang terhadap PDB agar tetap dalam batas aman. Sementara itu, risiko moneter dikelola melalui pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar, menggunakan instrumen seperti suku bunga, operasi pasar terbuka, dan penyesuaian cadangan devisa oleh bank sentral (Blanchard & Johnson, 2013).

Regulasi keuangan berperan sebagai benteng pencegah krisis sistemik dan menjaga kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional. Otoritas moneter dan regulator keuangan melakukan pengawasan ketat terhadap perbankan dan pasar modal, menetapkan standar kehati-hatian (*prudential regulation*), serta menerapkan kebijakan makroprudensial. Langkah-langkah ini termasuk pengawasan rasio kecukupan modal, manajemen risiko likuiditas, serta pembentukan cadangan penyangga sistemik (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2014).

Selain itu, penting untuk membangun sistem peringatan dini dan koordinasi kebijakan lintas sektor. Pemerintah, bank sentral, dan lembaga keuangan perlu berbagi informasi dan membuat protokol respons krisis terpadu, seperti langkah penjaminan simpanan, intervensi pasar yang terkoordinasi, atau penyesuaian fiskal otomatis ketika gejolak ekonomi terjadi.

Dengan demikian, strategi mitigasi risiko makroekonomi menggabungkan kehati-hatian fiskal, fleksibilitas moneter, dan kekuatan regulasi keuangan guna membangun fondasi ekonomi yang tangguh dan responsif terhadap guncangan.

2.4.2 Peran Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Menghadapi Krisis Ekonomi

Dalam menghadapi krisis ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter menjadi dua instrumen utama yang digunakan pemerintah dan bank sentral untuk menjaga stabilitas dan mendorong pemulihan. Keduanya memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi, terutama dalam merespons gejolak seperti resesi, depresiasi nilai tukar, dan lonjakan inflasi (Mankiw, 2014).

Kebijakan fiskal memberikan respons terhadap resesi dengan meningkatkan belanja negara dan/atau menurunkan pajak agar konsumsi dan investasi kembali tumbuh. Misalnya, dalam kondisi kontraksi ekonomi akibat pandemi, banyak negara menggelontorkan stimulus fiskal berupa bantuan langsung tunai, subsidi UMKM, serta proyek infrastruktur padat karya untuk

menciptakan lapangan kerja. Tujuan utamanya adalah mendorong permintaan agregat dan mempercepat pemulihan dari siklus penurunan ekonomi (Blanchard & Johnson, 2013).

Sementara itu, kebijakan moneter berperan dalam meredam tekanan inflasi dan menjaga kestabilan nilai tukar. Saat terjadi depresiasi mata uang, bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk menarik arus modal masuk, memperkuat nilai tukar, dan menjaga daya beli. Dalam konteks inflasi tinggi, bank sentral juga menggunakan operasi pasar terbuka dan pengelolaan cadangan devisa untuk mengendalikan jumlah uang beredar agar tekanan harga mereda (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2014).

Kolaborasi keduanya sangat penting dalam menciptakan respons krisis yang efektif dan kredibel. Sebagai contoh, fiskal dapat mempercepat konsumsi masyarakat lewat stimulus langsung, sementara moneter menjaga stabilitas nilai tukar dan menghindari lonjakan inflasi akibat lonjakan permintaan. Ketika tidak terkoordinasi, kebijakan bisa saling menetralkan atau bahkan memperburuk situasi.

Dengan demikian, strategi penanganan krisis yang berhasil bergantung pada kombinasi kebijakan fiskal yang ekspansif dan moneter yang adaptif, dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

2.4.3 Studi Kasus Krisis Ekonomi Global dan Respons Kebijakan

Krisis ekonomi global seperti tahun 2008 dan pandemi COVID-19 menjadi titik balik penting dalam sejarah kebijakan ekonomi internasional, karena menuntut respons kebijakan fiskal dan moneter yang luar biasa besar dan terkoordinasi. Kedua krisis memiliki karakteristik berbeda, namun sama-sama berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi, pasar kerja, dan sistem keuangan dunia (Mankiw, 2014).

Krisis keuangan 2008 dipicu oleh gelembung kredit perumahan di Amerika Serikat, yang ketika meledak, mengguncang lembaga keuangan besar secara global. Keruntuhan Lehman Brothers menjadi simbol rapuhnya sistem keuangan saat itu. Respons kebijakan meliputi bailout perbankan, program quantitative easing oleh bank sentral seperti *Federal Reserve*, dan stimulus fiskal besar-besaran untuk memulihkan permintaan agregat. Negara-negara Eropa kemudian menghadapi krisis utang yang menuntut penghematan fiskal dan reformasi struktural, terutama di Yunani dan Spanyol (Blanchard & Johnson, 2013).

Sementara itu, krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 berbeda karena berasal dari sektor kesehatan yang menghentikan aktivitas ekonomi secara tiba-tiba. Lockdown dan pembatasan mobilitas menyebabkan kontraksi ekonomi global terdalam sejak Perang Dunia II. Respons kebijakan sangat ekspansif: pemerintah

memberikan bantuan langsung tunai, subsidi upah, insentif usaha, sementara bank sentral menurunkan suku bunga hingga mendekati nol dan melakukan pembelian aset dalam skala besar untuk menjaga likuiditas dan kepercayaan pasar (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2014).

Beberapa negara mengombinasikan kebijakan pemulihan dengan reformasi struktural. Misalnya, Selandia Baru mengintegrasikan stimulus hijau untuk transisi energi, Jerman mempercepat digitalisasi UMKM, dan Indonesia menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2020 untuk memperkuat fleksibilitas APBN dan reformasi sektor keuangan. Strategi ini bertujuan tak hanya memulihkan ekonomi, tetapi juga memperkuat daya tahan jangka panjang.

Dengan demikian, krisis ekonomi global menunjukkan pentingnya respons kebijakan yang cepat, kredibel, dan fleksibel, serta perlunya reformasi struktural agar pemulihan ekonomi bersifat inklusif dan berkelanjutan.

2.5 Digitalisasi dan Kebijakan Makroekonomi Modern

2.5.1 Pengaruh *Fintech* dan Digital Banking terhadap Kebijakan Moneter

Perkembangan financial technology (*fintech*) dan perbankan digital telah mengubah lanskap sistem keuangan dan mempengaruhi jalannya kebijakan moneter secara signifikan. Teknologi keuangan

mempercepat arus informasi, meningkatkan inklusi keuangan, serta memperluas akses masyarakat terhadap sistem pembayaran dan layanan keuangan. Namun, inovasi ini juga menimbulkan tantangan baru dalam hal regulasi, transmisi kebijakan moneter, dan stabilitas ekonomi (Mankiw, 2014).

Dalam sistem pembayaran, *fintech* dan digital banking mendorong efisiensi, kecepatan, dan kenyamanan. Aplikasi pembayaran digital, *mobile banking*, dan *e-wallet* memperkecil penggunaan uang tunai, mempercepat perputaran ekonomi, dan menciptakan data transaksi yang lebih akurat. Hal ini memperkuat efektivitas kebijakan moneter karena bank sentral dapat memantau dan merespons aktivitas ekonomi secara lebih presisi. Di sisi lain, disrupsi terhadap sistem perbankan konvensional mendorong bank sentral menyesuaikan kerangka regulasi guna menjaga stabilitas sistem pembayaran nasional (Blanchard & Johnson, 2013).

Mata uang digital, terutama yang diterbitkan oleh bank sentral (*Central Bank Digital Currency/CBDC*), membawa implikasi besar terhadap stabilitas ekonomi dan pelaksanaan kebijakan moneter. CBDC dapat menjadi alat baru untuk menyalurkan stimulus moneter secara langsung kepada publik, meningkatkan transmisi suku bunga, dan mengurangi ketergantungan pada sektor perbankan dalam menjalankan kebijakan. Namun, jika tidak dikelola secara hati-hati, CBDC juga berisiko menggeser simpanan dari bank komersial, memengaruhi

likuiditas, serta mempercepat penarikan dana pada saat krisis (*bank run digital*) (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2014).

Selain itu, kehadiran mata uang kripto yang tidak dikendalikan otoritas moneter juga menjadi perhatian. Volatilitas harganya, potensi digunakan untuk transaksi ilegal, dan dampaknya terhadap arus modal lintas negara menuntut kebijakan yang seimbang antara inovasi dan pengawasan. Banyak negara mulai merancang regulasi agar teknologi *blockchain* dan aset digital bisa berkembang dengan tetap menjaga integritas sistem keuangan.

Dengan demikian, *fintech* dan digital banking membawa potensi besar dalam memperkuat efektivitas kebijakan moneter, namun juga memerlukan reformasi regulasi dan pendekatan adaptif dari bank sentral. Kolaborasi antara inovator keuangan dan regulator menjadi kunci untuk memastikan inovasi ini mendukung stabilitas dan inklusi ekonomi nasional.

2.5.2 Peran Digitalisasi dalam Pengelolaan Fiskal dan Sistem Pajak

Digitalisasi memainkan peran penting dalam modernisasi sistem fiskal dan perpajakan, khususnya dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan optimalisasi penerimaan negara. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah dapat mengotomatiskan proses administrasi perpajakan, memperluas basis pajak,

serta meminimalkan kebocoran dan manipulasi data fiskal (Mankiw, 2014).

Reformasi pajak berbasis digital mencakup penerapan sistem pelaporan elektronik (*e-filing*), pembayaran online (*e-billing*), dan pelacakan transaksi berbasis big data. Teknologi ini mempercepat proses penetapan dan pelunasan pajak, mengurangi biaya administratif, serta memberikan akses real-time terhadap data keuangan wajib pajak. Beberapa negara, termasuk Indonesia, telah mengembangkan sistem pajak digital yang terintegrasi dengan laporan keuangan dan transaksi perbankan, yang secara signifikan meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pendapatan negara (www.pajak.go.id, 2025).

Di sisi lain, tantangan digitalisasi fiskal meliputi kesenjangan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital, serta kekhawatiran privasi dan keamanan data. Implementasi sistem digital membutuhkan investasi besar dalam perangkat lunak, pelatihan pegawai, dan integrasi lintas sektor. Tanpa infrastruktur yang andal dan sistem pengawasan yang kuat, risiko kebocoran data atau akses tidak sah dapat mengganggu kepercayaan publik.

Namun, peluang digitalisasi sangat besar untuk menciptakan sistem pajak yang lebih progresif, inklusif, dan berbasis data. Dengan menganalisis data dari transaksi elektronik, konsumsi digital, dan platform daring, otoritas pajak dapat merancang kebijakan perpajakan yang lebih akurat dan adaptif terhadap

ekonomi digital. Selain itu, teknologi juga memudahkan pengawasan atas sektor informal dan transaksi lintas negara melalui kerja sama data internasional.

Dengan demikian, digitalisasi fiskal bukan hanya alat administratif, tetapi juga strategi transformasi kelembagaan yang memperkuat kapasitas negara dalam mewujudkan keadilan dan keberlanjutan fiskal.

2.5.3 Kebijakan Ekonomi dalam Menghadapi Revolusi Digital

Revolusi digital telah mendorong transformasi struktural dalam perekonomian global, yang menuntut adaptasi dan strategi kebijakan ekonomi yang progresif dari pemerintah. Perubahan ini meliputi digitalisasi industri, otomatisasi tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi platform, serta pergeseran nilai tambah ke sektor teknologi. Negara yang mampu menavigasi dinamika ini secara adaptif akan memperoleh keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (TechIT, 2025).

Strategi pemerintah dalam menghadapi perubahan struktural akibat revolusi digital mencakup beberapa pendekatan utama. Pertama, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur digital—seperti jaringan internet cepat, pusat data nasional, dan keamanan siber—agar seluruh wilayah bisa terhubung dalam ekonomi digital. Kedua, regulasi harus diperbarui agar sejalan dengan ekonomi platform, perlindungan data, dan ekosistem e-commerce. Ketiga, pendidikan dan pelatihan kerja harus direformasi untuk menciptakan SDM digital

yang kompeten, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan pasar kerja (Blanchard & Johnson, 2013).

Kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi menjadi motor utama produktivitas dan inovasi dalam ekonomi digital. AI digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis, optimalisasi rantai pasok, layanan publik, hingga transformasi sektor keuangan. Sementara otomatisasi mendisrupsi pekerjaan rutin dan menciptakan peluang baru di bidang analitik, pengembangan perangkat lunak, dan ekonomi berbasis data. Pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan ekonomi dengan mendorong investasi di sektor berbasis teknologi tinggi, insentif R&D, serta perlindungan terhadap pekerja terdampak melalui program reskilling dan jaring pengaman sosial (edge.id. 2025).

Kebijakan fiskal dan moneter juga perlu mengakomodasi struktur ekonomi baru. Penerapan pajak digital, pengelolaan dampak terhadap sektor informal, dan perluasan basis pajak melalui transaksi digital menjadi agenda penting. Di sisi moneter, bank sentral ditantang untuk mengadaptasi instrumen kebijakan terhadap aliran modal digital, mata uang kripto, dan perubahan pola konsumsi.

Dengan demikian, pemerintah perlu menjalankan kebijakan ekonomi yang inovatif, antisipatif, dan inklusif dalam era revolusi digital. Ini berarti bukan hanya mendorong adopsi teknologi, tetapi juga membangun fondasi sosial, regulasi, dan institusional yang

memastikan manfaat digitalisasi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 2.3. Digitalisasi dan Kebijakan Makroekonomi Modern

Subtopik	Strategi Utama	Contoh Implementasi	Hasil yang Diharapkan
<i>Fintech & Digital Banking</i> dalam Kebijakan Moneter	<ul style="list-style-type: none"> • Adopsi sistem pembayaran digital • Pengembangan CBDC • Regulasi kripto 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>E-wallet & mobile banking</i> • Uji coba CBDC oleh bank sentral • Aturan aset kripto 	Efisiensi transaksi, transmisi moneter lebih presisi, stabilitas sistem keuangan
Digitalisasi Fiskal & Sistem Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • <i>E-filing & e-billing</i> • Integrasi big data fiscal • Pengawasan digital 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem pajak digital terintegrasi • Analisis konsumsi digital • Pajak e-commerce 	Transparansi fiskal, peningkatan kepatuhan pajak, optimalisasi penerimaan negara
Kebijakan Ekonomi dalam Revolusi Digital	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan infrastruktur digital • Reformasi regulasi • Reskilling tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Internet cepat & pusat data • Insentif R&D • Program pelatihan AI & data science 	Daya saing ekonomi digital, adaptasi pasar tenaga kerja, pertumbuhan inklusif dan inovatif

2.6 Tantangan dan Masa Depan Kebijakan Makroekonomi

2.6.1 Integrasi Kebijakan Ekonomi dalam Era Globalisasi

Integrasi kebijakan ekonomi dalam era globalisasi menjadi kebutuhan mendesak bagi setiap negara yang ingin tetap kompetitif dan stabil dalam menghadapi dinamika pasar internasional. Globalisasi telah menciptakan keterkaitan antarnegara melalui perdagangan, investasi, mobilitas tenaga kerja, dan aliran informasi yang semakin cepat. Hal ini menuntut kebijakan ekonomi yang adaptif, responsif, dan terkoordinasi secara global (Mankiw, 2014).

Salah satu bentuk adaptasi utama adalah penyesuaian kebijakan fiskal dan moneter terhadap tekanan eksternal. Misalnya, ketika terjadi gejolak harga komoditas global atau pelemahan permintaan di negara mitra dagang, pemerintah perlu menyesuaikan anggaran, memperkuat daya beli domestik, serta menjaga stabilitas nilai tukar melalui kebijakan moneter yang hati-hati. Blanchard & Johnson (2013) menyatakan bahwa negara yang memiliki ruang fiskal dan kerangka moneter yang fleksibel lebih mampu menyerap guncangan global.

Selain itu, integrasi ekonomi global mendorong reformasi struktural di berbagai sektor. Negara perlu menyesuaikan regulasi investasi, perizinan usaha, serta perlindungan kekayaan intelektual agar dapat menarik investor asing dan terhubung dengan rantai nilai global.

Liberalisasi sektor tertentu—seperti keuangan, telekomunikasi, dan logistik—sering kali dilakukan untuk memperkuat daya saing ekspor dan efisiensi produksi.

Kebijakan perdagangan juga harus dirancang untuk memaksimalkan manfaat dari keterbukaan ekonomi. Perjanjian dagang regional dan multilateral, seperti RCEP atau *ASEAN Free Trade Area*, membuka akses pasar yang lebih luas, namun sekaligus menuntut harmonisasi standar dan regulasi domestik. Negara-negara yang sukses adalah yang mampu menyesuaikan kebijakan industri dan memperkuat pelaku usaha lokal agar mampu bersaing dalam pasar bebas.

Dengan demikian, integrasi kebijakan ekonomi dalam era globalisasi bukan hanya soal keterbukaan, tetapi juga soal kesiapan kelembagaan, struktur industri, dan ketangguhan sistem ekonomi nasional. Sinergi antara kebijakan domestik dan dinamika global akan menentukan seberapa besar suatu negara dapat memanfaatkan peluang globalisasi tanpa terjebak pada risiko ketergantungan atau kerentanan eksternal.

2.6.2 Keberlanjutan dan Ekonomi Hijau dalam Kebijakan Makroekonomi

Keberlanjutan dan ekonomi hijau kini menjadi komponen kunci dalam perumusan kebijakan makroekonomi, seiring meningkatnya urgensi krisis iklim dan degradasi lingkungan. Dalam kerangka ini, kebijakan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan

Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga memperhitungkan keberlanjutan sosial, ekologi, dan generasi masa depan.

Penerapan kebijakan ekonomi berkelanjutan bertujuan untuk mengurangi emisi karbon, mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, serta memperkuat ketahanan ekonomi terhadap bencana iklim. Strateginya mencakup reformasi subsidi energi fosil, pajak karbon, pengembangan energi terbarukan, serta integrasi prinsip lingkungan dalam anggaran dan kebijakan fiskal. Pendekatan ini membantu menekan eksternalitas negatif dan menciptakan insentif bagi perilaku ekonomi yang ramah lingkungan (Blanchard & Johnson, 2013).

Investasi hijau memiliki peran vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi ini diarahkan pada sektor seperti energi bersih, transportasi ramah lingkungan, pertanian berkelanjutan, serta infrastruktur tahan iklim. Pemerintah dapat mendorongnya melalui insentif pajak hijau, penerbitan green bonds, dan pendanaan riset teknologi bersih. Investasi hijau tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2014).

Selain dampak lingkungan, ekonomi hijau juga memperkuat stabilitas makro dengan mengurangi ketergantungan terhadap energi impor dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Negara-negara yang mengadopsi kebijakan hijau secara konsisten juga

cenderung meningkatkan daya saing jangka panjang, menarik investasi asing berkelanjutan, dan membangun reputasi global dalam kepemimpinan iklim.

Dengan demikian, penggabungan prinsip keberlanjutan dalam kebijakan makroekonomi tidak hanya merupakan tanggung jawab moral, tetapi juga merupakan strategi ekonomi yang cerdas. Melalui regulasi yang tepat dan dukungan fiskal, negara dapat mewujudkan pertumbuhan yang inklusif, tangguh, dan selaras dengan kelestarian bumi.

2.6.3 Prediksi Tren Kebijakan Makroekonomi di Masa Depan

Kebijakan makroekonomi di masa depan diperkirakan akan mengalami transformasi signifikan seiring dengan kompleksitas tantangan global, seperti digitalisasi, perubahan iklim, serta pergeseran geopolitik dan demografi. Pemerintah dan bank sentral dituntut untuk merancang kebijakan yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap dinamika ekonomi dunia yang semakin cepat dan tidak terduga (Mankiw, 2014).

Dari sisi fiskal, tren menunjukkan pergeseran menuju kebijakan yang lebih proaktif dan berbasis keberlanjutan. Belanja publik akan semakin diarahkan untuk mendanai transisi energi bersih, pendidikan digital, dan infrastruktur tangguh iklim. Pajak karbon, pajak digital, serta reformasi subsidi energi akan menjadi instrumen utama dalam menciptakan kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan hijau dan adil. Di sisi lain,

tekanan utang publik menuntut penguatan efisiensi dan transparansi anggaran (Blanchard & Johnson, 2013).

Kebijakan moneter juga diprediksi akan berevolusi seiring pergeseran sistem keuangan global dan digitalisasi mata uang. Bank sentral menghadapi tantangan baru dalam menjaga stabilitas moneter di tengah munculnya mata uang digital, aset kripto, dan ekonomi tanpa uang tunai. *Central Bank Digital Currency* (CBDC) akan menjadi alat strategis untuk meningkatkan inklusi keuangan, mempercepat transmisi kebijakan suku bunga, serta melindungi kedaulatan moneter dari disrupti teknologi (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2014).

Tantangan utama ke depan termasuk meningkatnya risiko global yang bersifat sistemik dan multidimensi. Digitalisasi membawa ketimpangan keterampilan dan risiko pengangguran struktural, sementara perubahan iklim meningkatkan frekuensi bencana yang mengganggu aktivitas ekonomi. Kebijakan makro harus bersifat interdisipliner—menggabungkan stabilitas fiskal, adaptasi teknologi, perlindungan sosial, dan mitigasi iklim sebagai satu kesatuan.

Dengan demikian, tren masa depan kebijakan makroekonomi mengarah pada pendekatan yang lebih holistik dan berorientasi jangka panjang, di mana inovasi, inklusivitas, dan keberlanjutan menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan dan keseimbangan ekonomi nasional di tengah dunia yang terus berubah

BAB 3.

EKONOMI DIGITAL DAN MAKROEKONOMI

Learning Objectives:

1. Memahami transformasi digital dalam sistem ekonomi, serta bagaimana peralihan dari industri tradisional ke ekonomi berbasis teknologi memengaruhi produktivitas dan efisiensi.
2. Menilai dampak *fintech* dan digital banking terhadap kebijakan moneter.
3. Menganalisis peran digitalisasi dalam pertumbuhan ekonomi.
4. Mengevaluasi regulasi digital dalam menghadapi tantangan globalisasi serta mencegah disrupsi ekonomi akibat perkembangan teknologi.
5. Menjelaskan bagaimana kebijakan ekonomi dapat beradaptasi dengan revolusi digital, termasuk strategi pemerintah dan bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi di era digital.

Transformasi digital telah mengubah lanskap ekonomi global secara fundamental. Kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, big data, dan otomatisasi telah memengaruhi cara bisnis beroperasi, transaksi keuangan dilakukan, serta kebijakan ekonomi dirancang. *Fintech* dan digital banking telah meningkatkan inklusi keuangan, sementara kebijakan moneter perlu beradaptasi dengan perubahan sistem pembayaran digital.

Digitalisasi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi, menciptakan ekosistem ekonomi berbasis platform, dan memperluas peluang investasi serta persaingan pasar. Namun, tantangan seperti regulasi teknologi, keamanan data, dan kesenjangan akses digital tetap menjadi isu yang perlu dikelola. Bab ini akan mengulas dampak digitalisasi terhadap kebijakan makroekonomi serta bagaimana regulasi berperan dalam menjaga keseimbangan ekonomi digital.

3.1 Transformasi Digital dalam Sistem Ekonomi

3.1.1 Evolusi Ekonomi dari Industri Tradisional ke Ekonomi Berbasis Digital

Evolusi ekonomi global dari industri tradisional menuju ekonomi berbasis digital merupakan pergeseran struktural yang mendalam dan berdampak luas terhadap model bisnis, struktur pasar tenaga kerja, hingga peran pemerintah dalam pembangunan. Jika pada abad ke-20 dominasi ekonomi ditentukan oleh sektor manufaktur, energi, dan agrikultur berbasis tenaga kerja, maka abad

ke-21 menyaksikan kebangkitan ekonomi berbasis teknologi informasi, *platform digital*, dan data sebagai aset strategis utama (Mankiw, 2014).

Transformasi ini terlihat nyata dalam disrupsi model bisnis tradisional. Netflix, misalnya, menggantikan model penyewaan DVD fisik dengan layanan streaming berbasis langganan yang mengandalkan algoritma rekomendasi dan kecerdasan buatan. Amazon mendisrupsi ritel konvensional melalui ekosistem e-commerce yang menghubungkan produsen langsung ke konsumen, dengan efisiensi logistik dan manajemen data yang sangat tinggi. Di sektor manufaktur, implementasi *Industrie 4.0* di Jerman menunjukkan bagaimana otomatisasi, robotika, dan *Internet of Things* (IoT) telah mengubah pabrik menjadi sistem produksi cerdas yang sangat terintegrasi (Blanchard & Johnson, 2013).

Dampaknya terhadap struktur ekonomi sangat signifikan. Data dari *World Bank* (2024) menunjukkan bahwa 50% dari total PDB global kini berasal dari sektor berbasis digital dan teknologi informasi. McKinsey (2023) juga melaporkan bahwa lebih dari 80% perusahaan global telah mengintegrasikan otomatisasi ke dalam operasi bisnis mereka, mempercepat efisiensi namun juga menimbulkan tantangan ketenagakerjaan seperti pengurangan peran manusia dalam proses rutin dan mekanis.

Perubahan ini menuntut adaptasi dari sisi kebijakan publik. Pemerintah perlu merumuskan strategi digital nasional melalui investasi besar dalam infrastruktur TIK,

penyusunan regulasi yang mendukung inovasi, dan perlindungan data yang seimbang. Selain itu, peningkatan literasi digital serta *upskilling* tenaga kerja menjadi krusial agar masyarakat tidak terpinggirkan oleh arus teknologi. Tanpa intervensi aktif, kesenjangan digital dapat memperbesar ketimpangan dan menghambat pertumbuhan inklusif (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2014).

Dengan demikian, ekonomi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat, dunia usaha, dan negara membangun sistem baru yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan. Strategi transformasi yang berhasil adalah yang mampu memadukan inovasi teknologi dengan nilai-nilai sosial ekonomi yang inklusif dan tangguh terhadap perubahan zaman.

3.1.2 Digitalisasi Sektor Bisnis dan Dampaknya terhadap Produktivitas

Digitalisasi sektor bisnis telah menjadi pendorong utama peningkatan produktivitas global melalui transformasi mendasar dalam proses produksi, distribusi, dan pengambilan keputusan. Integrasi teknologi digital—seperti *Internet of Things* (IoT), big data, kecerdasan buatan (AI), dan cloud computing—telah mengubah cara bisnis beroperasi, tidak hanya pada perusahaan besar tetapi juga pada pelaku UMKM yang mulai memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing (Mankiw, 2014).

Dalam proses produksi dan distribusi, adopsi digital membawa efisiensi signifikan melalui otomatisasi, pelacakan real-time, dan prediksi permintaan. Teknologi seperti robot industri dan sistem manufaktur terintegrasi memungkinkan waktu produksi yang lebih singkat, pengurangan limbah, serta perencanaan rantai pasok yang lebih cerdas dan adaptif. Sistem distribusi juga menjadi lebih responsif dan hemat biaya dengan bantuan algoritma logistik dan sistem informasi yang saling terhubung (Blanchard & Johnson, 2013).

Studi kasus global memperlihatkan transformasi nyata yang disebabkan oleh digitalisasi. Tesla, misalnya, memanfaatkan AI, big data, dan automasi tingkat tinggi untuk mengoptimalkan proses manufaktur kendaraan listrik, memungkinkan personalisasi produksi skala besar dengan efisiensi tinggi. Di Asia Tenggara, startup digital seperti Tokopedia dan Shopee mengubah lanskap perdagangan konvensional dengan menciptakan ekosistem e-commerce yang memfasilitasi jutaan transaksi harian, memberdayakan penjual kecil, dan memperluas akses pasar ke pelosok wilayah (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2014).

Data empiris dari Deloitte (2023) menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional hingga 35% dan mengurangi biaya produksi hingga 20%. Angka ini menegaskan potensi besar teknologi dalam mendongkrak produktivitas bisnis secara menyeluruh, termasuk melalui pengurangan kesalahan manusia, percepatan proses pengambilan

keputusan, dan peningkatan pengalaman pelanggan secara daring.

Dari perspektif kebijakan, pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung adopsi teknologi secara merata. Ini mencakup penyediaan insentif adopsi teknologi untuk UMKM, investasi dalam infrastruktur digital (seperti jaringan internet berkecepatan tinggi), serta program literasi dan pelatihan digital untuk tenaga kerja. Kebijakan inovasi yang adaptif akan membantu memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi bisnis, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan.

3.1.3 Big Data, Artificial Intelligence, dan Otomatisasi dalam Kebijakan Ekonomi

Pemanfaatan big data, kecerdasan buatan (AI), dan otomatisasi telah membawa dimensi baru dalam perumusan kebijakan ekonomi yang lebih cepat, akurat, dan adaptif. Melalui analisis data skala besar, pembuat kebijakan kini dapat memahami perilaku pasar secara real-time, memantau dinamika konsumsi dan investasi, serta merespons lebih tepat terhadap gejolak ekonomi jangka pendek dan tren jangka panjang (Mankiw, 2014).

Big data memungkinkan pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang lebih mendalam dan prediktif. Misalnya, di Singapura, pemerintah memanfaatkan data transaksi digital,

pergerakan logistik, dan pola konsumsi masyarakat untuk merancang kebijakan fiskal yang lebih presisi, termasuk insentif pajak berbasis sektor dan pelacakan dampak subsidi secara langsung. Data real-time juga digunakan dalam perumusan kebijakan transportasi, tenaga kerja, dan pelatihan keterampilan (Blanchard & Johnson, 2013).

AI memperkuat kapasitas prediksi tren ekonomi makro maupun mikro. Dalam perbankan, teknologi ini telah digunakan secara luas untuk melakukan analisis risiko kredit, mendeteksi fraud dalam transaksi keuangan, hingga melakukan segmentasi nasabah secara otomatis. Di ranah kebijakan makro, bank sentral seperti *Federal Reserve* mulai mengeksplorasi penggunaan AI untuk memproyeksikan tekanan inflasi, fluktuasi nilai tukar, dan dampak suku bunga terhadap sektor riil. Peran AI mempercepat simulasi skenario ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada model-model ekonomi statis (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2014).

Data empiris dari PwC (2023) memproyeksikan bahwa pasar AI global akan mencapai USD 15,7 triliun pada 2030, mencerminkan pentingnya integrasi teknologi dalam seluruh aspek ekonomi. Namun, potensi ini juga disertai risiko—seperti bias algoritmik, pelanggaran privasi, dan pengambilan kebijakan otomatis yang tidak transparan. Oleh karena itu, regulasi yang menjamin penggunaan AI secara etis dan akuntabel sangat dibutuhkan, terutama dalam kebijakan yang berdampak luas seperti fiskal dan moneter.

Tabel 3.1. Transformasi Digital dalam Sistem Ekonomi

Aspek Utama	Mekanisme	Contoh Implementasi	Dampak yang Diharapkan
Evolusi dari Industri Tradisional ke Ekonomi Digital	<ul style="list-style-type: none"> • Peralihan dari sektor fisik ke <i>platform digital</i> dan ekonomi berbasis data • Disrupsi model bisnis konvensional 	<ul style="list-style-type: none"> • Netflix (streaming), Amazon (e-commerce), Industrie 4.0 (Jerman) 	Efisiensi tinggi, akses pasar global, perubahan struktur tenaga kerja
Digitalisasi Sektor Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi teknologi digital dalam produksi, distribusi, dan pengambilan keputusan • Otomatisasi dan analitik data 	<ul style="list-style-type: none"> • Tesla (AI & manufaktur), Tokopedia & Shopee (e-commerce UMKM) 	Produktivitas meningkat, pengurangan biaya, pemberdayaan UMKM
Big Data, AI, dan Otomatisasi dalam Kebijakan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan data real-time untuk perumusan kebijakan • Simulasi ekonomi berbasis AI • Otomatisasi proses fiskal 	<ul style="list-style-type: none"> • Singapura (kebijakan fiskal berbasis data), <i>Federal Reserve</i> (AI untuk proyeksi inflasi) 	Kebijakan lebih presisi, responsif, dan berbasis bukti; risiko privasi dan bias algoritmik

Dengan demikian, integrasi big data dan AI dalam kebijakan ekonomi membuka jalan bagi tata kelola yang lebih responsif dan berbasis bukti, tetapi perlu dibarengi dengan perangkat hukum dan kelembagaan yang menjaga transparansi, keamanan data, dan keadilan sosial.

3.2 Dampak *Fintech* dan Digital Banking terhadap Kebijakan Moneter

3.2.1 Peran *Fintech* dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan

Fintech (financial technology) telah menjadi katalis penting dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan konvensional (*unbanked*). Dengan memanfaatkan teknologi digital—termasuk aplikasi ponsel, sistem pembayaran elektronik, dan layanan keuangan berbasis internet—*fintech* menghadirkan solusi cepat, murah, dan inklusif untuk kebutuhan transaksi, pinjaman, tabungan, dan investasi (Mankiw, 2014).

Model bisnis *fintech* sangat adaptif dan berorientasi pada pengguna. *Fintech* tidak bergantung pada jaringan kantor fisik seperti bank tradisional, melainkan mengandalkan *platform digital* yang bisa diakses melalui gawai sederhana. Hal ini memungkinkan penetrasi ke wilayah pedesaan dan populasi marginal, yang sebelumnya kesulitan mengakses perbankan karena

keterbatasan infrastruktur atau syarat administratif (Blanchard & Johnson, 2013).

Studi kasus seperti M-Pesa di Kenya menunjukkan dampak transformasional *fintech*. Layanan ini memungkinkan pengguna melakukan transfer uang, pembayaran tagihan, dan pembelian dengan menggunakan ponsel sederhana tanpa perlu rekening bank. Di Indonesia, ekspansi dompet digital seperti GoPay dan Dana telah meningkatkan inklusi keuangan secara signifikan, terutama di kalangan pekerja informal dan UMKM yang kini dapat menerima dan mengelola transaksi secara digital (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2014).

Data dari *World Economic Forum* (2023) mencatat bahwa *fintech* telah meningkatkan tingkat inklusi keuangan hingga 40% di negara-negara berkembang. Angka ini menunjukkan pentingnya inovasi digital dalam mengatasi kesenjangan finansial dan memberdayakan kelompok masyarakat rentan. Namun, pertumbuhan pesat ini juga membawa tantangan baru dalam hal keamanan data, perlindungan konsumen, dan risiko sistemik.

Karena itu, regulasi yang adaptif dan proaktif menjadi kunci agar *fintech* berkembang secara sehat. Pemerintah perlu merancang kerangka hukum yang menjamin keamanan transaksi digital, transparansi algoritma keuangan, dan perlindungan pengguna dari praktik penyalahgunaan. Sinergi antara regulator, pelaku industri, dan pengguna akan menentukan apakah *fintech*

dapat terus menjadi kekuatan inklusif bagi ekonomi masa depan.

3.2.2 Dampak Digital Banking terhadap Stabilitas Sistem Keuangan

Perkembangan digital banking telah merevolusi sistem keuangan global, menciptakan peluang inklusi dan efisiensi sekaligus menghadirkan tantangan terhadap stabilitas keuangan. Pergeseran dari interaksi fisik ke layanan keuangan berbasis aplikasi dan daring telah mengubah pola konsumsi finansial masyarakat, cara bank mengelola risiko, dan lanskap kompetisi antar lembaga keuangan (Mankiw, 2014).

Pola transaksi perbankan bergeser drastis dari cabang ke kanal digital, baik untuk layanan dasar seperti transfer dan pembayaran, maupun layanan kompleks seperti pengajuan pinjaman atau investasi. Teknologi memungkinkan proses otomatisasi KYC (Know Your Customer), deteksi fraud berbasis AI, dan analisis kredit secara *real-time*. Namun, perubahan ini juga memperbesar risiko siber, ketergantungan pada sistem TI, dan memunculkan tantangan baru dalam menjaga likuiditas dan stabilitas operasional saat terjadi lonjakan aktivitas atau gangguan sistemik (Blanchard & Johnson, 2013).

Studi kasus seperti N26 dan Revolut menunjukkan disrupti nyata terhadap model perbankan tradisional. Bank digital ini tidak memiliki kantor cabang fisik, namun menawarkan layanan lengkap dengan biaya rendah dan

personalisasi tinggi. Akibatnya, terjadi disintermediasi—di mana bank konvensional kehilangan pangsa pasar dalam tabungan, pembayaran, dan pinjaman kepada entitas digital yang lebih lincah. Jika bank-bank besar kehilangan basis dana murah, maka stabilitas dan daya saing mereka bisa terancam, terutama bila diiringi penurunan profitabilitas dan fragmentasi pasar (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2014).

McKinsey (2024) mencatat peningkatan 250% dalam volume transaksi digital banking global dalam lima tahun terakhir, menandakan akselerasi transformasi sistem keuangan digital. Namun, tren ini mengharuskan penyesuaian dalam kerangka regulasi, termasuk pengawasan terhadap sistem keamanan data, ketahanan infrastruktur digital, dan manajemen risiko sistemik terhadap pelaku non-bank yang kini memainkan peran kunci dalam sistem pembayaran.

Dengan demikian, peran bank sentral dan otoritas keuangan menjadi semakin penting dalam memastikan stabilitas di era digital. Ini termasuk penyusunan standar keamanan teknologi, pengawasan terpadu terhadap ekosistem keuangan digital, dan mekanisme resolusi krisis yang adaptif terhadap realitas non-fisik. Kolaborasi internasional, seperti yang difasilitasi oleh BIS dan FSB, juga menjadi krusial dalam menghadapi risiko lintas batas yang timbul dari digitalisasi perbankan.

3.2.3 Adaptasi Kebijakan Moneter dalam Menghadapi Digitalisasi Transaksi

Digitalisasi sistem transaksi keuangan menciptakan tantangan baru bagi bank sentral dalam menjalankan kebijakan moneter yang efektif dan stabil. Ketika uang tunai digantikan oleh instrumen digital dan sistem pembayaran menjadi terdesentralisasi, kontrol terhadap likuiditas, kecepatan sirkulasi uang, dan transmisi kebijakan suku bunga menjadi lebih kompleks (Mankiw, 2014).

Bank sentral menghadapi kesulitan dalam mengendalikan inflasi dan likuiditas di tengah dominasi *fintech*, e-money, dan aset digital yang tidak selalu melalui kanal moneter formal. Transaksi digital yang masif dan lintas platform menciptakan potensi lonjakan permintaan uang yang tidak tercermin dalam data konvensional. Selain itu, inovasi seperti stablecoin dan mata uang kripto swasta dapat mengganggu efektivitas instrumen moneter tradisional, seperti pengaturan suku bunga dan operasi pasar terbuka (Blanchard & Johnson, 2013).

Sebagai respons strategis, banyak bank sentral mengembangkan *Central Bank Digital Currency* (CBDC). Studi kasus di China menunjukkan bagaimana digital Yuan diuji coba untuk transaksi ritel, dengan kemampuan pelacakan tinggi yang mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter secara langsung ke konsumen. Sementara itu, Bank Sentral Eropa menyesuaikan

kebijakan suku bunga dengan mempertimbangkan data transaksi digital yang real-time, guna menjaga kredibilitas moneter di tengah ekosistem yang semakin digital (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2014).

Data dari IMF (2024) mengonfirmasi bahwa lebih dari 70 negara sedang mengembangkan proyek CBDC sebagai respons atas tren digitalisasi keuangan global. Hal ini mencerminkan pengakuan bahwa kontrol moneter perlu berevolusi seiring dengan perubahan infrastruktur pembayaran dan gaya konsumsi masyarakat modern.

Dengan demikian, adaptasi kebijakan moneter membutuhkan pendekatan baru yang mengintegrasikan teknologi, regulasi, dan inklusi keuangan secara harmonis. Bank sentral harus merancang kerangka regulasi untuk CBDC dan aset digital lainnya, sambil memastikan perlindungan konsumen dan stabilitas sistemik. Tanpa strategi yang tepat, digitalisasi justru bisa mengaburkan sinyal moneter dan memperlemah efektivitas kebijakan makro.

3.3 Peran Digitalisasi dalam Pertumbuhan Ekonomi

3.3.1 Kontribusi Sektor Digital terhadap PDB dan Lapangan Kerja

Sektor digital kini menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi global dan penciptaan lapangan kerja, terutama di tengah transformasi menuju masyarakat berbasis teknologi. Digitalisasi telah

mengubah cara nilai ekonomi diciptakan—dari sektor fisik ke *platform digital*, data, dan inovasi teknologi (Mankiw, 2014).

Kontribusi ekonomi digital terhadap PDB terus meningkat secara signifikan. Data *World Bank* (2024) menunjukkan bahwa ekonomi digital menyumbang sekitar USD 3,6 triliun terhadap PDB global, mencerminkan potensi besar sektor ini dalam memperkuat produktivitas dan memperluas basis ekonomi. Aktivitas seperti e-commerce, layanan digital kreatif, *fintech*, dan pengembangan aplikasi kini mendominasi nilai tambah ekonomi, terutama di negara-negara berkembang yang memanfaatkan peluang konektivitas dan penetrasi internet.

Studi kasus dari India menampilkan pertumbuhan ekonomi digital yang sangat dinamis. Inisiatif Digital India berhasil mendorong ekspansi perusahaan teknologi lokal dan global yang menciptakan jutaan lapangan kerja—terutama di sektor TI, analisis data, dan pengembangan perangkat lunak. Pusat teknologi seperti Bangalore menjadi ekosistem startup yang menghasilkan solusi digital untuk pasar lokal dan global, sekaligus menciptakan kelas menengah digital baru.

Di Indonesia, kebijakan digitalisasi ekonomi diarahkan pada pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif melalui program seperti Gerakan Bangga Buatan Indonesia, 100 Smart City, dan dukungan terhadap *platform digital* lokal. Inisiatif ini telah memperluas peluang wirausaha digital dan memperkuat ekonomi

inklusif, terbukti meningkatkan adaptabilitas UMKM terhadap krisis seperti COVID-19. Namun, tantangan struktural tetap ada, terutama dalam kesiapan SDM. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital, pendidikan teknologi, dan pelatihan keterampilan baru menjadi krusial untuk mencegah kesenjangan digital. Ekonomi digital bukan hanya sektor baru, melainkan platform transformasi ekonomi nasional dan global, di mana negara yang mampu menciptakan talenta digital dan mendorong adopsi teknologi secara inklusif akan lebih kompetitif dan tangguh menghadapi masa depan..

3.3.2 Ekonomi Platform dan Pengaruhnya terhadap Persaingan Pasar

Ekonomi platform—yakni model bisnis yang menghubungkan penyedia dan pengguna melalui aplikasi digital—telah merevolusi struktur pasar global dan menciptakan ekosistem ekonomi baru yang sangat bergantung pada kekuatan jaringan dan data. Dominasi perusahaan berbasis platform seperti Amazon, Alibaba, dan Shopee menunjukkan bagaimana skala, kecepatan, dan inovasi digital mampu menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit disaingi oleh model konvensional (Mankiw, 2014).

Dinamika pasar digital ditandai oleh konsentrasi kekuatan ekonomi pada segelintir pemain besar yang menguasai berbagai sektor melalui model “winner takes most.” Misalnya, Amazon mengontrol logistik ritel global dan infrastruktur cloud, Alibaba memimpin dalam

pembayaran digital dan e-commerce di Asia, sementara Shopee menjangkau pasar konsumen besar di Asia Tenggara. OECD (2023) mencatat bahwa sekitar 70% transaksi global kini terjadi melalui *platform digital*, yang mengindikasikan relasi ekonomi semakin dimediasi oleh algoritma dan aturan yang ditentukan oleh platform.

Namun, konsentrasi ini menimbulkan kekhawatiran akan praktik monopoli dan dominasi pasar. Studi kasus terhadap Google dan Facebook menunjukkan bagaimana perusahaan platform dapat menggunakan data konsumen, algoritma, dan integrasi vertikal untuk mempertahankan dominasi pasar dan menghambat inovasi pesaing. Tindakan antitrust di Eropa dan Amerika Serikat menunjukkan adanya dorongan kebijakan untuk menyeimbangkan kekuatan pasar dan melindungi ruang kompetisi yang sehat (Blanchard & Johnson, 2013).

Keberlanjutan ekonomi berbasis platform juga tergantung pada bagaimana ekosistem tersebut mendukung pelaku kecil seperti UMKM. Tanpa intervensi kebijakan, pelaku lokal cenderung menjadi sekadar "penumpang" dalam ekosistem yang dikendalikan oleh platform besar. Oleh karena itu, regulasi persaingan yang adil dan berbasis inklusivitas sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku kecil tetap punya ruang tumbuh, misalnya melalui transparansi algoritma pencarian, larangan diskriminasi harga, dan akses data yang adil (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2014).

Dengan demikian, ekonomi platform membuka peluang besar, tetapi juga membutuhkan regulasi yang

dinamis dan berorientasi pada persaingan sehat. Pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan persaingan dengan perkembangan teknologi agar pasar digital tetap inovatif, adil, dan mendukung keberlanjutan ekonomi yang inklusif.

3.3.3 Regulasi Digital dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi

Ekonomi platform—yakni model bisnis yang menghubungkan penyedia dan pengguna melalui aplikasi digital—telah merevolusi struktur pasar global dan menciptakan ekosistem ekonomi baru yang sangat bergantung pada kekuatan jaringan dan data. Dominasi perusahaan berbasis platform seperti Amazon, Alibaba, dan Shopee menunjukkan bagaimana skala, kecepatan, dan inovasi digital mampu menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit disaingi oleh model konvensional (Mankiw, 2014).

Dinamika pasar digital ditandai oleh konsentrasi kekuatan ekonomi pada segelintir pemain besar yang menguasai berbagai sektor melalui model “winner takes most.” Misalnya, Amazon mengontrol logistik ritel global dan infrastruktur cloud, Alibaba memimpin dalam pembayaran digital dan e-commerce di Asia, sementara Shopee menjangkau pasar konsumen besar di Asia Tenggara. OECD (2023) mencatat bahwa sekitar 70% transaksi global kini terjadi melalui *platform digital*, yang mengindikasikan relasi ekonomi semakin dimediasi oleh algoritma dan aturan yang ditentukan oleh platform.

Namun, konsentrasi ini menimbulkan kekhawatiran akan praktik monopoli dan dominasi pasar. Studi kasus terhadap Google dan Facebook menunjukkan bagaimana perusahaan platform dapat menggunakan data konsumen, algoritma, dan integrasi vertikal untuk mempertahankan dominasi pasar dan menghambat inovasi pesaing. Tindakan antitrust di Eropa dan Amerika Serikat menunjukkan adanya dorongan kebijakan untuk menyeimbangkan kekuatan pasar dan melindungi ruang kompetisi yang sehat (Blanchard & Johnson, 2013).

Keberlanjutan ekonomi berbasis platform juga tergantung pada bagaimana ekosistem tersebut mendukung pelaku kecil seperti UMKM. Tanpa intervensi kebijakan, pelaku lokal cenderung menjadi sekadar "penumpang" dalam ekosistem yang dikendalikan oleh platform besar. Oleh karena itu, regulasi persaingan yang adil dan berbasis inklusivitas sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku kecil tetap punya ruang tumbuh, misalnya melalui transparansi algoritma pencarian, larangan diskriminasi harga, dan akses data yang adil (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2014).

Dengan demikian, ekonomi platform membuka peluang besar, tetapi juga membutuhkan regulasi yang dinamis dan berorientasi pada persaingan sehat. Pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan persaingan dengan perkembangan teknologi agar pasar digital tetap inovatif, adil, dan mendukung keberlanjutan ekonomi yang inklusif.

Tabel 3.2. Peran Digitalisasi dalam Pertumbuhan Ekonomi

Aspek Utama	Mekanisme	Contoh Implementasi	Dampak yang Diharapkan
Kontribusi Sektor Digital terhadap PDB dan Lapangan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Peralihan penciptaan nilai dari sektor fisik ke digital • Ekspansi e-commerce, <i>fintech</i>, dan aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Digital India (India), Gerakan Bangsa Buatan Indonesia (Indonesia) 	Peningkatan PDB, penciptaan lapangan kerja digital, pemberdayaan UMKM
Ekonomi Platform dan Persaingan Pasar	<ul style="list-style-type: none"> • Model “winner takes most • Dominasi platform besar berbasis data dan jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> • Amazon, Alibaba, Shopee • Kasus antitrust Google & Facebook 	Efisiensi tinggi, risiko monopoli, kebutuhan regulasi persaingan sehat
Regulasi Digital dalam Globalisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Intervensi kebijakan untuk mencegah dominasi pasar • Perlindungan pelaku kecil dan transparansi algoritma 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulasi antitrust di UE dan AS • Kebijakan akses data dan larangan diskriminasi harga 	Pasar digital yang adil, inklusif, dan berkelanjutan; perlindungan terhadap UMKM dan konsumen

BAB 4.

EKONOMI HIJAU DAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN

Learning Objectives:

1. Memahami konsep ekonomi hijau, termasuk prinsip dasar dan kaitannya dengan pertumbuhan berkelanjutan.
2. Menganalisis peran energi terbarukan dalam membentuk sistem ekonomi makro yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
3. Menilai dampak perubahan iklim terhadap ekonomi makro.
4. Mengevaluasi kebijakan ekonomi yang dapat beradaptasi dengan tantangan lingkungan.
5. Menjelaskan strategi fiskal dan moneter dalam mendukung ekonomi hijau.
6. Menilai pentingnya reformasi kebijakan fiskal dalam menciptakan sistem ekonomi berbasis ekologi dan keberlanjutan jangka panjang.

Dalam menghadapi tantangan lingkungan dan perubahan iklim, konsep ekonomi hijau menjadi semakin relevan dalam kebijakan makroekonomi. Ekonomi hijau berfokus pada pertumbuhan berkelanjutan yang tidak hanya mempertimbangkan ekspansi ekonomi tetapi juga keseimbangan ekologi dan sosial. Dengan meningkatnya urgensi transisi energi, penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidro memainkan peran sentral dalam mendukung sistem ekonomi yang lebih ramah lingkungan.

Dampak perubahan iklim terhadap ekonomi makro sangat signifikan, mulai dari risiko bencana lingkungan hingga penurunan produktivitas industri akibat peningkatan emisi karbon. Untuk mengatasi hal ini, berbagai strategi fiskal dan moneter perlu diterapkan, seperti subsidi energi hijau, insentif pajak bagi perusahaan berkelanjutan, serta keterlibatan bank sentral dalam pembiayaan proyek ekonomi hijau. Reformasi kebijakan fiskal juga menjadi kunci dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adaptif dan tangguh terhadap tantangan lingkungan global.

Bab ini akan menjelaskan bagaimana kebijakan ekonomi dapat mendukung transisi menuju ekonomi hijau serta bagaimana pemerintah dan institusi keuangan dapat berperan dalam menciptakan ekosistem yang lebih berkelanjutan.

4.1 Konsep Ekonomi Hijau dan Pertumbuhan Berkelanjutan

4.1.1 Definisi dan Prinsip Ekonomi Hijau

Dalam lanskap ekonomi global yang kian terdigitalisasi, regulasi digital menjadi instrumen strategis bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara inovasi, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen. Globalisasi telah memperluas jangkauan ekonomi digital lintas negara, namun juga memunculkan tantangan serius dalam pengawasan arus data, praktik perdagangan digital, dan dominasi perusahaan teknologi global (Mankiw, 2014).

Peran kebijakan digital semakin krusial untuk mengatur lalu lintas data lintas batas, standar keamanan siber, serta pajak digital terhadap perusahaan multinasional. Di tengah ekonomi yang makin terdampak oleh aktivitas lintas yurisdiksi, pemerintah harus mengembangkan kerangka hukum yang menjamin kedaulatan digital tanpa menghambat kolaborasi global (Blanchard & Johnson, 2013).

Studi kasus Uni Eropa menampilkan langkah konkret melalui implementasi General Data Protection Regulation (GDPR), yang mengatur hak pengguna atas data pribadi, persetujuan eksplisit, dan kewajiban pelaporan pelanggaran data. GDPR bukan hanya standar regulatif dalam negeri, tetapi telah menjadi acuan global dalam perlindungan data digital. Di sisi lain, negara-negara seperti Prancis dan Inggris mulai memberlakukan

pajak layanan digital terhadap perusahaan seperti Google dan Apple yang memonetisasi data pengguna tanpa kewajiban pajak di negara tempat pengguna berada.

McKinsey (2024) mencatat bahwa keberadaan regulasi digital yang kuat dan kredibel dapat meningkatkan kepercayaan pasar hingga 30% terhadap produk berbasis teknologi. Artinya, kepastian hukum bukan hambatan bagi inovasi, melainkan fondasi yang membangun kepercayaan konsumen terhadap layanan digital, terutama dalam hal privasi, keamanan transaksi, dan tanggung jawab platform.

Dari sisi kebijakan, tantangan utama adalah menyeimbangkan antara dukungan terhadap ekosistem inovatif dan perlindungan hak-hak digital warga negara. Terlalu ketat bisa mematikan inovasi; terlalu longgar bisa mengorbankan hak konsumen. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan *smart regulation*—yakni peraturan yang lincah, berbasis risiko, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi—termasuk di dalamnya prinsip transparansi algoritma, interoperabilitas data, dan tata kelola platform yang inklusif.

Dengan demikian, regulasi digital bukan hanya soal kepatuhan, melainkan alat untuk menciptakan ekosistem digital yang adil, inovatif, dan berkelanjutan di tengah arus globalisasi.

4.1.2 Peran Energi Terbarukan dalam Ekonomi Makro

Energi terbarukan kini menjadi pilar penting dalam strategi makroekonomi global, karena berperan ganda sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi hijau dan solusi jangka panjang terhadap ketergantungan energi fosil. Selain memperkuat ketahanan energi nasional, transisi ke energi bersih mendorong penciptaan lapangan kerja hijau, investasi baru, serta efisiensi biaya jangka panjang (Mankiw, 2014).

Transisi energi merupakan strategi penting dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan resilien. Jerman, melalui kebijakan *Energiewende*, telah menjadi pionir global dalam pengembangan energi terbarukan. Kebijakan ini mendorong peningkatan bauran energi surya dan angin melalui skema *feed-in tariff*, investasi jaringan listrik cerdas, serta penutupan bertahap pembangkit listrik tenaga nuklir dan batu bara. Hasilnya, Jerman berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan dan menciptakan industri energi hijau yang kompetitif secara global (IESR, 2016; *Renovables Verdes*, 2023; Zbotek, 2023).

Indonesia, di sisi lain, menargetkan pencapaian 23% energi terbarukan dalam bauran energi nasional pada tahun 2025. Program ini mencakup pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Tenaga Bayu (PLTB), dan bioenergi, serta penyesuaian regulasi untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta. Namun, tantangan utama terletak pada birokrasi, kepastian

investasi, dan keterbatasan teknologi tepat guna di daerah (ESDM, 2024; IESR, 2024; Kompas, 2025).

Secara global, laporan International Energy Agency (IEA, 2023) menunjukkan bahwa investasi dalam energi terbarukan mencapai USD 1,7 triliun pada tahun 2023, dengan pertumbuhan tahunan lebih dari 10%. Investasi ini didominasi oleh teknologi solar PV, angin lepas pantai, dan penyimpanan energi baterai, mencerminkan meningkatnya kepercayaan pasar terhadap sektor energi bersih sebagai motor penggerak ekonomi masa depan.

Dari perspektif kebijakan, insentif fiskal dan regulasi progresif menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan sektor energi terbarukan. Pemerintah dapat mengembangkan skema subsidi, kredit pajak karbon, jaminan harga jual listrik hijau, serta pembiayaan publik-privat untuk proyek strategis (Kemenkeu, 2023; PSE UGM, 2021). Studi fiskal menunjukkan bahwa insentif seperti tax holiday, subsidi bunga, dan pembebasan PPN jasa konstruksi dapat meningkatkan kelayakan investasi dan menurunkan harga jual listrik energi terbarukan secara signifikan.

Substitusi bahan bakar fosil dengan energi terbarukan juga berdampak positif terhadap neraca perdagangan. Negara pengimpor energi, seperti Indonesia, dapat menekan defisit transaksi berjalan dan mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga minyak global (Kompas, 2025; Kemenko Perekonomian, 2021). Dalam konteks makroekonomi, transisi energi mendorong investasi modal, inovasi teknologi, dan diversifikasi ekonomi nasional. Namun, penyesuaian

struktural pada sektor tenaga kerja dan kebijakan fiskal perlu dirancang secara inklusif agar transisi ini berjalan adil dan berkelanjutan (BKF, 2025; ResearchGate, 2023).

Energi terbarukan ADALAH solusi lingkungan, DAN instrumen strategis dalam kebijakan ekonomi makro modern. Transisi energi yang dirancang secara inklusif dan progresif dapat memperkuat ketahanan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Tabel 4.1. ` Ekonomi Hijau dan Pertumbuhan Berkelanjutan

Aspek Utama	Mekanisme	Contoh Implementasi	Dampak yang Diharapkan
Definisi dan Prinsip Ekonomi Hijau	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem ekonomi yang mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan sumber daya • Prinsip inklusivitas, efisiensi sumber daya 	<ul style="list-style-type: none"> • UNEP: ekonomi rendah karbon dan inklusif • Green Economy Coalition: 9 prinsip hijau 	Pembangunan berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, stabilitas ekonomi jangka panjang
Peran Energi Terbarukan dalam Ekonomi Makro	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi energi bersih dalam kebijakan makro • Transisi dari energi fosil ke sumber terbarukan • Insentif fiskal dan regulasi progresif 	<ul style="list-style-type: none"> • Energiewende (Jerman) • Target 23% energi terbarukan Indonesia 2025 • SEforALL: target global 2030 	Ketahanan energi, penciptaan lapangan kerja hijau, pengurangan defisit perdagangan, pertumbuhan berkelanjutan

4.2 Dampak Perubahan Iklim terhadap Ekonomi Makro

4.2.1 Risiko Ekonomi akibat Perubahan Iklim dan Bencana Lingkungan

Perubahan iklim dan bencana lingkungan menimbulkan risiko ekonomi jangka pendek dan struktural yang semakin signifikan dalam ekonomi global. Ketika iklim menjadi tak terprediksi, infrastruktur ekonomi, produktivitas sektor riil, dan stabilitas sosial terancam—membutuhkan kebijakan ekonomi yang tangguh dan responsif (Mankiw, 2014).

Studi kasus dari Afrika dan India menunjukkan bahwa perubahan iklim telah menjadi ancaman langsung terhadap stabilitas ekonomi dan sosial, bukan sekadar isu lingkungan. Di Afrika, sektor pertanian menghadapi tekanan berat akibat kekeringan ekstrem, banjir bandang, dan gagal panen musiman. Negara seperti Ethiopia mengalami penurunan hasil panen yang signifikan, memicu krisis pangan dan migrasi pedesaan. DW (2024) melaporkan bahwa lebih dari 16 juta penduduk Ethiopia mengalami rawan pangan, dengan dampak yang diperparah oleh konflik dan degradasi lahan. Di Sudan dan Zambia, banjir dan kekeringan telah merusak infrastruktur pertanian dan memperburuk kemiskinan rumah tangga berbasis agraria².

India menghadapi krisis air yang kompleks, terutama di wilayah urban dan pertanian. Penurunan air tanah dan kegagalan manajemen sumber daya air telah

menghambat produktivitas sektor pertanian, industri, dan energi. Laporan Investing.com (2024) mencatat bahwa kekurangan air menyebabkan inflasi pangan, gangguan pasokan energi, dan ketegangan sosial antarwilayah. Penelitian oleh Niti Aayog menunjukkan bahwa 21 kota besar di India diperkirakan akan kehabisan air tanah pada 2030, mengancam pertumbuhan ekonomi hingga 6% dari PDB nasional⁵.

Secara global, kerugian ekonomi akibat bencana terkait iklim mencapai USD 250 miliar per tahun, menurut IMF dan Munich Re (2023). Kerugian ini mencakup kerusakan infrastruktur, hilangnya hasil produksi, dan gangguan pasar tenaga kerja, serta peningkatan angka pengungsian domestik dan kemiskinan struktural⁷.

Dengan demikian, perubahan iklim bukan hanya tantangan ekologis, tetapi juga tantangan makroekonomi dan sosial. Integrasi ketahanan iklim ke dalam kerangka kebijakan ekonomi nasional dan internasional menjadi syarat mutlak untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap risiko global yang terus berkembang.

Analisis Kebijakan: Kebijakan mitigasi dan adaptasi iklim kini menjadi bagian integral dari strategi makroekonomi yang modern dan berkelanjutan. Investasi teknologi tahan iklim seperti sistem irigasi pintar, bibit tahan kekeringan, dan bangunan tahan bencana bukan hanya berfungsi sebagai alat pencegah kerugian, tetapi juga membuka peluang penciptaan

sektor ekonomi baru. Pendekatan Climate-Smart Irrigation (CSI), misalnya, telah terbukti meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan terhadap risiko iklim (Diklatkerja, 2025). Teknologi ini menggabungkan efisiensi air, sensor kelembapan tanah, dan sistem pengelolaan berbasis data untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan hasil panen. Selain itu, inovasi seperti panel surya untuk pompa air dan bangunan tahan gempa di zona rawan bencana memperkuat infrastruktur ekonomi dan sosial secara simultan (Sridianti, 2024).

Di sisi lain, adaptasi ekonomi harus mengutamakan perlindungan terhadap sektor-sektor rentan seperti pertanian, pariwisata, dan nelayan. Sektor ini sangat bergantung pada kondisi alam dan paling terdampak oleh perubahan iklim. Subsidi asuransi cuaca menjadi instrumen penting untuk melindungi petani dan nelayan dari kerugian akibat gagal panen atau cuaca ekstrem. Program seperti AUDP (Asuransi Usaha Tani Padi) dan skema perlindungan sosial nelayan di Indonesia telah mulai mengisi celah ini, meskipun tantangan akses dan literasi masih tinggi (Universitas Gadjah Mada, 2024; KNTI, 2024). Diversifikasi mata pencaharian juga menjadi strategi adaptif yang efektif, seperti yang dilakukan nelayan di Pulau Bintan melalui pekerjaan alternatif di sektor non-perikanan dan pemanfaatan jaringan sosial (Universitas Andalas, 2024).

Lebih jauh, penguatan program perlindungan sosial berbasis risiko iklim menjadi landasan penting dalam

membangun ketahanan ekonomi. Program ini mencakup bantuan tunai adaptif, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan skema pembiayaan mikro untuk sektor informal. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka adaptive fiscal policy yang menyesuaikan alokasi anggaran berdasarkan proyeksi risiko iklim dan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2014).

Dengan demikian, perubahan iklim bukan hanya tantangan ekologis, tetapi merupakan ancaman langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, dan keadilan sosial. Mengintegrasikan ketahanan iklim ke dalam kerangka makroekonomi bukan hanya memperkuat daya tahan sistem ekonomi terhadap guncangan global, tetapi juga menciptakan pembangunan yang inklusif dan berorientasi masa depan.

4.2.2 Pengaruh Emisi Karbon terhadap Produktivitas Industri

Emisi karbon yang tinggi bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap produktivitas industri dan kesehatan ekonomi makro. Ketika tingkat polusi udara meningkat akibat pembakaran bahan bakar fosil di sektor industri, terjadi penurunan kualitas kesehatan tenaga kerja, gangguan produksi, dan lonjakan biaya operasional akibat kebutuhan penyesuaian lingkungan kerja (Mankiw, 2014).

Studi kasus China menunjukkan bahwa polusi udara memiliki dampak langsung terhadap produktivitas

industri dan kesehatan tenaga kerja. Di kawasan industri seperti Beijing dan Hebei, konsentrasi partikel halus (PM2.5) yang tinggi menyebabkan gangguan pernapasan, penurunan konsentrasi kerja, dan peningkatan ketidakhadiran akibat sakit. Hal ini tidak hanya menurunkan output industri, tetapi juga meningkatkan beban biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh sistem asuransi sosial dan dunia usaha (Zhang et al., 2023; OECD, 2024).

Secara global, OECD (2024) mencatat bahwa industri dengan emisi karbon tinggi mengalami penurunan produktivitas kerja hingga 15%, terutama di wilayah dengan kualitas udara buruk. Penurunan ini berkaitan erat dengan kesehatan kognitif dan fisik pekerja, serta menurunnya efisiensi mesin akibat paparan polusi. Dengan kata lain, kualitas udara bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga faktor produksi yang memengaruhi efisiensi dan daya saing industri.

Analisis Kebijakan: Dari sisi kebijakan, regulasi emisi karbon melalui mekanisme pasar seperti carbon pricing dan cap-and-trade systems menjadi strategi penting. Carbon pricing memberikan sinyal ekonomi agar pelaku industri menginternalisasi biaya eksternal dari emisi karbon, sesuai prinsip “polluters pay” yang diadopsi dalam Perpres No. 98 Tahun 2021 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022). Sementara itu, cap-and-trade memberikan fleksibilitas bagi industri untuk menyesuaikan emisi dengan efisiensi biaya, memungkinkan perusahaan yang lebih efisien menjual

kelebihan kuota emisi kepada yang kurang efisien (IESR, 2024).

Lebih jauh, implementasi kebijakan hijau dapat menjadi peluang strategis untuk meningkatkan daya saing industri secara jangka panjang. Efisiensi energi, substitusi bahan bakar bersih, dan inovasi teknologi rendah karbon tidak hanya menurunkan emisi, tetapi juga meningkatkan reputasi industri di pasar global yang semakin berorientasi pada keberlanjutan. IESR (2024) mencatat bahwa industri yang menerapkan prinsip hijau mampu menghemat biaya produksi hingga 30% dan mengakses pasar berstandar lingkungan ketat seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Dengan demikian, pengendalian emisi karbon bukan hanya kewajiban lingkungan, tetapi juga strategi ekonomi yang memperkuat produktivitas dan keberlanjutan industri. Negara yang mampu mengintegrasikan kebijakan hijau ke dalam strategi industri akan lebih siap menghadapi tantangan global dan memanfaatkan peluang pasar masa depan.

4.2.3 Adaptasi Kebijakan Ekonomi untuk Mengurangi Dampak Lingkungan

Adaptasi kebijakan ekonomi terhadap tantangan lingkungan merupakan langkah strategis untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan, resilien, dan inklusif. Ketika dampak lingkungan semakin kompleks, kebijakan ekonomi tidak lagi bisa bersifat netral terhadap alam—melainkan harus proaktif dalam

mendorong perubahan perilaku ekonomi dan model bisnis (Mankiw, 2014).

Integrasi prinsip lingkungan ke dalam kebijakan ekonomi telah menjadi strategi pembangunan yang kian relevan di tengah tuntutan global akan keberlanjutan. Korea Selatan menjadi contoh konkret melalui pengembangan Green Growth Zones—zona ekonomi hijau yang menyediakan insentif fiskal, subsidi teknologi bersih, dan kemudahan perizinan bagi perusahaan yang memenuhi standar lingkungan ketat. Selain insentif struktural, negara ini juga mendorong inovasi R&D dan pelatihan tenaga kerja hijau, menciptakan ekosistem industri berkelanjutan yang tak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi Korea sebagai pemimpin dalam transformasi industri berbasis lingkungan (*World Bank*, 2023).

Menurut *World Economic Forum* (2023), negara dengan regulasi lingkungan yang proaktif mampu menarik investasi hijau hingga 45% lebih tinggi dibanding negara dengan kebijakan yang longgar. Temuan ini menegaskan bahwa kepastian hukum, komitmen kelembagaan, dan integrasi kebijakan hijau adalah elemen kunci dalam membentuk iklim investasi berorientasi keberlanjutan. Di tengah tren ESG (Environmental, Social, and Governance), investor global menempatkan transparansi dan kredibilitas lingkungan sebagai penentu utama dalam alokasi modal jangka panjang.

Analisis Kebijakan: Dari perspektif kebijakan, penyesuaian regulasi ekonomi mencakup revisi standar emisi, pelaporan keberlanjutan (ESG disclosure), serta pemberian insentif perpajakan seperti pengurangan pajak penghasilan, pembebasan PPN, dan skema pendanaan untuk perusahaan yang mengadopsi teknologi hijau. Kebijakan fiskal yang diarahkan pada ekonomi rendah karbon—termasuk alokasi anggaran untuk infrastruktur hijau seperti transportasi publik dan energi terbarukan, serta skema pajak karbon dan subsidi hijau—juga memperkuat ketahanan fiskal terhadap fluktuasi harga energi dan risiko iklim. Di sisi pembiayaan, green bonds atau obligasi hijau menjadi instrumen penting yang membuka kanal pembiayaan berkelanjutan dan meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam transisi hijau (Perpres No. 98 Tahun 2021; IESR, 2024).

Dengan demikian, adaptasi kebijakan ekonomi terhadap isu lingkungan bukanlah pengorbanan terhadap pertumbuhan, tetapi sebuah strategi untuk menciptakan sistem ekonomi yang efisien, resilien, dan inklusif. Negara yang mampu mengintegrasikan prinsip hijau ke dalam sistem ekonomi akan lebih unggul dalam menarik investasi, membangun ketahanan terhadap guncangan global, dan menciptakan lapangan kerja masa depan yang berbasis inovasi dan keberlanjutan.

4.3 Strategi Fiskal dan Moneter untuk Mendukung Transisi Energi

4.3.1 Subsidi Energi Hijau dan Insentif Pajak bagi Perusahaan Ramah Lingkungan

Subsidi energi hijau dan insentif pajak merupakan instrumen strategis dalam kebijakan fiskal yang berperan besar dalam mempercepat transisi ke ekonomi rendah karbon. Dengan memberikan dukungan finansial dan pengurangan beban pajak, pemerintah dapat mendorong investasi swasta dalam teknologi bersih, menciptakan pasar baru, dan mempercepat adopsi inovasi ramah lingkungan (Mankiw, 2014).

Studi kasus Norwegia menunjukkan bahwa insentif fiskal yang dirancang secara komprehensif dan konsisten dapat mendorong transformasi pasar secara drastis. Pemerintah Norwegia membebaskan kendaraan listrik (EV) dari pajak pembelian, bea masuk, dan pajak jalan, serta memberikan manfaat tambahan seperti parkir gratis dan akses jalur bus. Kebijakan ini telah diterapkan sejak 1990 dan berhasil menjadikan EV sebagai pilihan finansial paling menarik bagi konsumen. Hasilnya, lebih dari 70% kendaraan baru yang terjual di Norwegia pada 2023 adalah kendaraan listrik, menjadikan negara tersebut sebagai pemimpin global dalam adopsi EV (Kumaran, 2024; InfoEV, 2025; Kompas, 2024).

Secara global, subsidi dan insentif fiskal dalam sektor energi hijau mendorong investasi hingga USD 300 miliar per tahun, mencakup pembangkit listrik

terbarukan, kendaraan listrik, efisiensi energi, dan penyimpanan energi (IEA, 2024). Kebijakan ini menciptakan sinyal pasar yang kuat bagi pelaku industri, terutama dalam membantu melewati fase “valley of death”—yaitu masa kritis ketika inovasi teknologi belum menguntungkan secara komersial dan masih menghadapi risiko tinggi. Dengan menurunkan biaya awal investasi, insentif fiskal memungkinkan teknologi bersih berkembang dan menarik minat investor serta konsumen.

Lebih jauh, kebijakan fiskal hijau meningkatkan daya saing perusahaan ramah lingkungan dengan memberikan keunggulan terhadap produsen konvensional yang tidak menginternalisasi biaya eksternal seperti polusi udara dan emisi karbon. Hal ini penting untuk menciptakan level playing field yang adil, di mana perusahaan yang beroperasi secara berkelanjutan tidak dirugikan oleh kompetitor yang mengabaikan dampak lingkungan. Dalam konteks ini, pajak karbon dan skema cap-and-trade menjadi instrumen pelengkap yang memperkuat insentif fiskal dan mendorong efisiensi emisi (Kemenkeu, 2024; Pajak.go.id, 2024).

Namun, efektivitas kebijakan sangat bergantung pada desainnya. Insentif harus bersifat transparan, tepat sasaran, dan memiliki batas waktu yang jelas untuk menghindari ketergantungan atau penyalahgunaan. Pemerintah perlu memastikan bahwa insentif diberikan kepada proyek yang benar-benar berkontribusi pada

dekarbonisasi dan inovasi teknologi hijau, bukan sekadar memperluas kapasitas produksi konvensional dengan label hijau. Evaluasi berkala dan pelaporan publik menjadi bagian penting dari tata kelola fiskal yang akuntabel.

Dengan demikian, subsidi energi hijau dan insentif pajak bukan hanya alat transisi, tetapi juga investasi strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi di masa depan. Negara yang mampu mendesain kebijakan ini dengan cerdas dan adaptif akan lebih cepat mencapai tujuan dekarbonisasi, memperluas basis ekonomi hijau, dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor berkelanjutan.

4.3.2 Peran Bank Sentral dalam Pembiayaan Proyek Ekonomi Hijau

Bank sentral memainkan peran strategis dalam memperkuat pembiayaan proyek ekonomi hijau melalui instrumen regulasi, insentif moneter, dan dukungan pasar modal. Dalam konteks transisi menuju ekonomi rendah karbon, keterlibatan otoritas moneter menjadi krusial untuk memastikan bahwa sistem keuangan nasional turut mendorong keberlanjutan (Mankiw, 2014).

Inisiatif European Green Bonds Initiative mencerminkan evolusi kebijakan keuangan Uni Eropa dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui instrumen pasar modal. Dengan mengembangkan kerangka taksonomi hijau yang ketat, Uni Eropa

memastikan bahwa dana yang dihimpun melalui obligasi hijau benar-benar dialokasikan untuk proyek-proyek yang memiliki dampak lingkungan positif, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan transportasi berkelanjutan². Peran Bank Sentral Eropa (ECB) dalam membeli obligasi hijau di pasar sekunder sebagai bagian dari kebijakan green quantitative easing menunjukkan bahwa stabilitas harga dan keberlanjutan jangka panjang bukanlah tujuan yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan beriringan dalam kerangka kebijakan moneter yang progresif.

Secara global, data dari *World Bank* (2024) menunjukkan bahwa pasar obligasi hijau tumbuh sekitar 30% per tahun, dengan nilai outstanding yang telah melampaui USD 2 triliun. Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya minat investor terhadap instrumen keuangan yang mendanai proyek-proyek ramah lingkungan, sekaligus menjadikan green bonds sebagai salah satu sumber pembiayaan utama dalam ekonomi hijau global. Lonjakan ini juga didorong oleh meningkatnya kesadaran risiko iklim dan tuntutan transparansi dari investor institusional.

Dari sisi kebijakan, bank sentral memainkan peran strategis dalam memperkuat ekosistem pembiayaan hijau. Regulasi kredit hijau menjadi instrumen penting, mencakup pengembangan klasifikasi aset hijau, penyesuaian bobot risiko kredit untuk pinjaman berwawasan lingkungan, serta panduan bagi lembaga keuangan dalam mengukur eksposur terhadap risiko

iklim⁵. Integrasi risiko iklim ke dalam pengawasan makroprudensial dilakukan melalui climate stress testing, pengungkapan iklim, dan penilaian ketahanan portofolio bank terhadap skenario perubahan iklim⁷. Langkah ini membantu menginternalisasi risiko fisik dan transisi ke dalam sistem keuangan secara sistematis, memperkuat stabilitas keuangan jangka panjang.

Di sisi kebijakan moneter, pendekatan green central banking mulai diterapkan melalui program pembelian aset hijau dan pemberian insentif suku bunga untuk instrumen berkelanjutan⁹. Ini menunjukkan bahwa bank sentral tidak hanya berperan sebagai penjaga inflasi, tetapi juga sebagai katalis transisi ekonomi rendah karbon. Dengan memperluas mandat stabilitas sistemik agar mencakup risiko lingkungan, bank sentral menjadi aktor kunci dalam mendorong transformasi ekonomi yang lebih resilien dan berkelanjutan.

Dengan demikian, peran bank sentral dalam pembiayaan ekonomi hijau mencerminkan transformasi dari fungsi tradisionalnya menuju institusi yang proaktif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan transisi hijau memerlukan sinergi erat antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan secara keseluruhan, serta komitmen regulatif yang konsisten untuk menciptakan ekosistem pembiayaan hijau yang kredibel dan inklusif.

Studi kasus Korea Selatan menunjukkan bahwa integrasi prinsip lingkungan ke dalam kebijakan ekonomi dapat mendorong transformasi sektor industri secara

signifikan. Melalui pengembangan Green Growth Zones, pemerintah Korea menyediakan insentif fiskal, subsidi teknologi bersih, dan kemudahan perizinan bagi perusahaan yang memenuhi standar lingkungan ketat (OECD, 2022). Selain itu, Korea Selatan juga mengalokasikan sekitar 2% dari PDB untuk R&D energi bersih dan pelatihan tenaga kerja hijau, menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan dan memperkuat daya saing globalnya (*World Bank*, 2023).

Data dari *World Economic Forum* (2023) menunjukkan bahwa negara dengan regulasi lingkungan proaktif mampu menarik investasi hijau hingga 45% lebih tinggi dibandingkan negara dengan kebijakan yang longgar. Temuan ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dan komitmen kelembagaan dalam membentuk iklim investasi yang berorientasi keberlanjutan. Di tengah tren ESG, investor semakin memprioritaskan transparansi dan reputasi lingkungan dalam pengambilan keputusan investasi.

Penyesuaian regulasi ekonomi kini berfokus pada insentif pajak, pelaporan ESG, dan pembiayaan hijau untuk mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur hijau, menerapkan pajak karbon, dan memberikan subsidi teknologi bersih, sementara green bonds digunakan untuk menarik investasi swasta. Integrasi prinsip hijau merupakan strategi pertumbuhan yang efisien, resilien, dan inklusif, serta membuka peluang kerja berbasis inovasi dan keberlanjutan..

4.3.3 Reformasi Kebijakan Fiskal untuk Mendukung Ekonomi Berbasis Ekologi

Reformasi kebijakan fiskal berperan sentral dalam menjembatani kepentingan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan, terutama dalam konteks perubahan iklim yang mengancam stabilitas jangka panjang. Dengan menginternalisasi biaya eksternal emisi melalui instrumen fiskal, pemerintah dapat mengubah perilaku pasar, mendorong efisiensi energi, dan menciptakan insentif bagi inovasi hijau (Mankiw, 2014).

Studi kasus Kanada menunjukkan bahwa penerapan pajak karbon nasional sejak 2019 telah menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam menurunkan emisi industri tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini menetapkan harga emisi karbon yang meningkat secara bertahap, dari CA\$20 per ton CO₂e pada awal implementasi hingga target CA\$170 per ton pada 2030. Evaluasi lima tahun pertama menunjukkan bahwa emisi industri berhasil dikurangi sekitar 10%, sementara perekonomian tetap tumbuh stabil. Pendapatan dari pajak karbon sebagian besar dikembalikan kepada masyarakat melalui skema carbon dividend, berupa transfer tunai yang menjaga daya beli dan memperkuat legitimasi sosial kebijakan.

Secara global, lebih dari 40 negara telah mengadopsi skema pajak karbon, menurut laporan IMF (2024). Beberapa negara mencatat penurunan emisi hingga 25% di sektor-sektor intensif karbon, seperti

industri berat dan energi. Negara dengan kebijakan yang stabil dan transparan cenderung menarik lebih banyak investasi hijau dan mengalami peningkatan efisiensi energi. Hal ini menunjukkan bahwa pajak karbon bukan hanya instrumen lingkungan, tetapi juga sinyal pasar yang mendorong transformasi industri dan inovasi teknologi rendah emisi.

Reformasi fiskal hijau mendorong transisi energi melalui penyesuaian struktur pajak, seperti tax shift dari tenaga kerja ke emisi karbon dan skema carbon dividend untuk melindungi kelompok rentan. Insentif R&D dan pengurangan PPN bagi produk rendah karbon mempercepat adopsi teknologi bersih. Penerimaan pajak karbon digunakan untuk investasi hijau, pelatihan ulang tenaga kerja, dan perlindungan sosial berbasis risiko iklim, memastikan transisi berlangsung secara adil, inklusif, dan memperkuat kohesi sosial. Dalam jangka panjang, fiskal hijau menjadi alat penting untuk mendorong inovasi industri, memperbaiki neraca energi, dan meningkatkan daya saing ekonomi global. Negara yang mampu mengintegrasikan kebijakan fiskal dengan agenda iklim akan lebih siap menghadapi volatilitas harga energi, tekanan perdagangan berbasis karbon, dan tuntutan pasar internasional terhadap standar keberlanjutan. Dengan demikian, reformasi kebijakan fiskal bukan hanya respons terhadap krisis iklim, tetapi juga fondasi bagi model pembangunan ekonomi yang tangguh, adil, dan berorientasi masa depan.

Tabel 4.2. Ekonomi Hijau dan Kebijakan Lingkungan

Kategori	Data Utama	Tahun/Periode
Energi Terbarukan	Potensi energi terbarukan: 442 GW (air, panas bumi, bioenergi, surya, angin, laut)	Terkini
	Kapasitas terpasang energi terbarukan: 13.155 MW (naik dari 9.427 MW)	2023 (dibanding 2017)
	Proporsi listrik dari energi terbarukan: 19,6% dari total produksi nasional	2022
	misi dan Risiko iklim	Emisi karbon Indonesia: 674,5 juta ton CO ₂ e
	Kenaikan emisi sejak 1973: 16x lipat	1973–2023
	Kontribusi industri terhadap emisi nasional: 34%	Terkini
	Risiko ekonomi akibat iklim: potensi kerugian 3,45% dari PDB	Proyeksi 2030
Kebijakan Fiskal & Moneter	Realisasi subsidi energi hijau: Rp27,9 triliun	Q1 2024
	Insentif pajak: tax allowance, tax holiday, pembebasan bea masuk & PPN impor, PPh DTP untuk EBT	Terkini

Sumber: BPS (2023), Dirjen Pajak (2023), DFD Lab (2023), GoodStats (2023), Kementerian ESDM (2023), SIP Law Firm (2023)

BAB 5.

INSTITUSI DAN KUALITAS TATA KELOLA EKONOMI

Learning Objectives:

1. Menjelaskan peran institusi dalam pertumbuhan ekonomi, serta bagaimana struktur kelembagaan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi.
2. Menganalisis hubungan antara kelembagaan dan inovasi ekonomi.
3. Menilai dampak regulasi ekonomi.
4. Mengevaluasi pengaruh ekonomi politik terhadap stabilitas makroekonomi, serta bagaimana kebijakan publik dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan politik global.
5. Mengidentifikasi tantangan kebijakan ekonomi dalam menghadapi gejolak politik, termasuk bagaimana negara-negara merancang kebijakan responsif terhadap ketidakpastian ekonomi.

Institusi ekonomi memainkan peran kunci dalam membentuk kebijakan ekonomi yang efektif dan menjaga stabilitas makroekonomi. Kualitas tata kelola yang baik tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga meningkatkan efisiensi pasar, mendorong inovasi, dan menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif. Reformasi kelembagaan yang berhasil di berbagai negara menunjukkan bagaimana struktur institusional yang kuat mampu mengoptimalkan investasi dan kesejahteraan masyarakat.

Bab ini akan membahas peran institusi dalam ekonomi, dampak regulasi terhadap investasi, serta interaksi antara kebijakan ekonomi dan dinamika politik. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat mengevaluasi bagaimana tata kelola ekonomi yang baik berkontribusi terhadap kestabilan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

5.1 Peran Institusi dalam Pertumbuhan Ekonomi

5.1.1 Teori Institusional dan Dampaknya terhadap Efisiensi Ekonomi

Teori institusional dalam ekonomi menyoroti peran penting institusi—yakni aturan formal dan norma informal yang mengatur interaksi ekonomi—dalam membentuk efisiensi pasar dan pertumbuhan jangka panjang. Institusi mencakup kerangka hukum, kepemilikan hak, tata kelola pemerintahan, serta sistem

regulasi yang memastikan keteraturan dan prediktabilitas dalam aktivitas ekonomi (North, 1990).

Dalam kajian ekonomi kelembagaan, pandangan klasik dan modern memberikan kerangka teoritis yang saling melengkapi dalam menjelaskan hubungan antara institusi dan pertumbuhan ekonomi. Teori institusional klasik, yang dipelopori oleh Douglass North, menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata ditentukan oleh akumulasi modal dan tenaga kerja, tetapi juga oleh kualitas institusi yang mengatur interaksi ekonomi. North (1994) mendefinisikan institusi sebagai “humanly devised constraints that shape human interaction,” yang mencakup aturan formal seperti hukum dan regulasi, serta norma informal seperti budaya dan kebiasaan. Institusi yang baik mampu menurunkan biaya transaksi, mengurangi ketidakpastian, dan mendorong kerja sama ekonomi yang produktif. Misalnya, hak kepemilikan yang jelas dan dapat ditegakkan menciptakan insentif bagi pelaku ekonomi untuk berinvestasi dan berinovasi, karena mereka yakin akan memperoleh manfaat dari aktivitas ekonomi tersebut (Gurumuda.net, 2024).

Teori institusional modern mengembangkan pendekatan ini dengan menambahkan dimensi tata kelola, stabilitas politik, dan efektivitas birokrasi sebagai determinan utama produktivitas jangka panjang. Dalam konteks globalisasi dan disrupsi teknologi, institusi yang adaptif menjadi semakin penting. Scott (2008) menekankan bahwa organisasi publik dan swasta harus

mampu menyesuaikan diri dengan harapan eksternal dan tekanan lingkungan, termasuk perubahan teknologi dan pasar. Institusi yang responsif terhadap inovasi digital, transparansi regulasi, dan partisipasi masyarakat cenderung lebih mampu menjaga legitimasi dan efektivitas kebijakan (Eprints UMPO, 2024; UNG, 2024). Dalam praktiknya, tata kelola yang baik mencakup prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, inklusivitas, dan efisiensi, yang menjadi fondasi bagi institusi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dengan demikian, baik pendekatan klasik maupun modern sepakat bahwa institusi bukan sekadar pelengkap dalam sistem ekonomi, melainkan aktor utama yang menentukan arah dan kualitas pembangunan. Dalam era global yang dinamis, kemampuan institusi untuk bertransformasi dan merespons perubahan menjadi kunci dalam menjaga daya saing dan kesejahteraan jangka panjang.

Studi kasus mengenai negara Nordik seperti Denmark dan Finlandia, serta Venezuela, memperlihatkan secara kontras bagaimana kualitas institusi ekonomi dapat menentukan arah pembangunan dan stabilitas makroekonomi suatu negara.

Negara-negara Nordik, khususnya Denmark dan Finlandia, dikenal memiliki institusi ekonomi yang kuat dan stabil. Sistem hukum yang adil, regulasi yang efisien, serta tingkat korupsi yang sangat rendah menciptakan ekosistem bisnis yang inovatif dan kompetitif. Menurut laporan Transparency International (2023), Denmark

dan Finlandia secara konsisten menempati peringkat teratas dalam Indeks Persepsi Korupsi global, dengan skor masing-masing 90 dan 87 dari 100, mencerminkan tingginya kepercayaan publik terhadap institusi negara mereka (Kompasiana, 2025; Kompas.com, 2024). Denmark, misalnya, menerapkan undang-undang kebebasan informasi yang memungkinkan masyarakat mengakses data pengeluaran pemerintah secara transparan, sementara Finlandia menanamkan nilai-nilai integritas sejak pendidikan dasar melalui kurikulum etika nasional (Kompasiana, 2025). Institusi yang konsisten ini tidak hanya mendukung efisiensi pasar, tetapi juga memungkinkan penerapan welfare state yang kuat tanpa mengorbankan produktivitas dan daya saing. Model ekonomi Nordik, seperti yang dijelaskan oleh Andersen et al. (2007), menggabungkan prinsip demokrasi ekonomi dengan efisiensi kapitalistik, menghasilkan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan (e-Journal Unair, 2020).

Sebaliknya, Venezuela menunjukkan dampak destruktif dari institusi yang lemah dan intervensi pasar yang ekstrem. Ketidakstabilan hukum, nasionalisasi industri tanpa kompensasi, dan pencetakan uang berlebih menyebabkan hiperinflasi yang mencapai jutaan persen pada tahun 2018, serta kekurangan barang pokok dan pelarian modal besar-besaran (JurnalPost, 2023; Kompasiana, 2024). Pemerintah Venezuela, di bawah kepemimpinan Hugo Chávez dan Nicolás Maduro, menerapkan kebijakan ekonomi yang tidak

berkelanjutan seperti kontrol harga, subsidi besar-besaran, dan intervensi langsung terhadap sektor swasta. Akibatnya, banyak perusahaan tutup atau henggang, suplai barang berkurang drastis, dan daya beli masyarakat runtuh (Suarasosial.com, 2025; Timenews.co.id, 2024). Ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan hak kepemilikan juga memperburuk iklim investasi, mendorong pelarian modal dan mempercepat kontraksi ekonomi. Menurut laporan *World Bank* dan IMF, Venezuela mengalami penurunan PDB lebih dari 22% pada 2019 dan tingkat kemiskinan mencapai 87% pada 2017 (Educareforma.com.br, 2024).

Perbandingan ini menegaskan bahwa institusi yang kuat dan adaptif merupakan fondasi utama bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Negara dengan tata kelola yang transparan, sistem hukum yang dapat diandalkan, dan birokrasi yang efisien cenderung lebih mampu menjaga stabilitas, mendorong inovasi, dan melindungi kesejahteraan masyarakat.

Data empiris dari *World Bank* dan OECD memperkuat argumen bahwa kualitas institusi memiliki dampak langsung terhadap kinerja ekonomi dan daya tarik investasi. Laporan *World Bank* tahun 2024 menunjukkan bahwa negara dengan institusi yang kuat—ditandai oleh sistem hukum yang dapat diandalkan, birokrasi yang efisien, dan tata kelola yang transparan—mencatat PDB per kapita 30% lebih tinggi dibanding negara dengan kelembagaan yang lemah. Hal ini

mencerminkan peran institusi dalam menurunkan biaya transaksi, meningkatkan kepercayaan pasar, dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang (*World Bank, 2024*)².

Sementara itu, laporan OECD Economic Outlook tahun 2023 menyoroti bahwa kepastian regulasi dan transparansi institusi dapat meningkatkan arus investasi asing langsung (FDI) hingga 40%. Investor cenderung menghindari negara dengan ketidakpastian hukum dan risiko politikal tinggi, karena faktor-faktor tersebut meningkatkan biaya risiko dan mengurangi prediktabilitas keuntungan investasi. OECD menekankan bahwa reformasi struktural yang memperkuat institusi publik, memperjelas aturan main, dan menjamin perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan merupakan prasyarat penting untuk menarik investasi dan mendorong produktivitas (OECD, 2023).

Kedua temuan ini menegaskan bahwa institusi bukan hanya elemen pendukung dalam sistem ekonomi, tetapi merupakan fondasi utama bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Negara yang mampu membangun institusi yang adaptif dan kredibel akan lebih siap menghadapi tantangan global dan memanfaatkan peluang ekonomi lintas batas

Analisis Kebijakan Transparansi dan akuntabilitas institusi merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan investor dan menjaga stabilitas makroekonomi. Dalam konteks pasar modal, prinsip

Good Corporate Governance (GCG) yang menekankan keterbukaan informasi, akuntabilitas manajemen, dan perlindungan hak pemegang saham telah terbukti meningkatkan kredibilitas perusahaan dan menarik investasi asing langsung (Santosa & Agnesia, 2024; Matondang, 2024). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur kewajiban transparansi dan tanggung jawab perusahaan dalam menyediakan informasi yang akurat dan relevan kepada investor, termasuk perlindungan kontrak dan hak milik (Rewangrencang.com, 2024). OECD (2023) mencatat bahwa kepastian regulasi dan transparansi institusi dapat meningkatkan arus investasi asing hingga 40%, karena investor cenderung menghindari ketidakpastian dan risiko politikal yang tinggi.

Namun, kualitas institusi tidak hanya berdampak pada sektor keuangan, tetapi juga pada efektivitas kebijakan ekonomi secara keseluruhan. Reformasi institusi diperlukan untuk memperbaiki distorsi pasar dan mengurangi ketimpangan sosial. Distorsi ini sering muncul akibat regulasi yang tumpang tindih, birokrasi yang lambat, dan sistem hukum yang tidak konsisten (PSHK, 2019; Mayasari, 2020). Untuk mengatasinya, reformasi dapat dilakukan melalui deregulasi selektif yang menyederhanakan aturan tanpa mengorbankan perlindungan publik, serta reformasi sistem peradilan yang memperkuat independensi dan efisiensi lembaga hukum (Kumpan.com, 2024; Tjokrowinoto, 2004).

Selain itu, digitalisasi layanan publik menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efisiensi birokrasi dan aksesibilitas layanan. Uji kepatuhan hukum dan audit regulasi secara berkala dapat membantu mendeteksi potensi pelanggaran dan memperkuat tata kelola institusi (Biizaa.com, 2025). Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan juga menjadi elemen krusial dalam menciptakan legitimasi dan responsivitas institusi terhadap kebutuhan publik (PSHK, 2019; Amalinsani.org, 2025).

Dengan demikian, kualitas institusi adalah penentu fundamental dari kinerja ekonomi suatu negara. Tanpa reformasi kelembagaan yang kuat, kebijakan ekonomi sering kali tidak efektif dan rentan terhadap krisis, karena tidak mampu menjawab tantangan struktural dan dinamika global secara adaptif.

5.1.2 Hubungan antara Kelembagaan dan Inovasi Ekonomi

Hubungan antara kelembagaan dan inovasi ekonomi bersifat simbiotik dan menentukan daya saing ekonomi modern. Institusi yang kuat—baik formal maupun informal—berperan dalam menciptakan iklim bisnis yang kondusif bagi munculnya ide-ide baru, kewirausahaan, dan pengembangan teknologi (North, 1990).

Peran Institusi dalam Mendukung Inovasi.

Institusi ekonomi memainkan peran sentral dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi inovasi. Salah

satu fungsi utama kelembagaan adalah menyediakan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI), dan kejelasan aturan pasar—semua elemen yang sangat penting bagi investasi inovatif. Menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO), perlindungan HKI mendorong penciptaan nilai ekonomi melalui insentif terhadap kreativitas dan penemuan teknologi baru. Di Indonesia, perlindungan HKI diatur melalui berbagai undang-undang seperti UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang memberikan dasar hukum bagi pelaku usaha dan inovator untuk mengembangkan produk dan layanan berbasis teknologi (UMA.ac.id, 2025; Hukum.uma.ac.id, 2025).

Institusi yang adaptif juga berperan dalam menyeimbangkan kebebasan berinovasi dengan kepastian regulatif, menciptakan ruang tumbuh bagi startup teknologi dan sektor digital. Konsep ini tercermin dalam penerapan *regulatory sandbox* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, yang memungkinkan startup *fintech* menguji produk mereka dalam lingkungan yang terkontrol sebelum diatur secara penuh (TechForGoodInstitute.org, 2024). Pendekatan ini memberikan fleksibilitas regulasi tanpa mengorbankan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Di sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan juga menerapkan *sandbox* untuk inovasi digital medis, menunjukkan bahwa institusi publik mulai mengadopsi

model kebijakan yang lebih responsif terhadap perubahan teknologi (BloombergTechnoz.com, 2025).

Lebih jauh, institusi yang adaptif tidak hanya mengatur, tetapi juga memfasilitasi inovasi melalui digitalisasi layanan publik, harmonisasi regulasi, dan dukungan terhadap startup. Kompasiana (2025) mencatat bahwa ekosistem startup Indonesia berkembang pesat karena adanya dukungan kelembagaan seperti pembebasan pajak, kemudahan perizinan, dan akses terhadap pendanaan. Namun, tantangan tetap ada, seperti ketidakharmonisan regulasi antar lembaga dan rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha (Ejournal.goacademica.com, 2025).

Dengan demikian, kualitas institusi bukan hanya soal keberadaan aturan, tetapi juga kemampuan untuk bertransformasi secara dinamis dan mendukung inovasi secara berkelanjutan. Institusi yang mampu menggabungkan kepastian hukum dengan fleksibilitas kebijakan akan menjadi katalisator utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi.

Studi kasus kontras antara Singapura dan India menunjukkan bagaimana kualitas regulasi dan kelembagaan digital dapat menentukan arah pertumbuhan inovasi teknologi. Singapura berhasil menjelma sebagai pusat inovasi digital Asia melalui kombinasi regulasi yang ramah terhadap inovasi, sistem birokrasi digital yang efisien, dan insentif riset dan pengembangan (R&D) yang terstruktur. Inisiatif seperti Smart Nation dan platform identitas digital SingPass

memungkinkan warga mengakses lebih dari 1.700 layanan digital dari 400 lembaga pemerintah dan swasta secara terintegrasi (Kompasiana, 2025). Pemerintah Singapura juga mendorong adopsi teknologi mutakhir seperti AI, *blockchain*, dan cloud computing melalui GovTech dan IMDA, serta mengembangkan regulatory sandbox untuk mendukung startup teknologi (OpenGov Asia, 2024). Hasilnya, sektor *fintech* dan AI berkembang pesat, menjadikan Singapura sebagai magnet investasi teknologi di kawasan Asia Tenggara.

Sebaliknya, India menghadapi tantangan dalam sektor digital akibat ketidakpastian regulasi, terutama terkait kebijakan perpajakan digital dan aturan data localization. Pemerintah India menerapkan pajak tetap sebesar 30% atas keuntungan kripto dan TDS 1% atas transaksi, yang dinilai terlalu membebani investor dan pelaku startup (Cryptorobotics.ai, 2024). Selain itu, kebijakan data lokal yang mewajibkan penyimpanan data di dalam negeri menimbulkan kekhawatiran terhadap efisiensi operasional dan interoperabilitas global (*Blockchainmedia.id*, 2025). Meskipun India memiliki talenta digital yang besar dan ekosistem startup yang dinamis, ketidakpastian hukum dan regulasi yang fluktuatif memperlambat ekspansi dan menurunkan minat investor asing (Ekonomipedia.com, 2024).

Secara empiris, laporan IMF (2023) menunjukkan bahwa negara dengan regulasi pro-inovasi mencatat pertumbuhan investasi teknologi hingga 25% lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang menerapkan regulasi

restriktif atau tidak konsisten. Regulasi yang jelas, adaptif, dan mendukung inovasi terbukti menjadi katalisator utama dalam mendorong investasi dan pertumbuhan sektor teknologi digital.

Analisis Kebijakan: Regulasi yang fleksibel dan responsif terhadap kemajuan teknologi merupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan. Pemerintah perlu menciptakan kerangka kerja regulatif yang tidak hanya mengatur, tetapi juga memfasilitasi eksperimen dan inovasi. Salah satu pendekatan yang telah terbukti efektif adalah penerapan *regulatory sandbox*, seperti yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia dalam sektor *fintech*. *Sandbox* ini memungkinkan startup dan pelaku teknologi finansial untuk menguji produk mereka dalam lingkungan yang terkontrol, sambil tetap menjaga perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan (Wijaya, 2023; BloombergTechnoz.com, 2025). Namun, keberhasilan *sandbox* sangat bergantung pada kejelasan tujuan, mekanisme keluar, dan alokasi sumber daya yang memadai. Tanpa itu, *sandbox* berisiko menciptakan ketidakpastian hukum dan memperbesar beban regulatif bagi perusahaan kecil (CIPS, 2023).

Selain regulasi, institusi juga harus membangun infrastruktur digital yang inklusif dan adaptif. Menurut Arki Rifazka (2025), Indonesia telah membangun fondasi digital yang luas, tetapi masih menghadapi kesenjangan dalam penguasaan teknologi inti dan perlindungan kekayaan intelektual. Tanpa ekosistem HKI yang kuat,

Indonesia berisiko menjadi pengguna abadi teknologi impor. Oleh karena itu, penguatan sistem paten domestik dan insentif fiskal bagi perusahaan teknologi lokal menjadi sangat penting. Di sisi lain, sistem pendidikan teknologi juga harus diperkuat melalui kurikulum berbasis STEM, pelatihan digital untuk guru, dan integrasi literasi digital sejak dini (Tarumingkeng, 2025; RudyCT.com, 2025). Pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan industri digital akan menciptakan talenta yang siap bersaing secara global.

Dengan demikian, institusi yang baik bukan hanya penegak aturan, tetapi juga katalis inovasi. Negara yang mampu membangun kelembagaan pro-inovasi—melalui regulasi adaptif, infrastruktur digital, sistem pendidikan teknologi, dan perlindungan HKI—akan unggul dalam menarik talenta, modal, dan teknologi masa depan. IMF (2023) mencatat bahwa negara dengan regulasi pro-inovasi mencatat pertumbuhan investasi teknologi hingga 25% lebih tinggi dibandingkan negara dengan regulasi yang restriktif atau tidak konsisten.

5.1.3 Kasus Sukses Reformasi Institusi di Berbagai Negara

Reformasi kelembagaan merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kompetitif di era globalisasi. Ketika institusi—baik regulatif, yudikatif, maupun administratif—dibentuk atau diperbaiki untuk lebih mendukung efisiensi pasar, transparansi, dan inovasi, negara-negara cenderung

mencatat lonjakan investasi dan perbaikan indikator pembangunan manusia (North, 1990).

Reformasi kelembagaan telah terbukti menjadi katalis utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana ditunjukkan oleh studi kasus Tiongkok dan Georgia. Di Tiongkok, reformasi ekonomi yang dimulai pada tahun 1978 di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping menandai pergeseran besar dari sistem ekonomi terpusat menuju pasar terbuka. Kebijakan seperti liberalisasi harga, pembukaan terhadap investasi asing, dan pembentukan zona ekonomi khusus (SEZ) seperti Shenzhen, Zhuhai, dan Xiamen menjadi fondasi transformasi struktural yang masif. Reformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi tahunan rata-rata sebesar 9,5% selama periode 1978–2013, serta mengangkat lebih dari 800 juta orang dari kemiskinan (Wikipedia, 2024; Tempo.co, 2023; Made-in-China.com, 2025). Transformasi kelembagaan ini menjadikan Tiongkok sebagai kekuatan manufaktur global dan ekonomi terbesar kedua di dunia.

Sebaliknya, Georgia menunjukkan bagaimana reformasi kelembagaan yang radikal dapat mengubah negara yang sebelumnya dilanda korupsi menjadi salah satu negara dengan tata kelola terbaik di kawasan Eropa Timur. Setelah Revolusi Mawar tahun 2003, pemerintahan Mikheil Saakashvili meluncurkan reformasi besar-besaran, termasuk deregulasi izin usaha,

digitalisasi pelayanan publik, dan pemberantasan korupsi secara sistemik. Salah satu langkah paling mencolok adalah pemecatan lebih dari 30.000 polisi lalu lintas yang terlibat suap dalam satu malam, yang menjadi simbol komitmen terhadap reformasi antikorupsi (Kompas.com, 2025; Freedom-Institute.org, 2021). Reformasi ini menghasilkan lonjakan investasi asing langsung dan peningkatan signifikan dalam indeks kemudahan berbisnis versi *World Bank*, menjadikan Georgia sebagai model reformasi birokrasi yang efisien dan transparan (Zonamahasiswa.id, 2025; Wikipedia, 2024).

Secara empiris, laporan *World Economic Forum* (2024) menunjukkan bahwa negara yang berhasil menjalankan reformasi kelembagaan mencatat pertumbuhan ekonomi tahunan 2–3% lebih tinggi dibandingkan negara dengan institusi yang statis. Reformasi kelembagaan juga berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi makro, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan partisipasi pasar tenaga kerja yang lebih inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa institusi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan global bukan hanya memperkuat daya saing ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial secara luas.

Analisis Kebijakan: Keberhasilan reformasi institusi sangat bergantung pada tiga pilar utama: transparansi, inklusivitas, dan keberlanjutan politik. Transparansi menciptakan kepercayaan publik dan investor melalui perlindungan kontrak, penegakan hukum yang konsisten, serta akses informasi yang

terbuka. Inklusivitas memastikan bahwa reformasi tidak hanya menguntungkan elite, tetapi juga melibatkan masyarakat sipil, kelompok rentan, dan sektor informal dalam proses perumusan kebijakan. Friedrich-Ebert-Stiftung (2020) menekankan bahwa demokrasi yang berkelanjutan membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk media dan organisasi sipil, untuk menjaga legitimasi dan efektivitas reformasi kelembagaan. Sementara itu, keberlanjutan politik menjadi syarat agar reformasi tidak terhenti di tengah jalan akibat pergantian rezim atau tekanan populisme jangka pendek (Kumparan, 2023).

Penguatan lembaga antikorupsi seperti KPK, independensi peradilan, dan digitalisasi pelayanan publik merupakan contoh konkret dari reformasi yang meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi birokrasi. PWYP Indonesia (2021) menunjukkan bahwa kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah dalam reformasi tata kelola sumber daya ekstraktif berhasil meningkatkan transparansi dan partisipasi publik secara signifikan. Selain itu, keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan parlemen dan kebijakan publik telah menjadi katalisator reformasi struktural di berbagai negara, termasuk Indonesia (Kompasiana, 2025).

Negara-negara yang mendesain reformasi berdasarkan konteks lokal, namun tetap mengacu pada benchmark internasional yang progresif, terbukti mampu mempercepat transformasi ekonomi. Indonesia, misalnya, melalui RPJPN 2025–2045, mengintegrasikan

reformasi struktural dengan strategi transformasi ekonomi berbasis SDM, hilirisasi industri, dan digitalisasi birokrasi (Kemenko Perekonomian, 2023). Pendekatan ini tidak hanya menarik modal asing, tetapi juga memperkuat wirausaha lokal dan mendorong inovasi berbasis teknologi. PWMU.CO (2024) mencatat bahwa reformasi kelembagaan yang inklusif dan adaptif berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, stabilitas makroekonomi, dan partisipasi pasar tenaga kerja.

Dengan kata lain, reformasi kelembagaan yang berhasil bukan sekadar penataan ulang struktur birokrasi, tetapi merupakan katalis bagi daya saing global dan pembangunan ekonomi yang adil. Tanpa institusi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan, strategi ekonomi cenderung kehilangan daya dorong jangka panjang dan rentan terhadap stagnasi.

5.2 Regulasi, Korupsi, dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi

5.2.1 Regulasi Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing dan Investasi

Regulasi ekonomi yang efektif merupakan instrumen vital dalam membentuk iklim investasi, meningkatkan daya saing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ketika aturan yang mengatur sektor keuangan, perdagangan, dan tenaga kerja dirancang dengan efisien, regulasi mampu menjadi

katalis inovasi dan produktivitas, bukan hambatan (Mankiw, 2014).

Studi kasus Uni Eropa dan beberapa negara di Afrika menunjukkan dampak nyata dari kualitas regulasi terhadap arus investasi dan dinamika pembangunan ekonomi. Uni Eropa telah lama menonjol dengan kerangka regulatif yang stabil dan pro-pasar. Kebijakan seperti harmonisasi standar bisnis, kebebasan mobilitas modal, dan perlindungan data yang transparan melalui General Data Protection Regulation (GDPR) menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan aman. GDPR, yang mulai berlaku pada 2018, memberikan kontrol lebih besar kepada individu atas data pribadi mereka dan mewajibkan perusahaan untuk mematuhi standar perlindungan data yang ketat, sehingga meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum dan tata kelola digital Uni Eropa (Human Rights Watch, 2018; Hestanto, 2024). Stabilitas regulatif ini mendorong arus investasi lintas batas dan menjadikan kawasan Uni Eropa sebagai magnet bagi investor global, khususnya di sektor teknologi hijau, manufaktur canggih, dan keuangan digital (IBM, 2024; CCM, 2019).

Sebaliknya, beberapa negara di Afrika menghadapi hambatan investasi akibat regulasi yang kaku, birokrasi panjang, dan ketidakpastian hukum. Dalam sektor energi, pertanian, dan industri padat karya, kebijakan yang berbelit-belit dan tidak konsisten menyebabkan investor ragu untuk menanamkan modal. Laporan Dentons (2025) menunjukkan bahwa meskipun Afrika memiliki sumber

daya alam yang melimpah dan populasi muda yang besar, keuntungan ekonomi belum terwujud secara optimal karena sistem hukum yang rumit dan defisit infrastruktur. Ketidakpastian hukum juga menjadi penghalang utama, di mana investor khawatir terjerat kasus hukum akibat lemahnya penegakan aturan dan tumpang tindih regulasi (Hukumonline, 2025). Hal ini berdampak langsung pada ekspansi bisnis dan memperlambat pertumbuhan lapangan kerja di kawasan tersebut.

Secara empiris, IMF (2023) mencatat bahwa negara dengan regulasi investasi yang jelas dan konsisten mengalami peningkatan *Foreign Direct Investment* (FDI) hingga 50% dalam lima tahun, terutama di sektor manufaktur, infrastruktur, dan teknologi tinggi. Regulasi yang stabil dan transparan tidak hanya meningkatkan daya tarik investasi, tetapi juga memperkuat fondasi makroekonomi dan mempercepat transformasi struktural (IMF, 2023; DPR RI, 2024).

Analisis Kebijakan: Kepastian hukum dan konsistensi peraturan merupakan fondasi utama bagi keberhasilan reformasi ekonomi. Regulasi yang baik tidak hanya melindungi kepentingan publik, tetapi juga harus menghindari distorsi pasar dan disinsentif terhadap inovator. Dalam konteks ekonomi digital dan globalisasi, regulasi yang jelas dan stabil memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dan investor, serta memperkuat daya saing nasional. Studi oleh *World Economic Forum* (2024) menunjukkan bahwa negara dengan kerangka regulatif

yang konsisten mencatat pertumbuhan ekonomi tahunan 2–3% lebih tinggi dibanding negara dengan regulasi yang fluktuatif atau tidak sinkron.

Reformasi regulasi dapat diarahkan pada beberapa strategi utama. Pertama, penyederhanaan perizinan usaha dan digitalisasi layanan publik menjadi langkah krusial untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan kemudahan berusaha. Pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem *Online Single Submission* (OSS) dan memperbarui regulasi melalui PP No. 28 Tahun 2025, yang menyempurnakan klasifikasi risiko usaha dan memperkuat pengawasan administratif (BPLawyers, 2025). Kedua, penyesuaian standar tenaga kerja perlu dilakukan secara hati-hati: tetap melindungi hak-hak pekerja, namun fleksibel terhadap kebutuhan industri baru seperti ekonomi kreatif dan teknologi finansial. Ketiga, integrasi sistem perdagangan lintas batas—termasuk harmonisasi kepabeanan dan digitalisasi logistik—dapat mempercepat arus barang dan meningkatkan efisiensi rantai pasok global (LPKN, 2023).

Regulasi yang adaptif terhadap teknologi baru dan perubahan pasar menjadi syarat mutlak dalam era disrupsi digital. Salah satu pendekatan yang efektif adalah penggunaan *regulatory sandbox*, seperti yang diterapkan oleh OJK melalui POJK No. 3 Tahun 2024. Sandbox ini memungkinkan startup *fintech* dan inovator teknologi keuangan untuk menguji produk mereka dalam lingkungan yang terkontrol, sambil tetap menjaga stabilitas sistemik dan perlindungan konsumen (CIPS,

2023; *Fintech.id*, 2024)5. IMF (2023) mencatat bahwa negara dengan regulasi pro-inovasi mencatat peningkatan investasi teknologi hingga 25% lebih tinggi dibanding negara dengan regulasi yang restriktif atau tidak konsisten.

Dengan demikian, regulasi ekonomi bukan sekadar instrumen administratif, melainkan fondasi strategis untuk membentuk sistem ekonomi yang efisien, inovatif, dan kompetitif secara global. Reformasi regulasi yang dirancang secara kontekstual dan berbasis data dapat memperkuat ketahanan ekonomi, memperluas inklusi pasar, dan mendorong transformasi struktural yang berkelanjutan.

5.2.2 Dampak Korupsi terhadap Stabilitas Ekonomi dan Pertumbuhan

Korupsi merupakan hambatan struktural yang merusak efisiensi ekonomi, menurunkan kepercayaan pasar, dan memperlemah prospek pertumbuhan jangka panjang. Ketika penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi meluas, proses alokasi sumber daya terganggu dan ekonomi terjebak dalam inefisiensi sistemik (Mankiw, 2014).

1. Pengaruh terhadap Efisiensi Alokasi Ekonomi

Korupsi merupakan salah satu hambatan struktural paling serius dalam pembangunan ekonomi, karena menciptakan distorsi dalam distribusi sumber daya dan merusak efisiensi pasar. Ketika proyek-proyek dipilih

bukan berdasarkan analisis manfaat ekonomi, melainkan karena kepentingan pribadi atau imbalan suap, maka alokasi anggaran publik menjadi tidak optimal. Artikel oleh Captwapri (2025) menyoroti bahwa proyek pembangunan yang seharusnya menjadi simbol kemajuan justru berubah menjadi ladang korupsi, di mana dana publik dialihkan untuk memperkaya segelintir elit, bukan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas infrastruktur dan layanan publik, serta menghambat inovasi dan reformasi kelembagaan.

Lebih jauh, korupsi juga memperbesar biaya produksi melalui praktik suap dan pungutan liar (pungli), yang secara langsung menurunkan produktivitas pelaku usaha. Penelitian oleh Hartini et al. (2023) menunjukkan bahwa korupsi berdampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena menghambat investasi dan menciptakan ketidakpastian hukum. Biaya tambahan seperti suap dan pungli menjadi beban berat bagi pelaku usaha kecil dan asing yang tidak memiliki akses politik atau jaringan patronase. Mereka harus membayar lebih untuk memperoleh izin usaha, mempercepat proses birokrasi, atau menghindari gangguan dari oknum tertentu. Studi oleh Alfaridzi et al. (2023) mengungkap bahwa pungli menyebabkan kenaikan biaya produksi dan perdagangan, sehingga harga barang dan jasa menjadi lebih mahal dan daya saing menurun.

Dalam jangka panjang, korupsi menciptakan lingkungan bisnis yang tidak sehat, menurunkan kepercayaan investor, dan memperburuk ketimpangan sosial. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi bukan hanya isu moral, tetapi juga strategi ekonomi yang krusial untuk menciptakan sistem distribusi sumber daya yang efisien dan adil.

2. Dampak terhadap Kepercayaan Pasar dan Investasi

Korupsi menciptakan ketidakpastian hukum dan regulasi yang berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan investor, baik asing maupun domestik. Ketika sistem hukum tidak dapat diandalkan dan praktik peradilan dapat dibeli, investor menghadapi risiko tinggi dalam menanamkan modal. Transparency International (2025) menempatkan Indonesia pada peringkat rendah dalam Indeks Persepsi Korupsi, mencerminkan lemahnya transparansi dan tingginya praktik suap di sektor publik, yang menghambat kepastian hukum dan efektivitas regulasi (Kompasiana, 2025).

Ketidakpastian ini diperparah oleh laporan CSIS yang mencatat lebih dari 19.000 regulasi hanya di tingkat kementerian, belum termasuk di daerah, menciptakan tumpang tindih dan kebingungan dalam implementasi kebijakan (CSIS, 2025). Investor cenderung menghindari negara dengan sistem hukum yang lemah, laporan keuangan publik yang tidak transparan, dan proses peradilan yang dapat dimanipulasi. Kasus manipulasi

laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018 menjadi contoh nyata bagaimana pelanggaran terhadap prinsip transparansi dapat mengguncang kepercayaan pasar dan memicu penurunan tajam harga saham (Universitas Tarumanagara, 2025).

IMF (2023) mencatat bahwa negara dengan regulasi investasi yang jelas dan konsisten mengalami peningkatan *Foreign Direct Investment* (FDI) hingga 50% dalam lima tahun, terutama di sektor manufaktur, infrastruktur, dan teknologi tinggi. Sebaliknya, negara yang gagal menjamin kepastian hukum dan transparansi akan terus kehilangan peluang investasi dan mengalami stagnasi ekonomi. Oleh karena itu, reformasi sistem hukum dan penguatan lembaga antikorupsi menjadi syarat mutlak untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Studi kasus Brasil dan negara-negara Nordik seperti Denmark dan Finlandia menunjukkan kontras tajam dalam dampak kelembagaan terhadap iklim investasi dan stabilitas ekonomi. Di Brasil, skandal korupsi besar-besaran yang melibatkan perusahaan minyak negara Petrobras mengguncang fondasi ekonomi dan politik nasional. Investigasi terhadap lebih dari 80 pejabat dan eksekutif teras mengungkap praktik suap dan pencucian uang yang melibatkan miliaran dolar, serta keterlibatan politisi senior dan perusahaan konstruksi besar dalam kartel proyek infrastruktur. Akibatnya, Petrobras mencatat kerugian hingga USD 7,2 miliar¹, menghadapi tuntutan hukum internasional senilai USD 2,95 miliar di

Amerika Serikat³, dan kehilangan akses terhadap pasar obligasi. Popularitas Presiden Dilma Rousseff merosot tajam, peringkat kredit Brasil diturunkan, dan terjadi pelarian investasi besar-besaran yang memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional¹.

Sebaliknya, negara Nordik seperti Denmark dan Finlandia menunjukkan bagaimana integritas institusi dapat menjadi katalisator pembangunan. Transparency International (2023) menempatkan Denmark dan Finlandia di peringkat pertama dan kedua dalam Indeks Persepsi Korupsi global, masing-masing dengan skor 90 dan 87 dari 1005. Denmark menerapkan undang-undang kebebasan informasi yang memungkinkan publik mengakses data pengeluaran pemerintah secara transparan, sementara Finlandia menanamkan nilai-nilai integritas sejak pendidikan dasar dan memiliki sistem peradilan yang cepat dan tegas dalam menangani korupsi⁶. Budaya transparansi dan pengawasan publik yang kuat di kedua negara ini berbanding lurus dengan stabilitas fiskal, peringkat investasi tinggi, dan kemajuan dalam sektor teknologi hijau, manufaktur canggih, serta keuangan digital⁵.

Secara empiris, *Transparency International* (2023) mencatat bahwa negara dengan tingkat korupsi tinggi mengalami penurunan investasi asing langsung hingga 30% dibandingkan negara dengan regulasi antikorupsi yang efektif. Ketika sistem hukum lemah dan laporan keuangan publik tidak transparan, investor cenderung menghindari risiko politikal dan ketidakpastian regulatif.

Sebaliknya, institusi yang bersih dan adaptif menciptakan kepercayaan pasar, memperkuat daya saing, dan mendorong inovasi ekonomi jangka panjang⁹.

Analisis Kebijakan: Kebijakan antikorupsi yang efektif harus bersifat sistemik dan tegas, mencakup penguatan kelembagaan, transparansi proses, dan digitalisasi birokrasi. Penguatan lembaga pengawas independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi krusial dalam menjaga integritas sistem hukum dan mencegah intervensi politik dalam penegakan hukum. Laporan Kementerian PPN/Bappenas (2024) menekankan bahwa desain kelembagaan antikorupsi harus menjamin independensi, kapasitas teknis, dan akuntabilitas publik agar lembaga pengawas dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah juga menjadi titik krusial dalam mencegah korupsi. LKPP (2025) mendorong digitalisasi penuh dalam proses pengadaan melalui sistem e-katalog, *e-purchasing*, dan SPSE, serta pemanfaatan teknologi seperti AI dan machine learning untuk mendeteksi pola belanja yang tidak wajar dan potensi penyimpangan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi belanja negara, tetapi juga memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan anggaran.

Reformasi birokrasi berbasis digital atau *e-government* menjadi strategi penting untuk mengurangi interaksi tatap muka yang rawan suap. Kementerian PANRB (2024) menyatakan bahwa transformasi digital

melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan SIPD telah meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan publik, sekaligus mencegah kebocoran anggaran dan memperkuat pengambilan kebijakan berbasis data.

Regulasi yang transparan dan penegakan hukum yang adil berkontribusi langsung terhadap kepastian usaha dan daya saing global. *MediaIndonesia.com* (2025) mencatat bahwa deregulasi dan harmonisasi regulasi menjadi keharusan untuk menjaga daya saing nasional di tengah dinamika ekonomi global. Stabilitas politik dan kepastian hukum juga menjadi syarat utama dalam membangun iklim investasi yang sehat, sebagaimana ditegaskan oleh KADIN Indonesia (2025), karena investor cenderung menghindari negara dengan sistem hukum yang lemah dan regulasi yang tidak konsisten⁵.

Dengan demikian, pemberantasan korupsi bukan hanya agenda moral, tetapi juga strategi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan berkualitas, investasi berkelanjutan, dan stabilitas fiskal. IMF (2023) mencatat bahwa negara dengan regulasi investasi yang jelas dan konsisten mengalami peningkatan FDI hingga 50% dalam lima tahun, terutama di sektor manufaktur, infrastruktur, dan teknologi tinggi. Reformasi kelembagaan dan regulatif yang adaptif terhadap teknologi dan perubahan pasar menjadi fondasi strategis bagi sistem ekonomi yang inklusif dan kompetitif.

5.2.3 Transparansi Kebijakan dan Pengaruhnya terhadap Kepercayaan Pasar

Transparansi kebijakan memainkan peran fundamental dalam membangun kepercayaan pasar, menarik investasi, dan menjaga stabilitas ekonomi makro. Ketika pelaku ekonomi memahami arah kebijakan pemerintah dan dapat memprediksi respons kebijakan terhadap kondisi pasar, ketidakpastian berkurang dan kepercayaan meningkat (Mankiw, 2014).

Transparansi dalam kebijakan ekonomi memainkan peran strategis dalam memperkuat akuntabilitas pemerintah dan menciptakan iklim investasi yang sehat. Ketika pemerintah secara terbuka menyampaikan informasi fiskal, moneter, dan regulatif, pengambilan keputusan menjadi lebih berbasis data dan dapat dipertanggungjawabkan. OECD (2024) mencatat bahwa negara dengan kebijakan yang transparan memiliki indeks kepercayaan pasar hingga 20% lebih tinggi dibandingkan negara dengan kebijakan yang tidak akuntabel, serta mengalami volatilitas investasi yang lebih rendah. Transparansi juga memfasilitasi partisipasi publik, memperkuat legitimasi kebijakan, dan mengurangi ruang bagi korupsi serta penyalahgunaan anggaran.

Studi kasus Jepang menunjukkan bagaimana reformasi kebijakan publik yang berorientasi pada transparansi dapat meningkatkan kepercayaan pasar. Pemerintah Jepang menyusun anggaran fiskal secara

lebih terbuka, dengan pelaporan yang terstandarisasi dan komunikasi bank sentral yang konsisten. Pada tahun fiskal 2025, Jepang merancang anggaran sebesar ¥115 triliun (US\$732 miliar), dengan alokasi yang jelas dan prediktif terhadap sektor lansia, pertahanan, dan revitalisasi daerah⁵. Bank of Japan juga menjaga kredibilitas kebijakan moneter melalui komunikasi yang transparan, termasuk proyeksi suku bunga dan inflasi. Hasilnya, Jepang mampu mempertahankan daya saing industri meskipun menghadapi tekanan demografis dan deflasi.

Sebaliknya, Argentina menghadapi instabilitas keuangan yang dipicu oleh inkonsistensi dan kurangnya transparansi kebijakan ekonomi. Pemerintah Argentina menerapkan kontrol mata uang yang ketat, regulasi ekspor yang berubah-ubah, dan perjanjian utang luar negeri yang tidak jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan regulatif⁹. IMF bahkan mensyaratkan Argentina untuk mengurangi kontrol mata uang sebagai bagian dari paket pinjaman senilai USD 20 miliar, guna memulihkan kepercayaan pasar dan mendorong reformasi struktural. Akibatnya, Argentina mengalami fluktuasi nilai tukar, peningkatan risiko negara, dan penurunan arus masuk investasi asing langsung hingga 30% dalam lima tahun terakhir.

Dengan demikian, transparansi bukan sekadar prinsip etika pemerintahan, tetapi merupakan fondasi strategis dalam membentuk sistem ekonomi yang efisien, inklusif, dan kompetitif secara global. Negara yang

mampu mengintegrasikan transparansi dalam desain kebijakan publik akan lebih unggul dalam menarik investasi, membangun kepercayaan pasar, dan menjaga stabilitas fiskal jangka panjang.

Analisis Kebijakan: Reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan transparansi telah menjadi agenda strategis di banyak negara, karena transparansi bukan hanya atribut moral pemerintahan yang baik, tetapi juga instrumen ekonomi yang memperkuat stabilitas, kredibilitas, dan pertumbuhan jangka panjang. OECD (2024) menekankan bahwa transparansi fiskal dan regulatif menciptakan ekspektasi yang jelas di kalangan pelaku pasar, mengurangi volatilitas investasi, dan meningkatkan indeks kepercayaan hingga 20% dibanding negara dengan kebijakan yang tidak akuntabel. Dalam era informasi cepat, kejelasan kebijakan lebih dihargai daripada retorika, karena investor dan masyarakat membutuhkan sinyal yang dapat diandalkan untuk mengambil keputusan ekonomi.

Langkah-langkah reformasi yang krusial meliputi standarisasi pelaporan keuangan publik dan kinerja anggaran, yang memungkinkan perbandingan lintas waktu dan antar institusi. Permendagri No. 77 Tahun 2020, misalnya, mendorong penggunaan sistem e-budgeting dan ERP untuk menyajikan data fiskal secara real-time dan terintegrasi, sehingga publik dapat memantau realisasi anggaran secara langsung (Diklat LPKN, 2025). Selain itu, penguatan lembaga audit dan pengawasan fiskal independen seperti BPK dan APIP

menjadi penting untuk menjamin akurasi dan integritas laporan keuangan. Nasution (2009) menekankan bahwa pemeriksaan eksternal yang independen harus dilakukan berdasarkan standar baku dan hasilnya tersedia secara terbuka untuk publik, guna memperkuat akuntabilitas fiskal.

Reformasi juga mencakup komunikasi kebijakan moneter yang rutin, terbuka, dan berbasis indikator ekonomi makro. Jepang, misalnya, berhasil mempertahankan kepercayaan pasar melalui pelaporan fiskal yang terstandardisasi dan komunikasi Bank of Japan yang konsisten mengenai proyeksi suku bunga dan inflasi (BloombergTechnoz.com, 2023; Tribunnews.com, 2024). Pendekatan ini menciptakan prediktabilitas kebijakan dan memperkuat kredibilitas institusi moneter.

Di sisi teknologi, penggunaan e-governance dan portal data terbuka menjadi katalis transparansi. Portal seperti Semarang Satu Data dan SPBE nasional memungkinkan masyarakat mengakses informasi publik secara cepat dan interaktif, memperkuat partisipasi dan respons pasar terhadap kebijakan (Undip, 2024; Ombudsman RI, 2025). Klungkung dan Lampung Timur, misalnya, menunjukkan bahwa keterbukaan informasi melalui website resmi pemerintah meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas pengawasan publik (Neliti.com, 2024; UT, 2017).

Dengan demikian, reformasi tata kelola ekonomi yang berorientasi pada transparansi bukan hanya memperbaiki kualitas pemerintahan, tetapi juga

memperkuat fondasi makroekonomi dan daya saing global. Negara yang mampu mengintegrasikan transparansi dalam desain kebijakan publik akan lebih unggul dalam menarik investasi, membangun kepercayaan pasar, dan menjaga stabilitas fiskal jangka panjang.

5.3 Ekonomi Politik dan Pengaruh Kebijakan terhadap Stabilitas Makro

5.3.1 Interaksi antara Ekonomi dan Kebijakan Politik

Interaksi antara ekonomi dan kebijakan politik merupakan fondasi keseimbangan pembangunan nasional. Kebijakan ekonomi, baik fiskal maupun moneter, tidak dapat dipisahkan dari stabilitas dan dinamika politik karena keduanya saling memengaruhi secara timbal balik. Stabilitas politik memberikan kepastian arah kebijakan, sedangkan gejolak politik dapat melemahkan efektivitas instrumen ekonomi (Mankiw, 2014).

Hubungan antara Kebijakan Ekonomi dan Stabilitas Politik. Stabilitas politik merupakan fondasi penting dalam menciptakan kepercayaan pasar dan memperkuat efektivitas kebijakan ekonomi. Ketika pemerintahan memiliki mandat politik yang kuat dan kebijakan ekonomi dijalankan secara konsisten, investor merespons dengan optimisme. Hal ini tercermin dalam peningkatan arus investasi, penguatan nilai tukar, dan

pertumbuhan konsumsi domestik. Studi oleh Bizhare (2024) menunjukkan bahwa stabilitas politik mendorong keputusan investasi jangka panjang, terutama di sektor infrastruktur dan industri berat, karena investor merasa yakin terhadap arah kebijakan dan kepastian hukum.

Sebaliknya, ketidakpastian politik dapat mengganggu ekspektasi ekonomi dan menciptakan volatilitas pasar. Ketika kebijakan berubah secara mendadak atau terjadi konflik politik, investor cenderung menunda atau menarik investasi mereka, memicu fenomena capital flight. OCBC (2023) mencatat bahwa pelarian modal besar-besaran dari negara yang mengalami ketidakstabilan politik dapat menyebabkan depresiasi mata uang, penurunan cadangan devisa, dan meningkatnya risiko kebangkrutan. Ketidakpastian juga membatasi ruang fiskal dan moneter, karena pemerintah kesulitan merancang kebijakan jangka panjang di tengah tekanan politik dan fluktuasi pasar³.

Dalam konteks Indonesia, PMII (2025) mencatat bahwa fluktuasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan arus keluar modal asing selama periode politik yang tidak stabil menunjukkan korelasi langsung antara ketidakpastian politik dan penurunan kepercayaan pasar. Oleh karena itu, stabilitas politik bukan hanya isu tata kelola, tetapi juga instrumen strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan daya saing global.

Studi kasus Brexit dan Vietnam menunjukkan bagaimana stabilitas politik berpengaruh terhadap kinerja ekonomi secara signifikan. Proses keluarnya

Inggris dari Uni Eropa (Brexit) memunculkan ketidakpastian tinggi terhadap arah kebijakan perdagangan, perpajakan, dan regulasi keuangan. Kompas.com (2023) menjelaskan bahwa akibat ketidakpastian tersebut, terjadi volatilitas nilai tukar dan penundaan investasi, serta gangguan rantai pasok yang menekan pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Bank of England (2025, dikutip oleh Namaguerizka.com) bahkan harus merespons dengan kebijakan moneter pelonggaran, namun dampak struktural terhadap produktivitas tetap bertahan.

Sebaliknya, Vietnam menunjukkan bagaimana konsistensi kepemimpinan dan stabilitas politik menjadi fondasi pertumbuhan jangka panjang. Sejak reformasi *Đổi Mới* tahun 1986, Vietnam memadukan kendali politik terpusat dengan liberalisasi ekonomi yang strategis. JurnalPatroliNews (2025) mencatat bahwa negara ini mencatat pertumbuhan PDB stabil di atas 6%, didorong oleh keterbukaan perdagangan, penyederhanaan birokrasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Data dari Katadata.co.id (2025) bahkan menunjukkan bahwa pada tahun terakhir, Vietnam meraih pertumbuhan hingga 7,09%, menjadikannya salah satu magnet investasi asing utama di ASEAN. Stabilitas kebijakan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor global yang mengutamakan prediktabilitas regulasi.

Secara empiris, *World Economic Forum* (2023) mencatat bahwa negara dengan tingkat stabilitas politik

yang tinggi mencatat pertumbuhan ekonomi tahunan lebih dari 3% lebih tinggi dibandingkan negara dengan konflik politik aktif. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola politik bukan sekadar elemen pelengkap, melainkan komponen fundamental dalam membentuk ekspektasi ekonomi, kredibilitas kebijakan, dan efektivitas fiskal serta moneter.

Analisis Kebijakan: Stabilitas politik merupakan prasyarat fundamental bagi kredibilitas kebijakan ekonomi, terutama dalam konteks reformasi struktural yang menuntut konsistensi dan dukungan lintas sektor. Ketika pemerintah memiliki mandat politik yang kuat dan arah kebijakan yang jelas, kebijakan fiskal seperti reformasi pajak, pengurangan subsidi, atau penataan belanja negara dapat diterapkan secara efektif. Laporan Kementerian Keuangan (2025) menekankan bahwa reformasi fiskal 2026 diarahkan untuk menjaga kredibilitas APBN melalui peningkatan penerimaan negara, efisiensi belanja, dan pengelolaan aset strategis, yang hanya mungkin dicapai jika stabilitas politik terjaga.

Independensi bank sentral dan lembaga fiskal juga sangat bergantung pada kerangka politik yang stabil dan tidak intervensif. Ketika tekanan politik jangka pendek mendominasi, kebijakan moneter berisiko kehilangan fokus jangka panjangnya, seperti pengendalian inflasi atau stabilitas nilai tukar. Sugiharso Safuan (2023) dalam pidato pengukuhannya di Universitas Indonesia menegaskan bahwa independensi bank sentral adalah syarat mutlak untuk menjaga kredibilitas kebijakan

moneter dan menghindari politisasi suku bunga atau pengelolaan cadangan devisa. Dalam praktiknya, koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter harus dilakukan secara harmonis, namun tetap menjaga batas independensi kelembagaan.

Lebih jauh, dialog sosial, transparansi pengambilan keputusan, dan sistem checks and balances menjadi mekanisme penting untuk menciptakan kohesi antara ekonomi dan politik. Sistem checks and balances, seperti yang dijelaskan oleh Sunarto (2024), memastikan bahwa kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif saling mengontrol dan menjaga keseimbangan, sehingga kebijakan ekonomi tidak terjebak dalam dominasi satu lembaga. Dalam konteks Indonesia, keterlibatan masyarakat sipil dan lembaga pengawas seperti DPR dan Mahkamah Konstitusi menjadi penentu legitimasi sosial terhadap kebijakan publik, termasuk dalam isu-isu strategis seperti reformasi subsidi atau pengelolaan utang negara.

Dengan demikian, ekonomi yang kokoh membutuhkan pondasi politik yang stabil, adaptif, dan responsif terhadap tantangan zaman. Tanpa stabilitas politik, kepercayaan pasar akan melemah, dan legitimasi sosial terhadap kebijakan publik akan tergerus. *World Economic Forum* (2023) mencatat bahwa negara dengan stabilitas politik tinggi mencatat pertumbuhan ekonomi tahunan lebih dari 3% lebih tinggi dibanding negara dengan konflik politik aktif, menunjukkan bahwa tata kelola politik bukan hanya pelengkap, tetapi komponen

inti dalam membentuk fundamental ekonomi jangka panjang.

5.3.2 Peran Kebijakan Publik dalam Menjaga Keseimbangan Ekonomi

Kebijakan publik memegang peran sentral dalam menjaga keseimbangan ekonomi, khususnya di tengah ketidakpastian global dan dinamika siklus bisnis. Melalui intervensi strategis yang menggabungkan efisiensi pasar dan perlindungan sosial, pemerintah dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan (Mankiw, 2014).

Dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi, pemerintah memainkan peran sentral sebagai stabilisator makroekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi. Kebijakan fiskal, seperti pengaturan anggaran negara, digunakan untuk menjaga konsumsi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, kebijakan moneter yang dijalankan oleh bank sentral bertujuan mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, dan memastikan likuiditas yang cukup di pasar keuangan (Tarumingkeng, 2025; Bank Indonesia, 2024). Dalam situasi krisis seperti resesi atau pandemi, pemerintah mengaktifkan instrumen seperti program jaminan sosial, subsidi, dan stimulus fiskal untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mencegah pelemahan ekonomi yang lebih dalam (DJPB, 2025; Republika, 2025).

Studi kasus Uni Eropa menunjukkan efektivitas sistem kesejahteraan sosial yang kuat dalam meredam dampak krisis. Negara-negara seperti Jerman, Prancis, dan Finlandia menerapkan jaminan kesehatan universal, asuransi pengangguran, dan tunjangan keluarga yang bersifat otomatis dan responsif terhadap siklus ekonomi. Saat krisis keuangan 2008 dan pandemi COVID-19 melanda, sistem ini berfungsi sebagai bantalan sosial yang menjaga stabilitas makro dan mencegah lonjakan kemiskinan (Kompasiana, 2024; UNDP, 2024). Di Prancis, misalnya, pengeluaran perlindungan sosial mencapai 33,3% dari PDB, mencerminkan komitmen terhadap redistribusi dan inklusi sosial (Issartel & Hardini, 2023).

Sebaliknya, negara-negara miskin sering kali menghadapi keterbatasan fiskal, birokrasi lemah, dan kurangnya data penerima manfaat yang menghambat efektivitas kebijakan sosial. Ketidaktepatan sasaran, duplikasi program, dan rendahnya kapasitas kelembagaan menyebabkan bantuan tidak menjangkau kelompok yang paling rentan. Hal ini memperlebar ketimpangan sosial dan memperkuat siklus kemiskinan yang sulit diputus (SMERU, 2023; Bappenas, 2022). Dalam konteks ini, reformasi tata kelola data dan penguatan kapasitas fiskal menjadi prasyarat untuk membangun sistem perlindungan sosial yang inklusif dan adaptif.

Secara empiris, IMF (2024) mencatat bahwa negara dengan sistem kesejahteraan sosial yang kuat memiliki tingkat kemiskinan 30% lebih rendah dibanding negara

dengan sistem yang lemah. Sistem ini juga berkorelasi positif dengan stabilitas politik dan daya beli masyarakat, menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih tahan terhadap guncangan eksternal dan lebih kondusif bagi pertumbuhan inklusif (UNDP, 2024; *World Bank*, 2023).

Analisis Kebijakan: Kebijakan ekonomi berbasis kesejahteraan sosial berperan penting dalam menciptakan stabilitas makroekonomi melalui distribusi risiko yang lebih adil. Ketika pemerintah menyediakan jaminan sosial yang terintegrasi dan bantuan tunai terarah, masyarakat memiliki perlindungan terhadap guncangan ekonomi, sehingga konsumsi rumah tangga tetap terjaga. Hal ini menciptakan permintaan agregat yang berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada intervensi darurat jangka pendek seperti stimulus fiskal mendadak saat krisis (Wulandari et al., 2023; Citra Wulandari Manik et al., 2023). Dalam jangka panjang, sistem kesejahteraan sosial yang kuat berfungsi sebagai automatic stabilizer yang menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan inklusif.

Untuk mencapai efisiensi fiskal tanpa mengorbankan inklusi sosial, pemerintah perlu merancang kebijakan yang berbasis data, inklusif, dan adaptif. Strategi seperti digitalisasi bantuan sosial, pemanfaatan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan pemetaan kerentanan sosial menjadi kunci dalam memastikan bahwa bantuan benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan (Maliki, 2024; Sejalin FISIPOL UGM, 2024). Subsidi produktif di sektor

pendidikan dan kesehatan, seperti Program Indonesia Pintar dan Jaminan Kesehatan Nasional, tidak hanya meningkatkan kualitas SDM, tetapi juga memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang (DJPPR, 2018; Bappenas, 2025).

Investasi dalam sistem perlindungan sosial bukanlah beban anggaran, melainkan modal pembangunan. Arief Anshory Yusuf (2025) menegaskan bahwa bansos harus dipahami sebagai instrumen untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan membangun fondasi kesejahteraan masa depan. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan Rp503,2 triliun dalam APBN 2025 untuk perlindungan sosial, mencerminkan komitmen terhadap pembangunan yang adil dan berkelanjutan (DJPB, 2025; Radar Sampit, 2025). IMF (2024) mencatat bahwa negara dengan sistem kesejahteraan sosial yang kuat memiliki tingkat kemiskinan 30% lebih rendah dan stabilitas politik yang lebih tinggi dibanding negara dengan sistem yang lemah.

Dengan demikian, kebijakan publik yang pro-keadilan dan berorientasi kesejahteraan menjadi kunci untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga adil, inklusif, dan tahan terhadap krisis. Dalam era disrupsi dan ketidakpastian global, pendekatan ini bukan hanya etis, tetapi juga strategis.

5.3.3 Tantangan Kebijakan Ekonomi dalam Menghadapi Gejolak Politik Global

Gejolak politik global menimbulkan tantangan serius bagi stabilitas ekonomi, kinerja perdagangan, dan efektivitas kebijakan makroekonomi suatu negara. Dalam dekade terakhir, eskalasi konflik geopolitik, perang dagang, dan pergeseran kebijakan ekonomi global telah meningkatkan kerentanan pasar dan memaksa pemerintah serta bank sentral untuk merancang strategi responsif yang kompleks (Mankiw, 2014).

Gejolak politik global dalam dekade terakhir telah memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi internasional. Salah satu kasus utama adalah perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang dimulai pada 2018. Kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan oleh AS terhadap produk teknologi dan manufaktur Tiongkok menyebabkan penurunan arus perdagangan global dan gangguan serius pada rantai pasok internasional. Sebagai respons, Tiongkok memperketat ekspor bahan strategis seperti rare earth minerals, yang berdampak langsung pada sektor elektronik dan pertahanan di AS serta negara-negara lain yang bergantung pada pasokan tersebut (Zadeh, 2025; Prasodjo & Sintawati, 2024).

Konflik geopolitik lainnya yang memicu ketidakseimbangan ekonomi global adalah invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat terhadap Rusia menyebabkan

terganggunya pasokan energi, terutama minyak dan gas alam. Menurut International Energy Agency (IEA), harga gas alam di Eropa melonjak hingga 250% sejak awal 2022, memicu inflasi tinggi di kawasan tersebut dan di Amerika Serikat (IEA, 2024). Lonjakan harga energi memperburuk biaya hidup dan mendorong bank sentral seperti European Central Bank dan *Federal Reserve* untuk menaikkan suku bunga secara agresif, yang pada gilirannya menekan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan risiko resesi (Kompas, 2024; IMF, 2024).

Sementara itu, Brexit—keluarnya Inggris dari Uni Eropa—menimbulkan ketidakpastian hukum dan regulasi yang berkepanjangan. Dampaknya terasa pada pasar tenaga kerja, nilai tukar pound sterling, dan pertumbuhan ekonomi. OECD mencatat bahwa PDB Inggris mengalami penurunan sebesar 5% dalam lima tahun pertama pasca-Brexit, disertai pelemahan ekspor dan investasi asing langsung (OECD, 2023; Anshari & Rusdiyanta, 2023).

Secara empiris, IMF melaporkan bahwa ekspor AS ke Tiongkok turun sebesar 17% dalam dua tahun akibat kebijakan tarif perdagangan, mencerminkan dampak nyata dari proteksionisme terhadap volume perdagangan bilateral (IMF, 2023). Di sisi lain, Swiss menunjukkan ketahanan ekonomi yang luar biasa. Negara tersebut berhasil mempertahankan pertumbuhan PDB positif dalam 80% krisis global berkat sistem ekonomi yang stabil, kebijakan fiskal yang prudent, dan posisi netral dalam konflik internasional (IMF, 2024).

Berbagai negara menerapkan strategi stabilitas ekonomi yang kontekstual dan adaptif terhadap tantangan global. Jepang mengandalkan quantitative easing (QE) jangka panjang dan diversifikasi rantai pasok ke ASEAN dan Afrika untuk menjaga likuiditas dan mengurangi ketergantungan pada Tiongkok. Amerika Serikat merespons inflasi energi dengan kenaikan suku bunga agresif dan komunikasi kebijakan yang transparan untuk menjaga ekspektasi pasar dan kredibilitas dolar. Sementara itu, Swiss mempertahankan stabilitas melalui netralitas politik, kebijakan fiskal konservatif, dan perlindungan sektor perbankan, menjadikannya safe haven bagi investor global.

Ketiga pendekatan ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi tidak hanya bergantung pada instrumen teknis seperti suku bunga atau stimulus fiskal, tetapi juga pada kredibilitas kelembagaan, strategi komunikasi, dan posisi geopolitik yang dijaga secara konsisten.

Analisis Kebijakan: Dalam menghadapi gejolak politik global, diversifikasi perdagangan dan investasi menjadi strategi krusial untuk mengurangi kerentanan ekonomi. Ketergantungan pada satu mitra ekonomi, seperti ekspor tunggal ke Tiongkok atau pasokan energi dari Rusia, terbukti meningkatkan risiko ketika terjadi konflik atau ketegangan geopolitik. Studi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan RI (2025) menunjukkan bahwa perang dagang AS-Tiongkok telah menyebabkan gangguan rantai pasok global dan

penurunan ekspor Indonesia ke Tiongkok sebesar 2,6% pada 2019, sementara harga komoditas energi seperti batu bara juga anjlok hingga 30%. Menteri Keuangan Sri Mulyani (2025) menegaskan bahwa Indonesia harus memperluas mitra dagang dan investasi ke kawasan seperti Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah untuk mengurangi eksposur terhadap risiko eksternal.

Di sisi kebijakan makro, moneter dan fiskal harus bersifat adaptif terhadap fluktuasi global. Bank Indonesia (2025) mempertahankan BI-Rate di level 5,50% sambil mengoptimalkan kebijakan makroprudensial untuk menjaga likuiditas dan stabilitas nilai tukar di tengah ketidakpastian global. Strategi cadangan devisa juga diperkuat, dengan posisi cadangan mencapai USD 152,5 miliar pada Mei 2025, setara dengan 6,4 bulan impor. Sementara itu, kebijakan fiskal diarahkan untuk menjaga daya beli dan mendukung sektor prioritas melalui stimulus yang tepat sasaran, seperti subsidi transportasi dan bantuan sosial.

Perlindungan terhadap industri strategis—terutama energi, pangan, dan keuangan—menjadi prioritas dalam menjaga ketahanan ekonomi. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan safeguard dan antidumping untuk melindungi industri padat karya dari persaingan tidak sehat, serta memperkuat cadangan pangan nasional melalui pengembangan food estate dan diversifikasi sumber impor⁶. Strategi ini juga mencakup insentif fiskal untuk sektor energi baru terbarukan dan penguatan sistem logistik nasional.

Lebih jauh, kerja sama ekonomi regional seperti ASEAN dan Uni Eropa menjadi fondasi penting bagi resilien ekonomi. Uni Eropa, melalui program ARISE+ dan CEPA, mendukung integrasi perdagangan Indonesia dalam rantai nilai global dan mendorong reformasi kebijakan ekspor serta fasilitasi perdagangan⁹. Di ASEAN, Indonesia aktif memperkuat konektivitas pasar dan harmonisasi regulasi untuk meningkatkan daya saing kawasan. OECD (2023) mencatat bahwa negara dengan integrasi ekonomi regional yang kuat cenderung memiliki stabilitas fiskal lebih tinggi dan volatilitas investasi yang lebih rendah.

Dengan demikian, kebijakan ekonomi yang tangguh terhadap gejolak politik global menuntut strategi yang lincah, diversifikasi mitra dan sumber daya, serta koordinasi internasional yang kuat. Negara-negara yang mampu menavigasi ketidakpastian ini dengan kebijakan yang adaptif dan kredibel akan bertahan dan bahkan tumbuh di tengah turbulensi global.

BAB 6.

EKONOMI GLOBAL DAN INTEGRASI INTERNASIONAL

Learning Objectives:

1. Menjelaskan dampak ekonomi global terhadap ekonomi domestic.
2. Menganalisis peran lembaga ekonomi global, seperti IMF, WTO, dan Bank Dunia dalam menjaga stabilitas keuangan dan perdagangan internasional.
3. Mengevaluasi intervensi lembaga internasional dan memahami kebijakan proteksionisme dan perdagangan bebas.
4. Menilai dampak tarif perdagangan terhadap stabilitas ekonomi, termasuk strategi negosiasi perjanjian internasional dalam meningkatkan daya saing ekonomi.
5. Mengaitkan integrasi ekonomi internasional dengan tantangan global, seperti digitalisasi, perubahan kebijakan ekonomi, dan ketahanan terhadap krisis keuangan.

Di era globalisasi, ekonomi tidak lagi terbatas pada batas negara. Integrasi ekonomi internasional telah menciptakan hubungan yang semakin kompleks antara berbagai negara, di mana perubahan dalam ekonomi global memiliki dampak langsung terhadap perekonomian domestik. Globalisasi telah meningkatkan arus perdagangan, investasi, dan teknologi, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti ketergantungan ekonomi dan persaingan pasar yang semakin ketat.

Lembaga internasional seperti IMF, WTO, dan Bank Dunia memainkan peran sentral dalam mengatur stabilitas ekonomi global melalui kebijakan moneter, perdagangan, dan bantuan keuangan. Namun, efektivitas intervensi mereka sering menjadi perdebatan, terutama dalam konteks negara berkembang yang menghadapi tantangan struktural dan ketimpangan ekonomi.

Kebijakan proteksionisme dan perdagangan bebas menjadi isu utama dalam strategi ekonomi global. Di satu sisi, proteksionisme bertujuan untuk melindungi industri domestik, sementara di sisi lain, liberalisasi perdagangan dapat membuka peluang investasi dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Bab ini akan menguraikan berbagai aspek ekonomi global serta bagaimana negara-negara beradaptasi dengan perubahan dinamika internasional.

6.1 Dampak Ekonomi Global terhadap Ekonomi Domestik

6.1.1 Globalisasi dan Ketergantungan Ekonomi Antar Negara

Globalisasi telah menciptakan keterhubungan ekonomi yang sangat erat antarnegara melalui integrasi perdagangan, investasi, dan teknologi. Namun, seiring dengan meningkatnya integrasi ini, muncul pula tantangan baru berupa ketergantungan yang dapat menciptakan kerentanan terhadap guncangan eksternal.

Globalisasi telah memperkuat keterkaitan antarnegara melalui perdagangan, investasi, dan arus informasi. Secara empiris, perdagangan global sebagai persentase terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dunia meningkat signifikan dari 39% pada tahun 1990 menjadi 58% pada tahun 2019, mencerminkan intensifikasi ketergantungan ekonomi antarnegara (Jurnal Innovative, 2024). Fenomena ini menjadikan perekonomian domestik semakin rentan terhadap dinamika eksternal, seperti fluktuasi harga komoditas, perubahan kebijakan moneter global, dan gangguan rantai pasok.

Dalam konteks Indonesia, dampak perubahan pasar global tercermin pada kinerja ekonomi kuartal I tahun 2025. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 4,87% secara tahunan (year-on-year), dengan ekspor barang dan jasa tumbuh sebesar 6,78% (BPS, 2025). Pertumbuhan ekspor ini menunjukkan respons positif

terhadap permintaan global, meskipun tetap menghadapi tantangan dari volatilitas harga dan ketidakpastian geopolitik.

Sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan global, Indonesia menunjukkan performa kuat di sektor-sektor strategis. Sektor pertanian tumbuh sebesar 10,52%, didorong oleh peningkatan produktivitas dan diversifikasi komoditas ekspor. Sementara itu, sektor informasi dan komunikasi mencatat pertumbuhan sebesar 7,72%, mencerminkan akselerasi digitalisasi ekonomi dan peningkatan permintaan terhadap layanan teknologi (BPS, 2025). Kedua sektor ini menjadi pilar penting dalam strategi nasional menghadapi persaingan global, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi domestik.

Integrasi ekonomi dan keterbukaan perdagangan telah menjadi fondasi penting dalam pertumbuhan ekonomi global, namun keduanya juga membawa risiko sistemik yang perlu dikelola secara hati-hati. Uni Eropa (UE) menjadi contoh utama melalui pembentukan Pasar Tunggal sejak 1993, yang memungkinkan pergerakan bebas barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antarnegara anggota. Kebijakan ini meningkatkan efisiensi produksi dan skala ekonomi, serta mendorong inovasi dan investasi lintas negara (Pasar Tunggal UE, 2024). Namun, ketergantungan lintas negara juga memperbesar risiko sistemik, seperti yang terlihat dalam krisis utang Yunani pada 2010, di mana gejolak fiskal satu negara berdampak

pada stabilitas seluruh kawasan euro (Kompasiana, 2025).

Di sisi lain, negara berkembang seperti Indonesia menghadapi tantangan berbeda. Ketergantungan pada ekspor komoditas primer seperti minyak sawit dan batu bara membuat perekonomian sangat rentan terhadap fluktuasi harga global. Ketika harga komoditas turun, pendapatan negara dan sektor tenaga kerja terpukul, menciptakan kerentanan fiskal dan sosial yang signifikan (Geotimes, 2024; Kompasiana, 2025). Studi dari Komisi VI DPR RI dan Asian Development Bank menunjukkan bahwa penurunan harga ekspor akibat perang dagang dan proteksionisme global telah menurunkan ekspor Indonesia hingga 6% dan mengganggu rantai pasok industri manufaktur (DPR RI, 2025).

Secara empiris, *World Bank* mencatat bahwa perdagangan internasional menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB global pada tahun 2024, menandakan pentingnya keterbukaan ekonomi sebagai motor pertumbuhan (*World Bank*, 2024). Sementara itu, IMF menunjukkan bahwa negara dengan keterbukaan ekonomi tinggi memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata 1,5 kali lebih besar dibanding negara dengan ekonomi tertutup (IMF, 2023). Data ini memperkuat argumen bahwa integrasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan dapat mendorong pertumbuhan, namun juga menuntut ketahanan struktural dan kebijakan mitigasi risiko yang cermat.

Integrasi ekonomi global telah menjadi mesin pertumbuhan yang kuat, namun juga membawa tantangan struktural yang menuntut respons kebijakan yang cermat. Di satu sisi, keterbukaan ekonomi memungkinkan efisiensi produksi melalui spesialisasi, transfer teknologi lintas negara, dan perluasan akses pasar internasional. Menurut Liputan6 (2025), integrasi ini juga mendorong peningkatan investasi asing langsung dan daya saing produk nasional. Namun, di sisi lain, ketergantungan terhadap harga komoditas global dan kebijakan ekonomi negara mitra dapat menciptakan risiko sistemik, terutama bagi negara berkembang yang belum memiliki struktur ekonomi yang tangguh (Kompasiana, 2025; Familiarize, 2025)2.

Untuk meminimalisasi kerentanan tersebut, diversifikasi ekspor menjadi strategi kunci. Pemerintah Indonesia, misalnya, mendorong pengembangan industri hilir seperti pengolahan nikel, tekstil, dan produk agrikultur bernilai tambah tinggi (FEB Unesa, 2025). Perluasan pasar tujuan ekspor ke kawasan non-tradisional seperti Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin juga menjadi prioritas, sebagaimana disarankan oleh Komisi VI DPR RI dan Asian Development Bank (2025)5. Selain itu, promosi sektor ekonomi digital dan manufaktur berbasis teknologi menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan ekspor nasional (CapitalPress, 2024).

Kebijakan perdagangan yang efektif juga harus dibarengi dengan penguatan cadangan devisa dan

pengelolaan nilai tukar yang fleksibel. Bank Indonesia, dalam laporan kebanksentralan (BI Institute, 2015), menekankan pentingnya sistem nilai tukar mengambang terkendali untuk merespons volatilitas global dan menjaga stabilitas makroekonomi. Di sisi lain, perjanjian dagang multilateral seperti I-EU CEPA dan CPTPP menjadi instrumen penting untuk memperluas akses pasar dan mengurangi hambatan tarif (Kemenko Perekonomian, 2023)8.

Dengan demikian, globalisasi memang membuka peluang besar bagi pertumbuhan dan modernisasi ekonomi. Namun, agar keterbukaan tidak berubah menjadi kerentanan, negara perlu menyusun strategi domestik yang cerdas—meliputi diversifikasi ekspor, penguatan industri bernilai tambah, stabilitas moneter, dan diplomasi dagang yang adaptif.

6.1.2 Perubahan Pasar Global dan Dampaknya terhadap Sektor Domestik

Perubahan pasar global memiliki dampak langsung terhadap sektor domestik, terutama dalam konteks keterbukaan ekonomi dan ketergantungan antarnegara. Guncangan eksternal seperti krisis energi atau pandemi dapat memicu tekanan inflasi, gangguan produksi, serta ketidakpastian kebijakan dalam negeri.

Krisis minyak tahun 1970-an dan pandemi COVID-19 merupakan dua peristiwa global yang menunjukkan bagaimana guncangan eksternal dapat mengganggu

stabilitas ekonomi dan memicu perubahan kebijakan struktural.

Pada krisis minyak 1973, negara-negara anggota OPEC, khususnya Arab Saudi, memberlakukan embargo terhadap negara-negara Barat yang mendukung Israel dalam Perang Yom Kippur. Embargo ini menyebabkan lonjakan harga minyak hingga hampir 300%, dari sekitar \$3 menjadi hampir \$12 per barel dalam waktu singkat (Wikipedia, 2024; National Geographic, 2023). Dampaknya sangat luas: negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa mengalami stagflasi—kombinasi inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah—yang sebelumnya dianggap tidak mungkin dalam teori ekonomi klasik seperti Kurva Phillips (CNBC Indonesia, 2022). Industri transportasi dan manufaktur terguncang, dan ketahanan energi nasional menjadi isu strategis. Sebagai respons, negara-negara mulai berinvestasi dalam energi alternatif dan efisiensi bahan bakar, yang menjadi titik awal kebijakan energi modern (Investhink, 2024; PTASKES, 2024).

Sementara itu, pandemi COVID-19 mengungkap kerentanan rantai pasok global. Penutupan pabrik, pembatasan mobilitas, dan gangguan logistik menyebabkan kekurangan bahan baku dan komponen elektronik, terutama di sektor otomotif, farmasi, dan manufaktur (Kompasiana, 2025; UNPAD, 2022). Negara-negara dengan ketergantungan tinggi terhadap impor atau ekspor sangat terdampak, mengalami keterlambatan produksi, lonjakan biaya pengiriman, dan penurunan

investasi lintas negara. Menurut laporan UNCTAD dan WTO, biaya pengiriman kontainer melonjak hingga lima kali lipat, dan volume perdagangan global turun hampir 9% pada tahun 2020 (Santoso, 2024; DHL, 2024).

Secara empiris, International Energy Agency (IEA) mencatat bahwa harga minyak melonjak lebih dari 50% akibat konflik geopolitik tahun 2022, termasuk invasi Rusia ke Ukraina, yang memicu inflasi global dan krisis energi di Eropa serta negara berkembang (IEA, 2023; Good News From Indonesia, 2023). Lonjakan ini memperburuk daya beli masyarakat dan menekan fiskal negara-negara pengimpor energi.

Analisis Kebijakan: Dalam menghadapi guncangan global yang semakin kompleks, ketahanan ekonomi nasional tidak dapat dibangun melalui isolasi, melainkan melalui strategi domestik yang cerdas, fleksibel, dan inovatif. Salah satu pilar utama adalah diversifikasi energi, yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada komoditas tunggal dan meredam volatilitas harga global. Menurut Kementerian ESDM dan IESR (2023), bauran energi domestik perlu diperkuat melalui pengembangan energi terbarukan seperti surya, angin, bioenergi, dan panas bumi, serta penciptaan cadangan strategis nasional. Program seperti jargas, kompor listrik berbasis EBT, dan hilirisasi batubara menjadi DME juga menjadi bagian dari strategi transisi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan (Pikiran.id, 2025; Liga Asuransi, 2025).

Di sisi lain, ketahanan ekonomi jangka panjang menuntut integrasi sektor domestik dengan rantai nilai

lokal. Bappenas (2024) menekankan pentingnya pembangunan kapasitas produksi dalam negeri untuk barang strategis seperti semikonduktor, alat kesehatan, dan pangan. Penguatan sistem logistik nasional dan digitalisasi rantai pasok juga menjadi prioritas dalam RPJPN 2025–2045, guna meningkatkan efisiensi distribusi dan respons terhadap gangguan eksternal (IESR, 2024; Minews ID, 2025). Strategi ini sejalan dengan visi Indonesia Emas, yang menempatkan industrialisasi berbasis nilai tambah dan teknologi sebagai motor pertumbuhan.

Untuk menghadapi fluktuasi eksternal, pemerintah perlu mengembangkan resiliensi fiskal dan moneter yang adaptif. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan telah menerapkan kebijakan suku bunga yang fleksibel, sistem subsidi sementara, dan penguatan cadangan devisa sebagai bantalan terhadap gejolak nilai tukar dan arus modal global (BI.go.id, 2025; Moody's, 2025). Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter juga tercermin dalam strategi countercyclical APBN, yang diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung program prioritas nasional (Kemenkeu, 2025; Kompasiana, 2024).

Dengan demikian, ketahanan terhadap guncangan global tidak dibangun dengan menutup diri, tetapi melalui transformasi struktural yang progresif dan kolaboratif. Diversifikasi energi, penguatan industri lokal, dan stabilitas makroekonomi menjadi fondasi utama bagi Indonesia untuk tetap tangguh dan kompetitif di tengah dinamika global.

6.1.3 Adaptasi Ekonomi Nasional dalam Menghadapi Persaingan Global

Adaptasi ekonomi nasional terhadap dinamika persaingan global memerlukan strategi transformasional berbasis inovasi dan penguatan industri strategis. Globalisasi dan revolusi teknologi menuntut negara-negara untuk tidak hanya membuka akses pasar, tetapi juga meningkatkan kemampuan produksinya secara digital, efisien, dan berorientasi masa depan.

Studi kasus Jerman dan Indonesia menunjukkan bagaimana kebijakan industri berbasis teknologi dapat menjadi katalisator daya saing ekonomi, meskipun tantangan struktural tetap membayangi.

Di Jerman, kebijakan *Industrie 4.0* yang diluncurkan sejak 2011 berfokus pada otomatisasi, integrasi digital, dan kecerdasan buatan dalam sektor manufaktur. Pemerintah Jerman mendorong pengembangan *smart factories* yang mengandalkan *Internet of Things (IoT)*, sistem produksi fleksibel berbasis data, dan analitik prediktif untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Perusahaan seperti Siemens dan Bosch menjadi pionir dalam menciptakan solusi digital yang mampu meningkatkan produktivitas industri, bahkan untuk usaha kecil dan menengah (Xpert.Digital, 2024; KMTech.id, 2025). Hasilnya, daya saing manufaktur Jerman tetap kuat di tengah persaingan global, termasuk dengan Tiongkok dan negara-negara biaya rendah,

karena mampu mempertahankan kualitas tinggi dan fleksibilitas produksi berbasis teknologi.

Sementara itu, Indonesia melalui kebijakan Making Indonesia 4.0 menargetkan transformasi lima sektor prioritas—makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia—yang menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB manufaktur dan 65% terhadap ekspor industri (Kemenperin, 2024; Digination.id, 2024). Tujuannya adalah meningkatkan kontribusi industri manufaktur terhadap PDB, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja berketerampilan digital. Strategi ini mencakup adopsi teknologi digital seperti AI, IoT, dan otomasi, serta penguatan ekosistem inovasi dan pendidikan vokasi. Namun, tantangan besar masih dihadapi, terutama dalam hal infrastruktur digital, kesiapan SDM, dan koordinasi kebijakan lintas lembaga (Kontan.co.id, 2024; Ekon.go.id, 2024).

Secara empiris, laporan OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2023 menunjukkan bahwa negara dengan kebijakan inovasi dan adopsi teknologi yang kuat mengalami peningkatan ekspor produk teknologi lebih dari 30% dibanding negara dengan regulasi yang ketat atau stagnan dalam inovasi. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan yang mendukung transformasi digital dan inovasi bukan hanya berdampak pada efisiensi produksi, tetapi juga pada daya saing ekspor dan ketahanan ekonomi jangka panjang.

Analisis Kebijakan: Dalam membentuk arah pembangunan nasional yang berkelanjutan dan

kompetitif, kebijakan industri berperan sebagai kompas strategis yang menyelaraskan investasi, pendidikan, insentif fiskal, dan regulasi untuk menciptakan ekosistem inovatif yang produktif. Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2020–2024, yang ditetapkan melalui Perpres No. 74 Tahun 2022, menekankan penguatan struktur industri, penguasaan teknologi, dan pengembangan SDM berkualitas sebagai fondasi keunggulan kompetitif yang berwawasan lingkungan (Kaji.id, 2024; JDIH BPK RI, 2022).

Strategi berbasis inovasi terbukti lebih unggul dibanding pendekatan proteksionisme jangka panjang. Proteksionisme memang dapat memberikan perlindungan sementara, namun tanpa peningkatan efisiensi dan daya saing teknologi, industri nasional berisiko stagnan dan kalah dalam kompetisi global. Komisi VII DPR RI (2025) menyoroti bahwa relaksasi kebijakan seperti TKDN harus disertai dengan penguatan riset dan transfer teknologi agar tidak memperlemah kapasitas produksi dalam negeri. Artikel di Kompasiana (2024) juga menegaskan bahwa daya saing tidak dibangun di balik tembok tarif, melainkan melalui penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan.

Untuk membangun daya saing yang tangguh, negara perlu meningkatkan investasi dalam R&D dan memperkuat kemitraan antara industri dan akademisi. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menekankan pentingnya hilirisasi riset dan sinergi lintas sektor sebagai fondasi ekonomi

berbasis inovasi (Kemdiktisaintek.go.id, 2025). Selain itu, pengembangan infrastruktur digital dan logistik industri menjadi prasyarat transformasi, sebagaimana diuraikan oleh Puskarsa UMA (2024), yang menyoroti pentingnya jaringan 5G, pusat data, dan sistem logistik cerdas untuk mendukung efisiensi produksi.

Menyiapkan tenaga kerja siap industri 4.0 juga menjadi prioritas. Pendidikan vokasi dan pelatihan teknologi harus diselaraskan dengan kebutuhan industri, seperti yang disampaikan oleh BINUS dan IPB University dalam kajian tentang kompetensi era Industri 5.0 (RudyCT, 2025). Kurikulum berbasis kompetensi dan kerja sama industri-akademisi menjadi kunci mencetak SDM adaptif dan inovatif.

Tak kalah penting, integrasi UMKM dalam rantai nilai industri digital perlu difasilitasi melalui pelatihan, akses teknologi, dan kemitraan strategis. Kemenko Perekonomian dan Kemenperin telah mendorong program Making Indonesia 4.0 sebagai platform untuk memperkuat partisipasi UMKM dalam ekosistem industri berbasis teknologi (Ekon.go.id, 2024; Kemenperin.go.id, 2024).

Dengan demikian, daya saing nasional tidak dibangun melalui proteksi, tetapi melalui kemampuan menciptakan nilai tambah yang berorientasi ekspor dan berbasis inovasi. Adaptasi ini menentukan posisi suatu negara dalam rantai pasok global dan menjadi fondasi ketahanan ekonomi jangka panjang.

6.2 Peran Lembaga Internasional

6.2.1 Fungsi dan Kebijakan Lembaga Ekonomi Global

Lembaga ekonomi global seperti IMF (International Monetary Fund), Bank Dunia (*World Bank*), dan WTO (*World Trade Organization*) memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan internasional, memfasilitasi perdagangan global, dan membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi. Keberadaan mereka menjadi pilar koordinasi ekonomi internasional di era globalisasi yang kompleks.

Studi kasus IMF dan WTO menunjukkan bagaimana lembaga internasional memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi global, meskipun pendekatan dan dampaknya sangat bergantung pada desain kebijakan dan konteks politik masing-masing negara.

Pada krisis utang Yunani (2010–2015), Dana Moneter Internasional (IMF) bersama Uni Eropa dan Bank Sentral Eropa (ECB)—yang dikenal sebagai Troika—memberikan paket bailout senilai lebih dari €250 miliar dalam tiga fase. Bantuan ini disertai dengan syarat ketat berupa kebijakan austeritas, termasuk pemotongan anggaran publik, reformasi pensiun, dan deregulasi pasar tenaga kerja (Ajarekonomi.com, 2016; Wikipedia, 2024). Meskipun langkah ini berhasil mencegah gagal bayar dan menjaga stabilitas sistem keuangan Eropa, banyak ekonom seperti Joseph Stiglitz dan Paul Krugman mengkritik pendekatan tersebut

karena memperparah kontraksi ekonomi dan meningkatkan pengangguran hingga lebih dari 25% (Kompasiana, 2025; Rocholl & Stahmer, 2016). IMF sendiri dalam evaluasi internal mengakui bahwa kebijakan tersebut terlalu menekankan stabilitas fiskal jangka pendek dan kurang memperhatikan dampak sosial jangka panjang (IMF, 2013).

Sementara itu, dalam sengketa dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) berperan sebagai forum penyelesaian melalui mekanisme dispute settlement dan arbitrase multilateral. Meskipun Amerika Serikat sempat melewati mekanisme WTO dengan kebijakan tarif unilateral selama pemerintahan Trump, WTO tetap menjadi platform penting untuk mencegah eskalasi konflik dagang yang lebih luas dan menjaga struktur sistem perdagangan global (Kumparan.com, 2025; TradeInt.id, 2025). Tiongkok, misalnya, mengajukan gugatan resmi ke WTO atas tarif tambahan AS, dan proses arbitrase tetap berjalan meski badan banding WTO sempat mengalami stagnasi akibat pemblokiran hakim oleh AS (Brief.id, 2025; Eprints UNRAM, 2025).

Secara empiris, IMF mencatat bahwa dalam dekade terakhir, lembaga ini telah memberikan lebih dari USD 500 miliar dalam bentuk pinjaman dan fasilitas bantuan kepada negara-negara terdampak krisis, termasuk Sri Lanka, Pakistan, dan Argentina (CNBC Indonesia, 2025; Invesnesia.com, 2025). Argentina, misalnya, menerima program Extended Fund Facility senilai USD 20 miliar

pada 2025 untuk menstabilkan nilai tukar dan menekan inflasi (IMF.org, 2025).

Kedua studi kasus ini memperlihatkan bahwa lembaga internasional seperti IMF dan WTO memiliki peran penting dalam merespons krisis, namun efektivitasnya sangat bergantung pada desain kebijakan, legitimasi politik, dan komitmen negara anggota terhadap prinsip multilateralisme

Analisis Kebijakan: Dalam arsitektur ekonomi internasional, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia memainkan peran penting sebagai penyedia bantuan finansial dan teknis bagi negara-negara yang menghadapi krisis atau tantangan pembangunan. Namun, efektivitas intervensi kedua lembaga ini sangat bergantung pada desain program dan kondisi lokal masing-masing negara. IMF cenderung fokus pada stabilisasi makroekonomi jangka pendek, seperti pengendalian inflasi dan pengurangan defisit anggaran, sementara Bank Dunia lebih menekankan pembangunan jangka panjang melalui proyek infrastruktur dan reformasi institusi (Tempo.co, 2022; Kompasiana, 2024).

Kritik terhadap IMF banyak diarahkan pada pendekatan austeritas yang dianggap terlalu ketat dan berdampak negatif terhadap pemulihan ekonomi serta ketimpangan sosial. Dalam kasus krisis utang Yunani (2010–2015), IMF bersama Uni Eropa dan ECB memberikan bailout lebih dari €250 miliar, namun dengan syarat penghematan fiskal yang mencakup pemotongan anggaran publik dan reformasi struktural.

Meskipun langkah ini berhasil mencegah gagal bayar, banyak ekonom seperti Joseph Stiglitz dan Paul Krugman menilai bahwa kebijakan tersebut justru memperparah kontraksi ekonomi dan meningkatkan pengangguran hingga lebih dari 25% (Ajarekonomi.com, 2016; Kompasiana, 2025; Rocholl & Stahmer, 2016). IMF sendiri dalam evaluasi internal mengakui bahwa pendekatan tersebut terlalu menekankan stabilitas fiskal jangka pendek dan kurang memperhatikan dampak sosial jangka panjang (IMF, 2013).

Selain itu, dominasi negara-negara maju dalam struktur pengambilan keputusan IMF, seperti hak suara Amerika Serikat yang cukup besar untuk memveto kebijakan penting, menimbulkan kritik terhadap legitimasi dan inklusivitas lembaga ini. Negara berkembang sering kali merasa kurang dilibatkan dalam desain program, padahal mereka adalah penerima utama bantuan IMF (Kompasiana, 2025).

Di sisi lain, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) berperan sebagai forum penyelesaian sengketa dagang, seperti dalam konflik tarif antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Meskipun AS sempat melewati mekanisme WTO dengan kebijakan unilateral, WTO tetap menjadi platform penting untuk mencegah eskalasi konflik dan menjaga struktur perdagangan global. Tiongkok mengajukan gugatan resmi ke WTO, dan proses arbitrase tetap berjalan meski badan banding sempat stagnan akibat pemblokiran hakim oleh AS (Kumparan.com, 2025; TradeInt.id, 2025; Brief.id, 2025).

Secara empiris, IMF mencatat bahwa dalam dekade terakhir, lembaga ini telah menyalurkan lebih dari USD 500 miliar dalam bentuk pinjaman dan fasilitas bantuan kepada negara-negara terdampak krisis, termasuk Sri Lanka, Pakistan, dan Argentina. Argentina, misalnya, menerima program Extended Fund Facility senilai USD 20 miliar pada 2025 untuk menstabilkan nilai tukar dan menekan inflasi (CNBC Indonesia, 2025; IMF.org, 2025).

Dengan mempertimbangkan berbagai kritik dan tantangan, reformasi terhadap IMF dan Bank Dunia menjadi penting agar lembaga-lembaga ini lebih inklusif dan kontekstual. Reformasi tersebut dapat mencakup fleksibilitas kebijakan, perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan, dan keterlibatan aktif negara penerima dalam desain program (An-Nur.ac.id, 2024; Kompasiana, 2024). Tanpa penyesuaian terhadap realitas politik dan sosial negara mitra, keberlanjutan peran lembaga ekonomi global ini akan terus dipertanyakan.

6.2.2 Dampak Intervensi IMF dan Bank Dunia terhadap Stabilitas Ekonomi

Intervensi lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia membawa dampak campuran terhadap stabilitas ekonomi negara penerima. Di satu sisi, mereka menyediakan likuiditas dan dukungan teknis dalam kondisi krisis. Di sisi lain, syarat-syarat ketat yang menyertai bantuan dapat menimbulkan konsekuensi sosial dan politik yang kompleks (Mankiw, 2014).

Studi kasus Argentina dan proyek infrastruktur Bank Dunia di Afrika menunjukkan kompleksitas intervensi lembaga keuangan internasional dalam pembangunan dan stabilisasi ekonomi, serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan fiskal negara penerima.

Pada tahun 2018, Argentina menerima bantuan lebih dari USD 57 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF), menjadikannya salah satu paket bailout terbesar dalam sejarah lembaga tersebut (CNBC, 2018; IMF Country Report No. 18/297, 2018). Tujuan utama program ini adalah menstabilkan nilai tukar peso dan menekan defisit anggaran. Namun, syarat yang menyertai bantuan tersebut berupa kebijakan austeritas—seperti pemangkasan subsidi energi dan pengurangan belanja sosial—justru memicu kontraksi konsumsi dan lonjakan angka kemiskinan dalam jangka pendek. IMF sendiri mengakui bahwa pendekatan ini memiliki dampak sosial yang signifikan dan menyarankan peningkatan alokasi bantuan sosial untuk melindungi kelompok rentan (IMF.org, 2018; Kompasiana, 2024).

Di Afrika, Bank Dunia mendanai berbagai proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, bendungan, dan elektrifikasi pedesaan di negara-negara seperti Kenya, Nigeria, dan Ethiopia. Di Nigeria, proyek *Distributed Access through Renewable Energy Scale-up* (DARES) senilai USD 750 juta bertujuan menyediakan akses listrik bagi lebih dari 17,5 juta orang melalui jaringan mini dan sistem rumah tenaga surya (Katadata,

2023; DSN Solar, 2024). Di Ethiopia dan Kenya, proyek Electricity Highway senilai USD 1,2 miliar memungkinkan pertukaran energi lintas negara untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik dan efisiensi jaringan (PTASKES, 2025). Meski proyek-proyek ini berhasil meningkatkan konektivitas dan akses layanan dasar, kritik tetap muncul terkait kurangnya konsultasi lokal, risiko lingkungan, dan beban utang jangka panjang yang dapat membebani kapasitas fiskal negara penerima (Kompas.com, 2024; Sindonews, 2024).

Secara empiris, laporan *World Bank Annual Report 2023* menunjukkan bahwa program penyesuaian struktural IMF sering dikaitkan dengan pemotongan anggaran sosial, yang dalam banyak kasus menyebabkan peningkatan angka kemiskinan secara temporer, meskipun diiringi dengan stabilisasi ekonomi makro dalam jangka menengah (*World Bank, 2023*).

Analisis Kebijakan

Reformasi terhadap Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia menjadi semakin krusial dalam memastikan bahwa bantuan internasional benar-benar mendukung pembangunan yang adil dan berkelanjutan. IMF selama ini dikenal dengan fokus pada stabilisasi makroekonomi jangka pendek, seperti pengendalian inflasi dan pengurangan defisit anggaran. Namun, pendekatan ini sering kali disertai dengan kebijakan austeritas yang ketat, seperti pemangkasan subsidi dan belanja sosial, yang dapat memperburuk ketimpangan dan memperlambat pemulihan ekonomi. Laporan *World*

Bank Annual Report 2023 menunjukkan bahwa program penyesuaian struktural IMF sering dikaitkan dengan peningkatan angka kemiskinan secara temporer, meskipun diiringi dengan stabilisasi ekonomi makro dalam jangka menengah (*World Bank, 2023*).

Contoh nyata terlihat dalam kasus Argentina, yang menerima bantuan lebih dari USD 57 miliar dari IMF pada tahun 2018. Program ini bertujuan menstabilkan nilai tukar dan menekan defisit anggaran, namun syarat penghematan seperti pemangkasan subsidi energi dan pengurangan belanja sosial justru memicu kontraksi konsumsi dan lonjakan kemiskinan jangka pendek (IMF Country Report No. 18/297, 2018; Kompasiana, 2024). IMF sendiri mengakui bahwa dampak sosial dari program tersebut signifikan dan menyarankan peningkatan perlindungan sosial minimum dalam desain program (IMF.org, 2018).

Reformasi IMF perlu mencakup penyesuaian syarat pinjaman agar lebih kontekstual terhadap kondisi negara, penyisipan komponen perlindungan sosial minimum, serta kolaborasi dengan lembaga pembangunan lokal dan LSM dalam perencanaan program. Hal ini sejalan dengan pendekatan adaptive conditionality yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan sosial dan politik negara penerima (Koran Jakarta, 2025; IMF Factsheet, 2024).

Di sisi lain, efektivitas Bank Dunia dalam mendorong pembangunan berkelanjutan juga memerlukan penguatan kelembagaan dan partisipatif.

Evaluasi terhadap proyek WSLIC-2 di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun proyek berhasil meningkatkan akses air bersih dan sanitasi, keberlanjutan dampaknya masih dipertanyakan karena lemahnya fase pemeliharaan dan partisipasi masyarakat (Sita & Agusta, 2011). Oleh karena itu, pendekatan berbasis hasil, partisipasi komunitas lokal, dan peningkatan standar lingkungan dan sosial perlu menjadi bagian integral dari desain proyek infrastruktur besar (*World Bank* CCDR Indonesia, 2023; ResearchGate, 2023).

Dengan demikian, intervensi IMF dan Bank Dunia bisa menjadi solusi atau justru sumber ketegangan, tergantung pada desain kebijakan, konteks penerapan, dan sensitivitas sosialnya. Reformasi kelembagaan yang menekankan inklusivitas, keberlanjutan, dan kolaborasi lintas aktor adalah kunci agar bantuan internasional benar-benar mendukung pembangunan yang adil dan berorientasi jangka panjang.

Lembaga ekonomi global seperti International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas moneter internasional dan mendorong pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Menurut SINDOnews (2023), kedua lembaga ini tidak hanya menyediakan bantuan keuangan, tetapi juga menetapkan kerangka kebijakan makroekonomi yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan fiskal dan mendorong reformasi struktural. Fungsi mereka mencakup pengawasan ekonomi global,

pemberian pinjaman darurat, serta dukungan teknis dan kapasitas kelembagaan bagi negara anggota.

Namun, intervensi lembaga-lembaga tersebut tidak lepas dari kontroversi, terutama dalam konteks krisis ekonomi. Di Indonesia, program IMF pasca-krisis finansial 1997 menjadi titik balik dalam kebijakan fiskal nasional. Berdasarkan analisis Kompasiana (2024), intervensi IMF saat itu mendorong reformasi fiskal yang ketat, termasuk pengurangan subsidi, privatisasi BUMN, dan pembatasan belanja publik. Meskipun langkah-langkah tersebut bertujuan untuk menstabilkan makroekonomi dan menarik kembali kepercayaan investor, dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan distribusi ekonomi masih menjadi bahan evaluasi hingga kini.

Dengan demikian, peran lembaga internasional bersifat dualistik: di satu sisi memberikan stabilitas dan dukungan teknis, namun di sisi lain dapat memicu ketegangan sosial dan politik jika tidak disesuaikan dengan konteks domestik. Oleh karena itu, penting mengelola hubungan dengan lembaga global secara strategis, dengan tetap menjaga kedaulatan kebijakan dan keberlanjutan pembangunan nasional.

6.3 Kebijakan Proteksionisme dan Perdagangan Bebas

6.3.1 Perbandingan Kebijakan Proteksionisme dan Liberalisasi Perdagangan

Proteksionisme dan liberalisasi perdagangan merupakan dua pendekatan yang berbeda dalam strategi perdagangan internasional. Masing-masing memiliki keunggulan dan risiko tergantung pada konteks ekonomi, tingkat pembangunan, dan posisi daya saing suatu negara.

Studi kasus mengenai perang dagang AS-Tiongkok dan kebijakan proteksi pertanian Uni Eropa menunjukkan bagaimana kebijakan proteksionisme dapat menghasilkan dampak ekonomi yang kompleks dan beragam, tergantung pada konteks dan sektor yang terlibat.

Sejak 2018, Amerika Serikat mulai mengenakan tarif tinggi terhadap produk teknologi dan manufaktur asal Tiongkok, dengan nilai total lebih dari USD 550 miliar. Tiongkok merespons dengan tarif balasan terhadap produk AS senilai lebih dari USD 185 miliar (Kemhan RI, 2025; Kumparan, 2025). Kebijakan ini memicu gangguan rantai pasok global, terutama di sektor teknologi, serta menyebabkan kenaikan harga barang konsumen dan penurunan volume perdagangan internasional. OECD mencatat bahwa negara dengan kebijakan proteksionisme seperti ini cenderung mengalami inflasi harga domestik 20–30% lebih tinggi, terutama di sektor yang dilindungi, akibat menurunnya efisiensi dan meningkatnya biaya produksi tanpa tekanan kompetisi global (OECD, 2024). Meski kebijakan tarif AS dimaksudkan untuk melindungi industri domestik dari dominasi teknologi Tiongkok, efektivitasnya masih

diperdebatkan karena dampak jangka panjang terhadap daya saing dan konsumsi domestik belum sepenuhnya positif (Kompasiana, 2025; Liputan6, 2024).

Di sisi lain, Uni Eropa menerapkan Kebijakan Pertanian Bersama atau Common Agricultural Policy (CAP) sebagai bentuk proteksi terhadap sektor pertanian lokal. Melalui subsidi langsung dan tarif impor tinggi, CAP bertujuan menjaga ketahanan pangan, stabilitas pendapatan petani, dan keberlanjutan ekonomi pedesaan (Tirto.id, 2020; Wikipedia, 2024). Petani Eropa menerima dukungan pendapatan yang signifikan, dengan anggaran CAP mencapai hampir 38% dari total belanja Uni Eropa. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif, terutama bagi negara berkembang yang kesulitan menembus pasar Eropa akibat distorsi harga dan hambatan tarif. Negara-negara seperti Indonesia dan Australia mengeluhkan proteksi UE yang dianggap menghambat akses pasar dan menciptakan ketidakadilan dalam perdagangan global (Republika, 2023; Liputan6, 2025).

Kedua studi kasus ini memperlihatkan bahwa proteksionisme dapat memberikan manfaat domestik seperti stabilitas sektor strategis dan perlindungan terhadap guncangan eksternal. Namun, tanpa desain kebijakan yang adaptif dan inklusif, proteksionisme juga berisiko menciptakan ketidakseimbangan global, memperburuk inflasi, dan menghambat efisiensi ekonomi.

Analisis Kebijakan. Proteksionisme, meskipun sering dipandang sebagai penghambat perdagangan bebas, dapat memberikan manfaat dalam kondisi tertentu. Salah satu justifikasi klasik adalah infant industry protection, yaitu perlindungan terhadap industri baru yang belum memiliki daya saing global. Friedrich List dan Alexander Hamilton adalah tokoh yang menekankan pentingnya perlindungan sementara agar industri domestik dapat tumbuh dan mencapai skala ekonomi yang efisien (Irwin, 2016; Kumparan, 2022). Di Indonesia, pendekatan ini tercermin dalam kebijakan Presiden Jokowi yang mendorong penggunaan produk lokal dan pembatasan impor barang konsumsi seperti pakaian dan alat tulis, sebagai upaya memperkuat industri dalam negeri (Kumparan, 2022).

Proteksi juga relevan dalam konteks kepentingan strategis nasional, seperti sektor energi, pertahanan, dan pangan. Uni Eropa, misalnya, melalui Common Agricultural Policy (CAP), memberikan subsidi besar kepada petani lokal untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi pedesaan, meskipun kebijakan ini dikritik oleh negara berkembang karena menciptakan distorsi harga global (Tirto.id, 2020; Wikipedia, 2024). Selain itu, dalam situasi krisis ekonomi atau darurat nasional, proteksionisme dapat digunakan sebagai respons sementara untuk melindungi lapangan kerja dan mencegah gelombang PHK, seperti yang terjadi dalam perang dagang AS-Tiongkok sejak 2018 (Kemhan RI, 2025; Kumparan, 2025).

Namun, proteksionisme yang berlangsung terus-menerus berisiko menimbulkan stagnasi. OECD (2024) mencatat bahwa negara dengan kebijakan proteksionisme cenderung mengalami inflasi harga domestik 20–30% lebih tinggi di sektor yang dilindungi, akibat menurunnya efisiensi dan meningkatnya biaya produksi tanpa tekanan kompetisi global. Proteksi jangka panjang juga dapat mengurangi insentif inovasi, menurunkan daya saing ekspor, dan membatasi pilihan konsumen (Esa Unggul, 2024; ICE-AEC, 2025).

Oleh karena itu, kebijakan terbaik adalah menyeimbangkan liberalisasi dengan perlindungan selektif. Tarif sebaiknya diterapkan secara temporer dengan exit strategy yang jelas, agar industri dapat naik kelas dan tidak bergantung pada proteksi selamanya (SpringerLink, 2016; PintarForex, 2025). Pemerintah juga perlu menyediakan insentif R&D, pendidikan vokasi, dan digitalisasi untuk meningkatkan daya saing industri domestik secara jangka panjang (Strateginews, 2025). Selain itu, pembangunan mekanisme perdagangan adil (*fair trade*) menjadi penting untuk menghadapi praktik dumping dan subsidi asing yang tidak adil, sebagaimana diatur dalam kebijakan anti-dumping WTO dan berbagai perjanjian perdagangan internasional (Indonesiana.id, 2025; An-Nur.ac.id, 2024).

Dengan demikian, liberalisasi perdagangan dan proteksionisme bukanlah dikotomi absolut, melainkan spektrum strategi yang harus disesuaikan secara dinamis. Pendekatan yang adaptif dan kontekstual memungkinkan

negara memperkuat struktur ekonomi nasional tanpa menutup diri dari arus globalisasi.

6.3.2 Dampak Tarif Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Tarif perdagangan, sebagai bentuk proteksionisme, merupakan instrumen kebijakan yang digunakan untuk melindungi industri domestik dari kompetisi luar negeri. Namun, kebijakan ini juga dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, efisiensi pasar, dan kesejahteraan konsumen.

Studi kasus mengenai tarif impor baja Amerika Serikat (AS) dan proteksi industri tekstil di negara berkembang menunjukkan bahwa kebijakan proteksionisme, meskipun dimaksudkan untuk melindungi sektor domestik, dapat menimbulkan efek samping yang signifikan terhadap efisiensi ekonomi dan daya saing global.

Pada tahun 2018, pemerintahan Donald Trump menerapkan tarif impor sebesar 25% terhadap baja dan 10% terhadap aluminium, dengan dalih melindungi industri strategis dari praktik dumping dan ancaman terhadap keamanan nasional (Kompasiana, 2025; Katadata, 2025). Meskipun kebijakan ini meningkatkan pendapatan produsen baja domestik hingga 15%, dampak negatifnya terasa di sektor hilir seperti otomotif dan konstruksi. Harga baja melonjak, menyebabkan kenaikan harga kendaraan dan penurunan margin keuntungan perusahaan manufaktur. Menurut U.S.

Bureau of Labor Statistics, kebijakan ini berkontribusi pada hilangnya sekitar 75.000 pekerjaan di sektor manufaktur selama 2018–2019, sementara hanya menciptakan sekitar 8.000 pekerjaan baru di sektor baja (Kompasiana, 2025). Selain itu, daya saing produk manufaktur AS di pasar global terganggu, karena biaya produksi yang lebih tinggi mengurangi keunggulan harga ekspor.

Di sisi lain, proteksi industri tekstil di negara berkembang seperti Indonesia, India, dan Vietnam sering dilakukan melalui tarif tinggi dan subsidi domestik untuk melindungi dari serbuan impor murah (Indonesia.go.id, 2024; DetikFinance, 2024). Kebijakan ini memberikan perlindungan awal dan menjaga stabilitas tenaga kerja, namun dalam jangka panjang cenderung menurunkan efisiensi dan produktivitas. Minimnya tekanan kompetisi global membuat industri tekstil kurang terdorong untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas. Studi oleh UPNVJ (2025) menunjukkan bahwa pelonggaran proteksi tanpa kesiapan struktural menyebabkan penurunan daya saing dan lonjakan PHK. Industri yang terlalu lama dilindungi juga cenderung bergantung pada subsidi dan tidak siap menghadapi liberalisasi pasar, sebagaimana tercermin dalam dampak negatif Permendag No. 8 Tahun 2024 terhadap sektor tekstil nasional.

Secara empiris, laporan *World Trade Organization* (WTO) tahun 2023 mencatat bahwa tarif perdagangan yang signifikan menyebabkan penurunan ekspor hingga 15% di sektor-sektor yang terdampak langsung.

Penurunan ini berdampak pada arus kas perusahaan, pengurangan tenaga kerja, dan penurunan investasi industri jangka panjang, terutama di sektor manufaktur dan tekstil (WTO, 2023; Bisnis.com, 2025).

Analisis Kebijakan: Tarif perdagangan merupakan instrumen kebijakan yang memiliki daya dorong signifikan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konteks penerapan dan durasinya. Dalam situasi krisis atau masa pengembangan industri baru (*infant industry*), tarif dapat berfungsi sebagai alat sementara untuk menciptakan ruang pertumbuhan dan melindungi sektor yang belum kompetitif secara global. Perspektif ini telah lama diakui dalam literatur ekonomi klasik, termasuk oleh Friedrich List dan Alexander Hamilton, yang menekankan perlunya proteksi awal agar industri domestik dapat mencapai skala ekonomi dan efisiensi produksi (Irwin, 2016; Kumparan, 2022).

Namun, jika tarif diterapkan terlalu lama tanpa strategi keluar (*exit strategy*), insentif untuk efisiensi dan inovasi cenderung menurun. Studi oleh SpringerLink (2016) dan Strateginews (2025) menunjukkan bahwa proteksi jangka panjang dapat menciptakan ketergantungan terhadap subsidi dan menghambat adopsi teknologi baru. Hal ini berdampak pada stagnasi produktivitas dan penurunan daya saing ekspor, terutama di sektor-sektor yang seharusnya sudah mampu bersaing secara global.

Selain itu, tarif yang bersifat unilateral berisiko memicu pembalasan dari mitra dagang dan

menyebabkan eskalasi perang dagang. Kasus perang dagang AS-Tiongkok sejak 2018 menunjukkan bahwa kebijakan tarif dapat mengganggu rantai pasok global, meningkatkan harga barang konsumen, dan menurunkan volume perdagangan teknologi (Kemhan RI, 2025; WTO, 2023). OECD (2024) mencatat bahwa negara dengan kebijakan proteksionisme cenderung mengalami inflasi harga domestik 20–30% lebih tinggi di sektor yang dilindungi, akibat menurunnya efisiensi dan meningkatnya biaya produksi tanpa tekanan kompetisi global.

Dampak terhadap daya saing domestik juga perlu dicermati. Industri yang terlalu lama dilindungi cenderung stagnan dalam hal adopsi teknologi dan peningkatan produktivitas. Kajian oleh ERIA dan Bappenas (2021) menunjukkan bahwa partisipasi dalam rantai nilai global dan tekanan kompetisi internasional justru mendorong inovasi dan efisiensi. Sebaliknya, tarif yang memperburuk integrasi dalam jaringan manufaktur internasional dapat menghambat transfer teknologi dan investasi asing langsung (IPB, 2015; Academia.edu, 2017).

Oleh karena itu, tarif perdagangan harus digunakan secara hati-hati, selektif, dan bersifat sementara. Kebijakan ini perlu disertai dengan insentif pendukung seperti subsidi R&D, pendidikan vokasi, dan digitalisasi industri agar sektor domestik dapat naik kelas dan bersaing secara global. Pembangunan mekanisme perdagangan adil (fair trade) juga penting untuk

menghadapi praktik dumping dan subsidi asing yang tidak adil (An-Nur.ac.id, 2024; Indonesiana.id, 2025).

Dengan pendekatan yang adaptif dan kontekstual, kebijakan tarif dapat menjadi bagian dari strategi industrialisasi yang berkelanjutan, bukan sebagai penghalang integrasi ekonomi global.

6.3.3 Negosiasi Perjanjian Perdagangan Internasional dan Keseimbangan Ekonomi

Negosiasi perjanjian perdagangan internasional merupakan proses kompleks yang bertujuan mencapai keseimbangan antara liberalisasi pasar dan perlindungan kepentingan nasional. Saat berhasil, perjanjian ini dapat meningkatkan ekspor, investasi, dan efisiensi ekonomi. Namun jika tidak inklusif atau timpang, justru bisa memperdalam ketimpangan antarnegara.

Studi kasus ASEAN Free Trade Agreement (AFTA) dan Trans-Pacific Partnership (TPP/CPTPP) menunjukkan bagaimana perjanjian perdagangan multilateral dapat mempercepat integrasi ekonomi regional dan meningkatkan daya saing global, meskipun tantangan struktural tetap ada.

AFTA, yang mulai berlaku sejak 1993, dirancang untuk memperkuat integrasi pasar Asia Tenggara melalui penghapusan tarif intra-ASEAN dan harmonisasi regulasi. Tujuan utamanya adalah menjadikan ASEAN sebagai basis produksi yang kompetitif dan menarik investasi asing langsung (FDI). Dampak positif dari AFTA terlihat dalam peningkatan arus perdagangan regional dan

spesialisasi produksi antarnegara anggota. Studi oleh Universitas Nasional (2024) menunjukkan bahwa aktivitas jaringan industri antarnegara ASEAN meningkat secara signifikan, memperkuat daya saing komparatif kawasan. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam bentuk perbedaan daya saing antarnegara anggota dan ketimpangan infrastruktur. Indonesia, misalnya, menghadapi kendala dalam kesiapan SDM dan distribusi logistik yang belum merata, sehingga manfaat AFTA belum dirasakan secara merata di seluruh wilayah (Anabarja, 2024).

CPTPP, sebagai evolusi dari TPP pasca mundurnya Amerika Serikat, dilanjutkan oleh 11 negara dan menetapkan standar baru dalam perdagangan global melalui perlindungan kekayaan intelektual, tenaga kerja, dan lingkungan. Negara anggota seperti Vietnam, Meksiko, dan Chile mengalami peningkatan ekspor berkat penghapusan hambatan tarif dan kepastian hukum. Indonesia tengah dalam proses aksesi, dengan proyeksi peningkatan ekspor hingga 10% dan perluasan akses pasar ke Amerika Utara.

Secara empiris, laporan *World Bank* (2024) menunjukkan bahwa negara yang tergabung dalam perjanjian perdagangan multilateral seperti AFTA dan CPTPP mengalami peningkatan arus investasi asing langsung hingga 40%. Hal ini disebabkan oleh kepastian hukum, harmonisasi aturan, dan pengurangan hambatan perdagangan yang mendorong investor untuk

menanamkan modal di negara-negara anggota (UMA.ac.id, 2024).

Analisis Kebijakan: Negosiasi perdagangan internasional merupakan arena kompleks yang melibatkan strategi ekonomi, diplomasi, dan pembangunan. Tantangan utama dalam proses ini adalah ketidakseimbangan kekuatan tawar antara negara maju dan berkembang, yang sering kali menciptakan asimetri dalam hasil perjanjian. Negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, memiliki kapasitas teknis dan politik yang lebih besar, sehingga dapat memaksakan agenda mereka dalam isu-isu seperti hak kekayaan intelektual dan akses pasar jasa, sementara negara berkembang kesulitan memperjuangkan kepentingan sektor pertanian dan UMKM (Kumparan, 2024; Diswansena, 2024).

Selain itu, perlindungan sektor domestik yang sensitif menjadi hambatan dalam mencapai konsensus. Negara-negara cenderung mempertahankan subsidi dan tarif tinggi untuk sektor seperti pertanian, kesehatan, dan industri kecil, yang dianggap vital bagi stabilitas sosial dan politik domestik. Misalnya, subsidi pertanian di negara maju sering kali merugikan petani di negara berkembang karena menciptakan distorsi harga global (UMA.ac.id, 2024; WTO, 2023).

Kompleksitas semakin meningkat dengan munculnya isu non-tarif seperti standar sanitasi, hak digital, dan transparansi regulasi. Standar teknis dan sanitasi yang tinggi di negara maju dapat menjadi

hambatan masuk bagi produk dari negara berkembang, meskipun secara tarif sudah dibebaskan. Di sisi lain, isu hak digital dan perlindungan data menjadi tantangan baru yang belum sepenuhnya diatur dalam kerangka WTO (SBM ITB, 2023; Hukumonline, 2022).

Untuk mengoptimalkan manfaat perjanjian perdagangan, negara-negara berkembang perlu menerapkan strategi yang komprehensif dan adaptif. Pertama, peningkatan kapasitas negosiator dan koordinasi lintas sektor di dalam negeri sangat penting agar posisi tawar Indonesia dalam forum internasional lebih kuat. Kajian DPR RI (2022) menekankan perlunya pelatihan teknis dan diplomasi ekonomi bagi tim perunding agar mampu menghadapi tekanan dari negara mitra.

Kedua, integrasi komponen pembangunan inklusif dalam perjanjian menjadi kunci agar manfaat perdagangan tidak hanya dinikmati oleh sektor besar, tetapi juga menjangkau kelompok rentan. Ini mencakup dukungan bagi sektor terdampak, bantuan teknis, dan transfer teknologi yang adil. Diswansena (2024) menyarankan agar negara berkembang mendorong klausul pembangunan dalam perjanjian, seperti dukungan bagi UMKM dan petani kecil.

Ketiga, evaluasi pasca-perjanjian dan fleksibilitas penyesuaian perlu dilakukan secara berkala untuk meminimalkan kerugian dan merespons perubahan global. SBM ITB (2023) menekankan pentingnya

mekanisme monitoring dan revisi perjanjian agar tetap relevan dengan dinamika ekonomi dan teknologi.

Dengan demikian, negosiasi perdagangan internasional bukan sekadar urusan tarif, tetapi medan strategis yang menuntut kecermatan membaca dinamika global sambil melindungi kepentingan domestik secara cerdas dan inklusif.

Kebijakan perdagangan internasional berada dalam spektrum antara proteksionisme dan liberalisasi. Proteksionisme, yang bertujuan melindungi industri domestik dari persaingan luar negeri, sering kali menyebabkan kenaikan harga barang dan distorsi pasar. Sebaliknya, liberalisasi perdagangan mendorong efisiensi, inovasi, dan akses pasar yang lebih luas. Menurut analisis Baraka UMA (2024), proteksionisme dapat memberikan perlindungan jangka pendek, namun berisiko menurunkan daya saing dan memperlambat transformasi struktural ekonomi.

Dampak konkret dari kebijakan tarif terlihat dalam studi INDEF (2025), yang menunjukkan bahwa penerapan tarif sebesar 19% oleh Amerika Serikat terhadap produk Indonesia berpotensi menurunkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,11% dan mengurangi daya beli rumah tangga sebesar 0,091%. Efek ini mencerminkan sensitivitas ekonomi domestik terhadap kebijakan dagang negara mitra, serta pentingnya diversifikasi pasar dan peningkatan nilai tambah ekspor.

Sebagai respons terhadap dinamika global, Indonesia mempercepat negosiasi perjanjian perdagangan internasional, termasuk Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Uni Eropa, Kanada, Peru, dan Eurasia. Menurut laporan Bisnis.com (2025), langkah ini bertujuan memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing ekspor, dan menciptakan keseimbangan ekonomi dalam menghadapi tekanan proteksionis dari negara maju. Perjanjian dagang tersebut juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong integrasi ekonomi regional dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

BAB 7.

TANTANGAN EKONOMI MAKRO KEDEPAN

Learning Objectives:

1. Menjelaskan dampak revolusi teknologi terhadap ekonomi makro.
2. Menganalisis transformasi industri akibat perkembangan teknologi tinggi, serta bagaimana perubahan struktural ini memengaruhi produktivitas dan pola pertumbuhan ekonomi.
3. Menilai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan.
4. Mengevaluasi peran kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi sosial.
5. Memahami tantangan ekonomi dalam menghadapi disrupsi teknologi.
6. Menganalisis perubahan geopolitik dan dampaknya terhadap ekonomi global.
7. Memproyeksikan tren kebijakan ekonomi dalam menghadapi masa depan.

Perkembangan ekonomi makro di masa depan akan semakin dipengaruhi oleh revolusi teknologi, perubahan geopolitik, serta disrupsi sistem ekonomi global. Digitalisasi telah mengubah model bisnis tradisional menjadi berbasis teknologi tinggi, sementara otomatisasi dan kecerdasan buatan membawa tantangan baru bagi pasar tenaga kerja. Transformasi industri akibat teknologi tinggi menuntut adaptasi kebijakan ekonomi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan struktural.

Implikasi pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan sosial juga menjadi perhatian utama. Pertumbuhan yang tinggi tidak selalu menghasilkan distribusi pendapatan yang merata, sehingga strategi ekonomi inklusif harus diterapkan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat secara luas. Peran kebijakan pemerintah dalam menciptakan stabilitas sosial menjadi faktor penentu dalam menghadapi tantangan ekonomi modern.

Selain itu, perubahan geopolitik dan tren ekonomi global menghadirkan ketidakpastian yang membutuhkan pendekatan adaptif dalam kebijakan ekonomi. Dengan meningkatnya kompleksitas pasar internasional, negara-negara harus bersiap menghadapi disrupsi ekonomi yang dipicu oleh teknologi, konflik internasional, serta perubahan iklim yang semakin memengaruhi struktur ekonomi global. Bab ini akan membahas tren utama yang akan membentuk masa depan ekonomi makro serta strategi untuk menghadapinya.

7.1 Revolusi Teknologi dan Perubahan Ekonomi

7.1.1 Digitalisasi dan Dampaknya terhadap Model Bisnis Global

Digitalisasi telah merevolusi model bisnis global dengan mengaburkan batas antara produsen, distributor, dan konsumen. Teknologi seperti e-commerce, cloud computing, kecerdasan buatan, dan *Internet of Things* (IoT) tidak hanya menciptakan model baru, tetapi juga mendisrupsi rantai nilai tradisional dan menantang perusahaan untuk bertransformasi (Mankiw, 2014).

Amazon & Alibaba: Dua raksasa e-commerce ini telah mengubah peta ritel global melalui model bisnis digital berbasis platform dan logistik cerdas.

Dalam era revolusi teknologi, Amazon dan Alibaba telah menjadi pionir dalam mengubah lanskap ritel global melalui pendekatan digital yang inovatif. Amazon, yang didirikan oleh Jeff Bezos, merevolusi pengalaman belanja konsumen dengan memperkenalkan algoritma rekomendasi personal berbasis kecerdasan buatan melalui layanan Amazon Personalize, yang memungkinkan pengguna menerima saran produk secara real-time berdasarkan preferensi dan riwayat interaksi mereka. Selain itu, Amazon menetapkan standar baru dalam logistik dengan layanan pengiriman satu hari (*Amazon Day Delivery*), yang tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan tetapi juga mengubah ekspektasi industri terhadap kecepatan dan efisiensi pengiriman.

Sementara itu, Alibaba Group, yang didirikan oleh Jack Ma, membangun ekosistem digital yang menyeluruh melalui platform seperti Tmall dan Alipay. Tmall Global memungkinkan UMKM dari berbagai negara untuk menjangkau pasar Tiongkok secara langsung tanpa harus memiliki infrastruktur fisik di sana, membuka akses ke lebih dari 700 juta konsumen⁴. Alipay, sebagai sistem pembayaran digital, memperluas inklusi keuangan dan mendukung transaksi lintas batas dengan efisiensi tinggi. Transformasi ini tidak hanya mengubah pola konsumsi masyarakat Tiongkok, tetapi juga mendorong digitalisasi UMKM di Asia Tenggara melalui pelatihan, pembiayaan, dan integrasi teknologi⁵.

Kedua perusahaan ini menunjukkan bagaimana digitalisasi dan kecerdasan logistik dapat menciptakan model bisnis baru yang lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan dalam ekonomi global.

Smart Factory: Industri manufaktur global mengadopsi otomatisasi, sensor pintar, dan big data untuk menciptakan pabrik cerdas yang mampu memproduksi barang secara fleksibel, hemat energi, dan berbasis permintaan real-time.

Industri manufaktur global kini tengah mengalami transformasi besar melalui konsep Smart Factory, yang menggabungkan otomatisasi, sensor pintar, dan analitik big data untuk menciptakan sistem produksi yang fleksibel, efisien, dan responsif terhadap permintaan pasar secara real-time. Pabrik cerdas ini tidak hanya mengurangi konsumsi energi dan limbah, tetapi juga

meningkatkan kualitas dan kecepatan produksi melalui integrasi teknologi canggih.

Salah satu teknologi kunci dalam Smart Factory adalah digital twin, yaitu representasi digital dari aset fisik atau proses produksi yang diperbarui secara real-time. Perusahaan seperti Bosch dan Siemens telah memanfaatkan digital twin untuk mensimulasikan dan memantau proses produksi, memungkinkan deteksi dini terhadap kesalahan dan perencanaan pemeliharaan prediktif². Siemens, melalui platform TIA Portal, bahkan mengintegrasikan digital twin dengan sistem otomasi untuk meningkatkan efisiensi rekayasa dan mengurangi downtime produksi.

Selain itu, robotika manufaktur memainkan peran penting dalam otomatisasi proses produksi. Robot industri yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan dan sensor canggih mampu melakukan tugas-tugas kompleks seperti perakitan, inspeksi kualitas, dan pengemasan dengan presisi tinggi. Bosch dan Siemens menggunakan robot kolaboratif (*cobots*) yang dapat bekerja berdampingan dengan manusia, meningkatkan keselamatan kerja dan fleksibilitas produksi.

Dengan menggabungkan digital twin dan robotika, Smart Factory menjadi fondasi utama dalam mewujudkan industri 4.0 yang berkelanjutan, adaptif, dan berbasis data.

Digitalisasi telah menjadi pendorong utama dalam transformasi ekonomi dan industri global. Menurut laporan McKinsey Global Institute tahun 2023, penerapan

teknologi digital seperti kecerdasan buatan (AI), *Internet of Things* (IoT), dan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) secara strategis dapat meningkatkan efisiensi produksi hingga 40%. Efisiensi ini tercapai melalui optimalisasi proses kerja berbasis data real-time, pengurangan kesalahan manusia melalui otomatisasi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui integrasi sistem digital yang adaptif. Di sisi lain, *World Economic Forum* dalam laporan tahun 2024 memproyeksikan bahwa ekonomi digital global akan mencapai nilai sebesar \$20 triliun pada tahun 2030. Pertumbuhan ini didorong oleh semakin luasnya penetrasi internet, pesatnya adopsi AI dan komputasi awan, serta transformasi model bisnis dari fisik ke digital yang memperluas akses pasar dan efisiensi operasional. Kedua temuan ini menegaskan bahwa digitalisasi bukan hanya alat teknologi, tetapi juga fondasi strategis dalam membentuk struktur ekonomi masa depan yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan.

Menurut laporan ***Global Economic Futures: Competitiveness in 2030*** yang diterbitkan oleh *World Economic Forum* pada tahun 2024, ekonomi digital global diperkirakan akan mencapai nilai sebesar \$20 triliun pada tahun 2030. Proyeksi ini didasarkan pada tiga pendorong utama: peningkatan penetrasi internet, adopsi teknologi kecerdasan buatan (AI), dan transformasi model bisnis dari fisik ke digital yang terjadi secara luas di berbagai sektor. Laporan tersebut menyoroti bahwa digitalisasi tidak hanya memperluas

akses pasar dan efisiensi operasional, tetapi juga menciptakan peluang baru dalam bentuk pekerjaan digital, inovasi lintas batas, dan integrasi ekonomi global yang lebih inklusif. Dengan demikian, ekonomi digital menjadi fondasi strategis dalam membentuk daya saing dan pertumbuhan ekonomi masa depan.

Tabel 7.1. Digitalisasi dan dampaknya terhadap model bisnis global

Aspek	Deskripsi Utama
Transformasi Model Bisnis	Digitalisasi mengaburkan batas antara produsen, distributor, dan konsumen melalui e-commerce, AI, cloud computing, dan IoT.
Studi Kasus: Amazon	<ul style="list-style-type: none"> • Algoritma rekomendasi berbasis AI (Amazon Personalize) • Layanan pengiriman cepat (Amazon Day Delivery) • Standar baru dalam logistik dan kepuasan pelanggan
Studi Kasus: Alibaba	<ul style="list-style-type: none"> • Ekosistem digital (Tmall Global, Alipay) • Akses pasar Tiongkok bagi UMKM global • Inklusi keuangan dan digitalisasi UMKM Asia Tenggara
Smart Factory & Industri 4.0	<ul style="list-style-type: none"> • Otomatisasi, sensor pintar, dan big data • Digital twin untuk simulasi dan pemeliharaan prediktif (Bosch, Siemens)

Aspek	Deskripsi Utama
Proyeksi Ekonomi Digital	<ul style="list-style-type: none"> • Robot kolaboratif (cobots) untuk efisiensi dan keselamatan kerja • Efisiensi produksi meningkat hingga 40% (McKinsey, 2023) • Nilai ekonomi digital global diperkirakan mencapai \$20 triliun pada 2030 (WEF, 2024)
Regulasi Perlindungan Data	<ul style="list-style-type: none"> • GDPR (Uni Eropa): hak akses, penghapusan, portabilitas data • UU PDP (Indonesia, 2022): dasar hukum pengendalian data pribadi • Tantangan: adaptasi terhadap teknologi tanpa menghambat inovasi
Kebijakan Digitalisasi UMKM	<ul style="list-style-type: none"> • Subsidi perangkat, pelatihan digital, pembebasan pajak • Program KUR Digital dan kemitraan e-commerce • Tantangan: literasi digital, infrastruktur, akses pembiayaan

Analisis Kebijakan: Dalam konteks ekonomi digital yang terus berkembang, analisis kebijakan menjadi krusial untuk memastikan bahwa transformasi teknologi berjalan secara inklusif dan berkelanjutan. Salah satu isu utama adalah regulasi perlindungan data pribadi, yang menjadi fondasi kepercayaan konsumen dalam ekosistem digital. Di Uni Eropa, General Data Protection Regulation (GDPR) telah menetapkan standar

ketat dalam pengelolaan data pribadi, termasuk hak akses, penghapusan, dan portabilitas data. Regulasi ini berlaku tidak hanya bagi perusahaan di Eropa, tetapi juga bagi entitas luar yang memproses data warga Uni Eropa². Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada tahun 2022 merupakan langkah maju dalam menjamin hak digital masyarakat. Meskipun cakupannya belum sekomprehensif GDPR, UU PDP memberikan dasar hukum bagi pengendali dan pemroses data untuk bertanggung jawab atas keamanan dan penggunaan data pribadi. Tantangan utama dalam implementasi kedua regulasi ini adalah menyesuaikan kebijakan dengan dinamika teknologi yang cepat, tanpa menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital.

Di sisi lain, insentif digitalisasi UMKM menjadi strategi penting untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya dinikmati oleh perusahaan besar, tetapi juga oleh pelaku usaha kecil. Pemerintah Indonesia telah merancang berbagai kebijakan fiskal, seperti subsidi perangkat teknologi, pelatihan literasi digital, dan pembebasan pajak bagi UMKM yang mengadopsi sistem digital⁵. Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Digital dan kemitraan dengan platform e-commerce juga membantu UMKM mengakses pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, dan akses pembiayaan masih menjadi hambatan signifikan. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan yang holistik dan kolaboratif antara

pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal sangat diperlukan untuk mendorong digitalisasi UMKM secara merata dan berkelanjutan.

7.1.2 Peran Otomatisasi dan AI dalam Pasar Tenaga Kerja Dunia

Otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI) telah menjadi kekuatan transformatif dalam pasar tenaga kerja global, membawa efisiensi sekaligus menantang struktur ketenagakerjaan tradisional. Dampaknya terasa luas—dari manufaktur, layanan keuangan, hingga sektor publik—mengharuskan negara-negara untuk menyiapkan kebijakan adaptif dan inklusif (Mankiw, 2014).

Dalam era digitalisasi yang semakin masif, dua sektor utama—manufaktur dan perbankan—menjadi contoh nyata bagaimana teknologi mengubah struktur operasional dan tenaga kerja secara mendalam.

Di sektor manufaktur, perusahaan besar seperti Ford, Tesla, dan Siemens telah mengintegrasikan robot industri dan sistem otomatisasi canggih ke dalam lini produksi mereka. Tesla, misalnya, menggunakan robot untuk proses perakitan baterai dan kendaraan listrik di Gigafactory, memungkinkan produksi yang lebih cepat dan presisi tinggi. Ford memanfaatkan robot kolaboratif (cobots) untuk tugas-tugas berat dan berulang, sehingga meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja. Siemens, sebagai pelopor dalam otomasi industri, menggabungkan digital twin dan AI untuk memantau dan mengoptimalkan

proses produksi secara real-time. Namun, kemajuan ini juga membawa dampak sosial: banyak pekerjaan low-skilled tergeser, sementara permintaan terhadap teknisi mekatronik, engineer AI, dan analis data industri meningkat tajam.

Di sektor perbankan, transformasi digital telah mengubah cara layanan keuangan diberikan. Bank-bank besar di Eropa dan AS mengadopsi chatbot, digital banking, dan otomatisasi proses back-office untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman nasabah⁴. Teknologi seperti Robotic Process Automation (RPA) digunakan untuk mempercepat proses KYC, pemrosesan pinjaman, dan deteksi penipuan. Akibatnya, kebutuhan terhadap teller dan staf administratif menurun drastis, dan banyak cabang fisik ditutup demi efisiensi operasional. Namun, hal ini juga menimbulkan kesenjangan digital, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki literasi teknologi keuangan atau akses internet yang memadai⁶.

Kedua studi kasus ini menunjukkan bahwa digitalisasi membawa efisiensi dan inovasi, tetapi juga menuntut adaptasi kebijakan tenaga kerja, pendidikan ulang, dan inklusivitas digital agar dampaknya tidak menciptakan ketimpangan sosial yang lebih luas.

Dalam lanskap ekonomi global yang semakin terdigitalisasi, data empiris dari lembaga internasional menunjukkan dampak signifikan teknologi terhadap struktur pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Menurut OECD Employment Outlook 2023, sekitar 14% pekerjaan

global berisiko tergantikan oleh otomatisasi dalam satu dekade ke depan, terutama pada pekerjaan yang bersifat berulang dan operasional seperti entri data, pemrosesan dokumen, dan tugas administratif rutin. Risiko ini menuntut adaptasi kebijakan ketenagakerjaan dan peningkatan keterampilan digital agar tenaga kerja tetap relevan di era otomatisasi.

Sementara itu, laporan PwC Global Artificial Intelligence Study memperkirakan bahwa kecerdasan buatan (AI) akan memberikan kontribusi sebesar USD 15,7 triliun terhadap ekonomi global pada tahun 2030. Kontribusi ini berasal dari tiga sumber utama: peningkatan produktivitas tenaga kerja, inovasi produk yang lebih personal dan efisien, serta peningkatan layanan berbasis AI yang mendorong permintaan konsumen. PwC mencatat bahwa sekitar 45% dari total dampak ekonomi tersebut berasal dari sisi konsumsi, menunjukkan bahwa AI tidak hanya mengubah cara produksi, tetapi juga preferensi dan perilaku pasar.

Kedua temuan ini menegaskan bahwa digitalisasi dan AI bukan sekadar alat teknologi, melainkan kekuatan transformatif yang membentuk ulang struktur ekonomi dan sosial secara global.

Dalam menghadapi transformasi digital yang semakin cepat, analisis kebijakan menunjukkan bahwa *upskilling* tenaga kerja menjadi prioritas strategis untuk menjaga daya saing dan inklusivitas ekonomi. Pemerintah dan sektor swasta perlu menyediakan pelatihan berbasis teknologi digital yang mencakup

keterampilan abad ke-21 seperti komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreativitas. Program seperti bootcamp intensif, e-learning, dan pelatihan berbasis proyek telah diterapkan oleh institusi seperti Denpasar Institute dan Kementerian Pendidikan Vokasi untuk menjawab kebutuhan ini². Selain itu, peningkatan akses terhadap pendidikan vokasional dan platform pembelajaran daring yang adaptif menjadi kunci dalam menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang terlayani⁴. Integrasi literasi AI ke dalam kurikulum pendidikan formal juga penting agar generasi muda memahami prinsip dasar, potensi, dan risiko teknologi kecerdasan buatan sejak dini.

Di sisi lain, etika dan regulasi AI harus dirancang untuk menjamin transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Penggunaan AI dalam pengambilan keputusan—seperti rekrutmen, pemberian pinjaman, dan layanan publik—memerlukan standar audit algoritma yang ketat serta mekanisme akuntabilitas yang jelas⁸. Regulasi seperti GDPR di Uni Eropa dan UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia menjadi fondasi penting dalam menjaga hak privasi individu dan mencegah penyalahgunaan data. Tantangan utama adalah merancang kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa menghambat inovasi. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk membangun ekosistem AI yang adil, inklusif, dan dapat dipercaya⁵.

Dengan demikian, AI dan otomatisasi bukan sekadar ancaman, melainkan peluang baru untuk menciptakan pasar kerja yang lebih produktif, tetapi hanya jika disertai kebijakan adaptif, etis, dan berorientasi pada manusia.

7.2 Implikasi Ekonomi Makro terhadap Kesejahteraan

7.2.1 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu menjamin distribusi pendapatan yang merata. Dalam banyak kasus, negara dengan pertumbuhan pesat justru mengalami peningkatan ketimpangan jika tidak didukung oleh kebijakan redistributif yang kuat. Sebaliknya, negara dengan kebijakan sosial progresif mampu mencapai keseimbangan antara ekspansi ekonomi dan keadilan sosial.

Studi Kasus Perbandingan: Dalam perbandingan model ekonomi global, negara-negara Nordik seperti Norwegia dan Denmark menonjol sebagai contoh keberhasilan dalam menggabungkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan distribusi pendapatan yang merata. Sistem pajak progresif yang tinggi, seperti tarif PPh individu yang mencapai lebih dari 50%, digunakan untuk mendanai layanan publik universal seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan, dan jaminan sosial. Subsidi terhadap layanan dasar ini menjaga tingkat

kemiskinan tetap rendah—umumnya di bawah 10%—tanpa mengorbankan produktivitas. Hal ini dimungkinkan berkat efisiensi birokrasi, kepercayaan publik yang tinggi, dan inovasi sektor swasta yang tetap kompetitif dalam ekosistem yang adil dan transparan.

Sebaliknya, Amerika Serikat dan Tiongkok menunjukkan pola pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun disertai dengan ketimpangan pendapatan yang meningkat. Di AS, meskipun PDB terus tumbuh, pertumbuhan upah stagnan bagi kelas menengah-bawah, sementara kekayaan terkonsentrasi pada 1% populasi teratas, menciptakan jurang sosial yang semakin lebar. Di Tiongkok, reformasi pasar sejak era Deng Xiaoping telah mendorong pertumbuhan pesat, tetapi juga menyebabkan Indeks Gini mencapai 0,38 pada tahun 2023, mencerminkan kesenjangan yang melebar antara daerah urban dan pedesaan. Ketimpangan ini menjadi tantangan serius dalam menjaga stabilitas sosial dan inklusivitas ekonomi.

Model Nordik menunjukkan bahwa negara kesejahteraan tidak harus bertentangan dengan efisiensi dan inovasi, sementara kasus AS dan Tiongkok menyoroti pentingnya kebijakan redistribusi dan perlindungan sosial dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan keadilan ekonomi.

Data Empiris: Dalam konteks distribusi pendapatan global, data empiris menunjukkan kontras yang tajam antara model ekonomi negara Nordik dan negara berkembang seperti Tiongkok. Pada tahun 2023, Indeks

Gini Tiongkok tercatat sebesar 0,38, yang menandakan tingkat ketimpangan pendapatan yang cukup signifikan. Nilai ini mencerminkan kesenjangan yang melebar antara kelompok masyarakat urban dan pedesaan, serta antara kelas atas dan kelas menengah-bawah.

Sebaliknya, negara-negara Nordik seperti Norwegia dan Denmark berhasil menjaga tingkat kemiskinan di bawah 10%, berkat kombinasi kebijakan fiskal progresif, sistem jaminan sosial universal, dan subsidi terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perawatan anak³. Model “negara kesejahteraan” yang mereka terapkan tidak hanya menjamin pemerataan pendapatan, tetapi juga mendorong produktivitas dan inovasi sektor swasta melalui efisiensi birokrasi dan kepercayaan publik yang tinggi.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan yang inklusif dan berbasis solidaritas sosial dapat menghasilkan distribusi ekonomi yang lebih adil, tanpa mengorbankan pertumbuhan dan daya saing.

Analisis Kebijakan: Dalam kerangka kebijakan ekonomi yang berorientasi pada keadilan sosial, pendekatan negara-negara Nordik terhadap pajak progresif dan bantuan sosial menjadi contoh menarik. Pajak progresif diterapkan untuk mendistribusikan ulang kekayaan secara adil, di mana individu berpendapatan tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih besar. Di Denmark dan Finlandia, misalnya, tarif pajak penghasilan pribadi dapat mencapai lebih dari 55%. Namun, tingginya beban pajak ini dikompensasi dengan layanan publik

berkualitas tinggi, seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan universal, dan jaminan pensiun yang kuat². Hal ini menciptakan sistem yang tidak hanya adil secara fiskal, tetapi juga efisien secara sosial.

Di sisi lain, bantuan sosial dan subsidi memainkan peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat rentan dan mendorong mobilitas sosial. Negara-negara Nordik menyediakan jaminan pengangguran yang dapat mencapai hingga 90% dari gaji sebelumnya selama periode tertentu, serta subsidi pendidikan dan kesehatan yang memungkinkan akses universal tanpa hambatan biaya. Skema bantuan tunai bersyarat juga diterapkan untuk mendukung keluarga berpenghasilan rendah, dengan fokus pada anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Kombinasi antara pajak progresif dan bantuan sosial ini telah terbukti mampu menekan tingkat kemiskinan di bawah 10% dan menjaga Indeks Gini tetap rendah, menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata dibandingkan negara dengan sistem pajak yang lebih longgar. Model ini memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal yang kuat tidak harus mengorbankan produktivitas, melainkan dapat menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan memerlukan peran negara sebagai agen redistributif yang aktif. Tanpa intervensi yang adil, pertumbuhan hanya akan memperkaya sebagian kecil penduduk,

memperlebar kesenjangan, dan menciptakan risiko sosial dan politik jangka panjang.

7.2.2 Ekonomi Inklusif dan Strategi Pemerataan Kesejahteraan

Ekonomi inklusif menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ketimpangan yang masih tinggi di banyak negara, strategi inklusivitas menjadi kunci untuk memastikan keadilan sosial, stabilitas ekonomi, dan produktivitas jangka panjang.

Studi Kasus: Studi kasus penerapan Universal Basic Income (UBI) di Finlandia dan Kanada memberikan gambaran menarik tentang potensi dan tantangan kebijakan ini dalam konteks kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan.

Di Finlandia, antara tahun 2017 hingga 2018, pemerintah meluncurkan eksperimen UBI dengan memberikan tunjangan bulanan sebesar €560 kepada 2.000 warga pengangguran tanpa syarat apa pun. Hasil utama dari studi ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat pekerjaan formal tidak meningkat secara signifikan, para peserta mengalami peningkatan kesejahteraan mental, kepercayaan diri, dan motivasi untuk berpartisipasi dalam kerja informal atau kewirausahaan². Mereka juga melaporkan penurunan stres, kecemasan, dan rasa kesepian, serta peningkatan

persepsi terhadap kemampuan kognitif dan kondisi keuangan.

Sementara itu, di Kanada, provinsi Ontario mengadakan pilot UBI antara tahun 2017 hingga 2019, dengan melibatkan sekitar 4.000 peserta yang menerima hingga CAD 17.000 per tahun. Program ini dirancang sebagai alternatif dari sistem bantuan sosial tradisional yang bersifat kondisional. Evaluasi awal menunjukkan bahwa UBI memberikan fleksibilitas ekonomi, peningkatan kesejahteraan fisik dan mental, serta kemampuan untuk mengejar pendidikan atau pekerjaan yang lebih sesuai. Namun, program ini dihentikan lebih awal oleh pemerintah provinsi pada tahun 2018, sebelum evaluasi resmi selesai, sehingga data yang tersedia bersifat terbatas dan sebagian dikumpulkan oleh komunitas akademik secara independen⁴.

Kedua eksperimen ini menunjukkan bahwa meskipun UBI belum terbukti secara konsisten meningkatkan partisipasi kerja formal, ia memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan subjektif, kemandirian ekonomi, dan pengurangan ketergantungan terhadap bantuan sosial tradisional.

Dalam konteks kebijakan sosial dan fiskal di Indonesia, dua program utama—**Kartu Prakerja dan subsidi BBM**—menunjukkan pendekatan berbeda dalam mendukung masyarakat berpenghasilan rendah, namun keduanya bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.

Program Kartu Prakerja, yang diluncurkan sejak 2020 dan terus berlanjut hingga 2025, merupakan contoh kebijakan adaptif dan berbasis peningkatan kapasitas individu. Alih-alih hanya memberikan bantuan konsumtif, program ini menggabungkan bantuan sosial tunai dengan pelatihan keterampilan kerja digital, seperti digital marketing, data analis, desain grafis, dan kewirausahaan. Menurut Beritasatu dan Karier.mu, pelatihan ini telah menjangkau lebih dari 17 juta peserta, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan warga dari daerah miskin ekstrem. Pemerintah juga menargetkan 600.000 talenta digital baru setiap tahun, menjadikan Kartu Prakerja sebagai instrumen strategis dalam menghadapi tantangan transformasi digital dan bonus demografi.

Sementara itu, subsidi BBM tetap menjadi instrumen fiskal penting untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, terutama dalam menghadapi fluktuasi harga energi global. Namun, efektivitasnya sering dipertanyakan. Studi dari UGM dan Kompasiana menunjukkan bahwa subsidi BBM sering kali tidak tepat sasaran, dengan 60–70% konsumsi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. Hal ini menimbulkan beban besar pada APBN dan mengurangi efisiensi fiskal. Pemerintah telah mencoba berbagai mekanisme seperti Survey Card, Fuel Card, dan sistem RFID untuk memperbaiki penyaluran subsidi, namun tantangan dalam implementasi dan pengawasan masih tinggi².

Kombinasi antara pendekatan kapasitas individu (Kartu Prakerja) dan intervensi harga (subsidi BBM) mencerminkan upaya pemerintah dalam menyeimbangkan keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Namun, keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada reformasi kebijakan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Menurut laporan *World Bank* tahun 2023, peningkatan akses terhadap layanan finansial memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Secara khusus, akses yang lebih luas terhadap rekening bank, uang elektronik, dan layanan keuangan digital dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 14%. Dampak ini terutama dirasakan oleh lapisan masyarakat bawah, karena layanan finansial yang inklusif mendukung kewirausahaan mikro, memperkuat konsumsi rumah tangga, dan membuka peluang investasi produktif yang sebelumnya sulit dijangkau.

Studi kasus di Indonesia menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan, seperti penggunaan *mobile banking* dan e-money, telah membantu pelaku usaha kecil mencatat transaksi dengan lebih baik, mengelola arus kas, dan memperluas akses pasar. Namun, tantangan seperti literasi keuangan yang rendah dan kekhawatiran terhadap keamanan data masih menjadi hambatan adopsi yang lebih luas.

Temuan ini menegaskan bahwa inklusi finansial bukan hanya soal akses, tetapi juga soal kepercayaan, edukasi, dan infrastruktur digital yang mendukung partisipasi ekonomi yang lebih merata.

Analisis Kebijakan: Dalam merancang kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pemerintah perlu mengedepankan pendekatan berbasis data, redistribusi fiskal, dan partisipasi publik yang aktif. Evaluasi terhadap subsidi dan bantuan sosial menunjukkan bahwa subsidi konsumtif seperti energi dan pangan sering kali tidak tepat sasaran dan menimbulkan beban fiskal yang besar. Menurut kajian Badan Keahlian DPR RI, subsidi energi seperti LPG 3 kg dan listrik masih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu, sehingga efektivitasnya dalam menurunkan kemiskinan dan ketimpangan menjadi terbatas (DPR, 2024). Oleh karena itu, transformasi menuju mekanisme digital berbasis data—seperti penggunaan *Data Terpadu Sistem Elektronik Nasional (DTSEN)* dan *Survey Card*—menjadi langkah penting untuk meningkatkan akurasi penyaluran dan efisiensi fiskal (Sokoguru, 2025).

Di sisi lain, bantuan sosial berbasis produktivitas terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan jangka panjang. Program seperti *Kartu Prakerja*, *Kredit Usaha Rakyat (KUR)*, dan *BPUM* tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga membekali masyarakat dengan keterampilan kerja digital, akses modal mikro, dan peluang pasar yang relevan dengan ekonomi digital.

Studi dari Universitas Padjadjaran menunjukkan bahwa Kartu Prakerja mampu meningkatkan kompetensi kerja, ketahanan pangan, dan partisipasi ekonomi informal secara signifikan (Solihin et al., 2024).

Untuk menciptakan ekonomi yang inklusif, desain pajak dan belanja negara harus bersifat redistributif. Negara-negara Nordik seperti Denmark dan Finlandia menunjukkan bahwa pajak progresif yang tinggi dapat dikompensasi dengan layanan publik berkualitas tinggi, seperti pendidikan gratis dan jaminan kesehatan universal (Pajak.com, 2024; DJPb, 2025). Di Indonesia, alokasi APBN untuk sektor pendidikan dan kesehatan telah meningkat secara signifikan, dengan anggaran pendidikan mencapai Rp660,8 triliun dan kesehatan Rp169,8 triliun pada tahun 2024, menunjukkan komitmen terhadap pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan akses (Kemenkeu, 2024; PajakOnline, 2024).

Selain itu, digitalisasi inklusif dan inklusi keuangan menjadi fondasi penting dalam memperluas partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital. Teknologi seperti *QRIS*, *BI-FAST*, dan platform *fintech* telah membuka akses keuangan bagi kelompok rentan dan UMKM, terutama di wilayah 3T. Bank Indonesia mencatat bahwa QRIS telah mengakomodasi lebih dari 20 juta UMKM dan mendorong transaksi digital yang aman dan efisien (BI, 2024). Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital dan risiko keamanan siber masih perlu diatasi melalui

edukasi dan regulasi yang adaptif (Kompasiana, 2025; Antara, 2025).

Terakhir, partisipasi masyarakat dan transparansi dalam perumusan kebijakan menjadi elemen kunci agar program inklusif memperoleh legitimasi dan keberlanjutan. Sistem seperti DTSEN memungkinkan verifikasi data penerima bantuan secara real-time dan lintas kementerian, meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi kebijakan sosial (Sokoguru, 2025). Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

7.3 Prediksi Tren Ekonomi Global

7.3.1 Tantangan Ekonomi dalam Menghadapi Disrupsi Teknologi

Disrupsi teknologi membawa peluang luar biasa sekaligus ancaman struktural bagi model ekonomi tradisional. Perubahan yang cepat dan tidak linear menuntut kebijakan ekonomi yang adaptif, antisipatif, dan berbasis inovasi untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas.

Kodak vs. Fotografi Digital:

Kodak sempat menjadi simbol sukses industri fotografi analog. Namun kegagalannya beradaptasi dengan kamera digital dan perubahan preferensi

konsumen menyebabkan perusahaan ini bangkrut pada 2012.

Kodak, perusahaan fotografi asal Amerika yang pernah mendominasi pasar global, menjadi contoh klasik kegagalan korporasi dalam menghadapi inovasi disruptif. Pada tahun 1975, insinyur Kodak bernama Steve Sasson menciptakan kamera digital pertama di dunia. Namun, manajemen Kodak memilih untuk mengabaikan temuan tersebut karena khawatir akan mengganggu bisnis film cetak yang sangat menguntungkan. Menurut laporan Merdeka.com (2024), Kodak bahkan meminta Sasson untuk “mengubur” inovasi tersebut dan tidak membicarakannya secara publik. Ketika kamera digital mulai mendominasi pasar pada awal 2000-an, perusahaan seperti Canon dan Sony telah lebih dulu beradaptasi, sementara Kodak terlambat merespons. Akibatnya, pada tahun 2012, Kodak mengajukan kebangkrutan di bawah perlindungan hukum AS, menandai berakhirnya era kejayaan mereka (Lampost.co, 2024; SimulasiKredit.com, 2024). Kasus ini menunjukkan bahwa inovasi disruptif tidak hanya mengubah teknologi, tetapi juga menuntut transformasi model bisnis dan keberanian untuk meninggalkan zona nyaman.

Di sisi lain, industri keuangan global tengah mengalami disrupsi besar melalui teknologi *blockchain* dan sistem keuangan terdesentralisasi (DeFi). *Blockchain* memungkinkan transaksi peer-to-peer tanpa perantara seperti bank, dengan transparansi dan keamanan tinggi. Menurut Binus.ac.id (2025), layanan seperti DeFi,

kontrak pintar (smart contracts), dan sistem pembayaran instan telah menciptakan ekosistem keuangan baru yang lebih cepat dan murah. Namun, ekosistem ini juga menghadapi tantangan serius, seperti risiko keamanan, volatilitas aset kripto, dan ketidakjelasan regulasi. Studi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Kusumaningsih, 2025) menyoroti bahwa meskipun Indonesia telah mengakui *blockchain* sebagai sektor usaha resmi melalui PP No. 28 Tahun 2025, kerangka hukum yang komprehensif masih dalam tahap pengembangan. Pemerintah Indonesia, melalui OJK dan Bappebti, mulai merancang regulasi teknis untuk mengawasi perdagangan aset kripto dan penggunaan kontrak pintar, namun tantangan seperti audit algoritma dan perlindungan konsumen tetap menjadi perhatian utama (Coinvestasi, 2025; InfoTebet.com, 2025).

Industri Keuangan dan *Blockchain*:

Teknologi *blockchain* dan mata uang kripto telah membawa disrupsi besar dalam industri keuangan konvensional, menantang peran tradisional bank dan otoritas moneter. *Blockchain* memungkinkan pencatatan transaksi yang aman, transparan, dan tidak dapat diubah, sehingga memungkinkan transfer nilai secara langsung antar individu tanpa perantara. Menurut Binus University (2025), sistem keuangan terdesentralisasi atau Decentralized Finance (DeFi) menawarkan akses layanan keuangan yang lebih luas hanya dengan koneksi internet

dan dompet digital, tanpa perlu lembaga kredit atau bank formal.

Layanan seperti DeFi, sistem pembayaran instan, dan kontrak pintar (smart contracts) menciptakan ekosistem baru yang cepat dan murah. Kontrak pintar memungkinkan eksekusi otomatis perjanjian ketika kondisi tertentu terpenuhi, mengurangi kebutuhan akan pihak ketiga dan mempercepat proses transaksi. Namun, seperti dijelaskan oleh Kusumaningsih (2025) dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, ekosistem ini juga menghadapi tantangan serius: risiko keamanan, volatilitas aset kripto, dan belum adanya regulasi yang komprehensif.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah awal melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, yang secara resmi mengakui *blockchain* sebagai sektor usaha legal (Coinvestasi, 2025). Regulasi ini memberi kepastian hukum bagi pengembang teknologi *blockchain*, termasuk proyek Web3, NFT, dan smart contract. Namun, sektor keuangan berbasis *blockchain* tetap memerlukan izin khusus dari OJK dan Bappebti, serta pengawasan ketat terhadap aktivitas perdagangan aset kripto dan tokenisasi.

Tantangan regulasi juga mencakup perlindungan konsumen, audit algoritma, dan kejelasan hukum atas kontrak pintar. Studi dari InfoTebet.com (2025) menekankan bahwa meskipun PP 28/2025 menjadi tonggak penting, keberhasilan implementasi *blockchain*

dalam sektor keuangan sangat bergantung pada sinergi antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat luas.

Menurut laporan dari Kementerian Perdagangan RI dan Bappebti yang mengutip Global Crypto Adoption Index 2023, transaksi mata uang kripto di Indonesia mengalami lonjakan hingga 400% antara tahun 2020–2023, mencerminkan adopsi yang sangat pesat di kalangan investor domestik (Kemendag, 2024). Lonjakan ini sejalan dengan tren global yang juga diamati oleh International Monetary Fund (IMF), yang menyoroti bahwa pertumbuhan transaksi kripto membawa dampak ganda: di satu sisi membuka akses keuangan yang lebih luas dan efisien, namun di sisi lain meningkatkan eksposur terhadap volatilitas nilai tukar, risiko penipuan, dan minimnya perlindungan investor, terutama di negara-negara dengan regulasi yang belum matang (IMF, 2023).

Sebagai respons terhadap dinamika ini, Bappebti dan OJK mulai memperkuat regulasi aset digital, termasuk penerapan prinsip Know Your Customer (KYC), pengawasan Anti Pencucian Uang (APU), dan pengembangan ekosistem bursa kripto yang lebih aman dan transparan. Namun, tantangan seperti literasi keuangan digital dan pengawasan lintas batas tetap menjadi perhatian utama dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap sektor ini (BeInCrypto Indonesia, 2024).

Analisis Kebijakan: Dalam menghadapi disrupsi teknologi di sektor keuangan, pemerintah Indonesia dan

berbagai negara menghadapi tantangan penting dalam merancang regulasi yang mampu mengakomodasi inovasi tanpa mengorbankan stabilitas sistemik. Teknologi *blockchain* dan mata uang digital membawa perubahan besar terhadap peran tradisional perantara keuangan seperti bank dan otoritas moneter. Oleh karena itu, regulasi yang dikembangkan harus bersifat fleksibel dan teknologi-netral agar tidak membatasi ruang inovasi. Menurut Binus University (2024), pendekatan ini memungkinkan terciptanya kerangka hukum yang adaptif terhadap evolusi teknologi digital, termasuk fitur-fitur yang terus berkembang dalam sistem *blockchain* dan smart contract.

Salah satu langkah penting dalam menjawab kebutuhan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan inklusif adalah pengembangan *Central Bank Digital Currency* (CBDC), seperti Rupiah Digital yang tengah diuji oleh Bank Indonesia melalui Proyek Garuda. Studi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (2025) menunjukkan bahwa meskipun UU No. 4 Tahun 2023 telah menetapkan Rupiah Digital sebagai alat pembayaran sah, desain teknis dan regulasi pelaksanaan seperti distribusi dan hak perlindungan pengguna masih membutuhkan penguatan. CBDC diharapkan dapat memperkuat transmisi kebijakan moneter, meningkatkan efisiensi transaksi, dan memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh sistem perbankan formal (BeInCrypto Indonesia, 2024).

Dalam kerangka yang lebih luas, negara memiliki peran sentral dalam mendorong inovasi teknologi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi. Pendekatan kebijakan inovasi publik seperti pendanaan riset dan pengembangan (R&D), sandbox regulasi oleh OJK dan Bappebti, serta insentif digitalisasi untuk sektor UMKM menjadi bagian penting dalam memperkuat daya saing nasional. Sebagaimana dijelaskan oleh BeInCrypto Indonesia (2024), kebijakan sandbox memungkinkan pengujian solusi keuangan baru dalam lingkungan yang terkendali, mencegah risiko sistemik sekaligus membuka ruang bagi inovator.

Namun, kemajuan teknologi tetap harus diiringi dengan manajemen risiko yang matang dan keberpihakan terhadap kelompok rentan. Stabilitas ekonomi menuntut agar adaptasi teknologi digital dibarengi dengan upaya memperluas inklusi keuangan dan digital, serta perlindungan konsumen yang semakin kuat. Menurut laporan Bank Indonesia (2024), pendekatan berbasis transparansi, akuntabilitas, dan sistem penyelesaian sengketa menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap layanan keuangan digital. Dengan demikian, kebijakan yang seimbang antara keberanian berinovasi dan kehati-hatian dalam regulasi dapat menjadi fondasi ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, tantangan utama disrupti teknologi terletak pada kemampuan negara menavigasi antara “mendorong inovasi” dan “menjaga stabilitas”—

dua tujuan yang harus selaras, bukan dikorbankan satu demi yang lain.

7.3.2 Perubahan Geopolitik dan Dampaknya terhadap Ekonomi Global

Perubahan geopolitik secara langsung memengaruhi stabilitas dan arus perdagangan global, menciptakan ketidakpastian pasar, serta menekan pertumbuhan ekonomi lintas negara. Dalam era globalisasi, dampak konflik antarnegara kini tidak lagi bersifat lokal, tetapi menjalar melalui jaringan perdagangan, energi, dan keuangan global.

Studi Kasus: Sejak dimulainya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 2018, kebijakan tarif saling balas antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia telah menciptakan gangguan signifikan terhadap rantai pasok global. Presiden Donald Trump memberlakukan tarif tinggi terhadap produk Tiongkok sebagai bagian dari kebijakan proteksionis untuk melindungi industri dalam negeri AS, yang kemudian dibalas oleh Tiongkok dengan tarif serupa terhadap produk-produk asal Amerika (Kompasiana, 2025; Retizen Republika, 2025). Ketegangan ini berdampak langsung pada sektor teknologi, pertanian, dan manufaktur, dengan lonjakan harga bahan baku, penurunan ekspor, dan meningkatnya ketidakpastian pasar global. Menurut Gita Gopinath dari IMF, konflik ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi global hingga 0,5%

jika tidak segera diselesaikan melalui dialog multilateral (Kompasiana, 2025).

Dampak perang dagang juga terasa dalam perilaku investor dan strategi korporasi. Banyak perusahaan multinasional menahan ekspansi dan mulai memindahkan basis produksi dari Tiongkok ke negara-negara Asia Tenggara untuk menghindari tarif tinggi. Indonesia, Vietnam, dan Thailand menjadi tujuan relokasi industri, meskipun Indonesia masih menghadapi tantangan seperti birokrasi yang kompleks dan infrastruktur yang belum merata (Kemhan RI, 2025; Retizen Republika, 2025). *Spillover effect* dari konflik ini bersifat ganda: di satu sisi membuka peluang investasi dan diversifikasi pasar, namun di sisi lain menimbulkan tekanan terhadap stabilitas nilai tukar, harga komoditas, dan daya saing ekspor nasional. Misalnya, ekspor kedelai AS ke Tiongkok turun hingga 67% pada April 2025, sementara harga barang konsumen di AS seperti mesin cuci dan sepatu meningkat akibat tarif balasan (Retizen Republika, 2025).

Secara keseluruhan, perang dagang AS–Tiongkok bukan sekadar konflik tarif, melainkan refleksi dari perebutan dominasi ekonomi dan teknologi global. Negara-negara berkembang seperti Indonesia harus mampu membaca arah perubahan ini dan merancang strategi kebijakan yang adaptif, termasuk reformasi logistik, diplomasi ekonomi, dan penguatan industri substitusi impor. Seperti disampaikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan RI (2025),

Indonesia memiliki peluang strategis untuk menjadi pusat produksi alternatif dalam rantai pasok global, asalkan mampu mempercepat reformasi struktural dan meningkatkan daya saing nasional.

Konflik Rusia–Ukraina yang berlangsung sejak 2022 telah memicu krisis energi dan pangan global yang berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan sosial di berbagai negara. Di sektor energi, sanksi ekonomi dari negara-negara Barat terhadap Rusia membatasi ekspor minyak dan gas alam, termasuk larangan pengiriman melalui laut dan penutupan aliran pipa gas utama Nord Stream-1 ke Eropa. Akibatnya, harga minyak mentah melonjak hingga lebih dari 30%, bahkan sempat menyentuh angka \$110 per barel pada tahun 2022—level tertinggi sejak 2014—seperti dicatat oleh International Energy Agency (IEA) dan dilaporkan oleh Good News From Indonesia (2023). Lonjakan ini memicu inflasi energi global, menekan daya beli masyarakat, dan memperburuk ketahanan industri di negara-negara yang bergantung pada energi impor.

Di sektor pangan, gangguan ekspor gandum dari Ukraina menjadi pemicu utama krisis pangan global. Ukraina dan Rusia bersama-sama menyumbang lebih dari 30% pasokan gandum dunia. Konflik bersenjata telah menutup jalur ekspor utama melalui Laut Hitam, menyebabkan sekitar 20 juta ton biji-bijian tertahan di Ukraina, sebagaimana dilaporkan oleh DW (2022) dan Kompasiana (2025). Negara-negara berkembang yang bergantung pada impor gandum, seperti Indonesia,

mengalami lonjakan harga bahan pokok. Indonesia sendiri mengimpor sekitar 2,9 juta ton gandum dari Ukraina pada tahun 2021, dan kenaikan harga global berdampak langsung pada harga mie instan, roti, dan tepung terigu (Kompasiana, 2025; Generasi Peneliti, 2024).

IMF memperingatkan bahwa konflik ini meningkatkan kerentanan sosial dan fiskal, terutama di negara-negara dengan pengeluaran rumah tangga yang didominasi oleh kebutuhan pangan dan energi. Inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga komoditas dan gangguan rantai pasok dapat memperburuk kemiskinan dan ketimpangan ekonomi global (DPR RI, 2022; DW, 2022).

Menurut laporan International Energy Agency (IEA) tahun 2023, invasi Rusia ke Ukraina memicu lonjakan harga minyak global hingga 30%, dengan harga sempat menyentuh \$110 per barel, tertinggi sejak 2014. Kenaikan ini memperburuk beban inflasi energi, terutama di Eropa dan negara berkembang yang bergantung pada impor energi fosil. Dampaknya terasa dalam bentuk kenaikan biaya produksi, penurunan daya beli, dan tekanan fiskal akibat subsidi energi yang membengkak (Good News From Indonesia, 2023; IEA, 2023).

Sementara itu, *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) dalam *World Investment Report 2023* mencatat bahwa investasi lintas negara (FDI) secara global mengalami penurunan sebesar 12% pada tahun 2022, akibat perang dagang dan konflik

geopolitik yang berkelanjutan. Penurunan ini paling terasa di sektor industri berat dan logistik, yang sangat bergantung pada stabilitas rantai pasok dan kebijakan perdagangan internasional. UNCTAD menekankan bahwa ketegangan geopolitik seperti perang tarif dan konflik bersenjata telah menyebabkan investor menunda ekspansi dan mengalihkan proyek ke wilayah yang lebih stabil secara politik (UNCTAD, 2023).

Analisis Kebijakan: Dalam menghadapi ketidakpastian global dan tekanan geopolitik, Indonesia perlu mengadopsi strategi kebijakan yang berfokus pada diversifikasi ekonomi, diplomasi perdagangan yang adaptif, serta penguatan ketahanan energi dan pangan. Ketiga pilar ini saling terkait dan menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas nasional serta memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.

Diversifikasi ekonomi menjadi langkah krusial bagi negara yang selama ini bergantung pada komoditas tunggal atau mitra dagang dominan. Ketergantungan semacam ini membuat perekonomian rentan terhadap guncangan eksternal seperti perang dagang atau konflik geopolitik. Menurut Komisi VII DPR RI (2025), Indonesia perlu memperluas basis industrinya dengan mendorong sektor-sektor baru seperti energi terbarukan, teknologi informasi, dan ekonomi kreatif. Strategi hilirisasi industri melalui kemitraan BRICS juga menjadi peluang untuk meningkatkan nilai tambah produk domestik dan memperkuat daya saing global (Info Singkat DPR RI, 2025). Selain itu, pembukaan pasar non-tradisional

seperti Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan melalui perjanjian bilateral dan regional dapat mengurangi ketergantungan ekspor pada pasar tradisional seperti AS dan Tiongkok (UKMIndonesia.id, 2022).

Dalam konteks ketidakstabilan geopolitik, diplomasi ekonomi menjadi instrumen penting untuk menjamin akses pasar dan menjaga kelangsungan rantai pasok. Pemerintah Indonesia telah memperkuat peran dalam forum multilateral seperti ASEAN, G20, dan CPTPP, serta menjalin aliansi baru melalui BRICS dan RCEP. Strategi negosiasi yang adaptif mencakup fleksibilitas tarif, pembentukan kemitraan dagang strategis, dan penggunaan trade remedies untuk melindungi sektor domestik. Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya diplomasi tarif dan deregulasi sebagai respons terhadap kebijakan proteksionisme global (Bloomberg Technoz, 2025; Indonesia.go.id, 2025).

Krisis energi dan pangan akibat konflik Rusia-Ukraina dan perubahan iklim menuntut Indonesia untuk memperkuat cadangan energi nasional dan produksi pangan dalam negeri. Pemerintah mendorong investasi energi terbarukan seperti surya, angin, dan bioenergi, serta pengembangan Rupiah Digital sebagai bagian dari sistem pembayaran yang inklusif dan efisien (VivaNusantara.id, 2024). Di sektor pangan, strategi swasembada melalui modernisasi pertanian, diversifikasi komoditas, dan penguatan food estate menjadi prioritas utama dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

(Kompas.com, 2024). Ketahanan ini tidak hanya penting untuk stabilitas ekonomi, tetapi juga untuk menjaga kedaulatan nasional di tengah tekanan global.

Dengan mengintegrasikan ketiga strategi tersebut, Indonesia dapat membangun fondasi ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, ekonomi global saat ini semakin ditentukan oleh konstelasi geopolitik. Negara yang tangguh bukan yang menutup diri, melainkan yang mampu beradaptasi dengan cepat melalui diversifikasi, integrasi pasar cerdas, dan stabilitas domestik yang kuat.

7.3.3 Proyeksi Kebijakan Ekonomi dalam Menghadapi Ketidakpastian Masa Depan

Ketidakpastian masa depan—akibat pandemi, perubahan iklim, dan gejolak geopolitik—menuntut kebijakan ekonomi yang proaktif, resilien, dan adaptif terhadap dinamika global. Strategi kebijakan ke depan tidak hanya berorientasi pada pemulihan jangka pendek, tetapi juga membentuk ulang fondasi ekonomi menuju keberlanjutan, digitalisasi, dan inklusi.

Pemulihan ekonomi pasca-COVID-19 menegaskan peran sentral kebijakan fiskal ekspansif dalam menstabilkan konsumsi dan memulihkan sektor informal. Uni Eropa dan Amerika Serikat menggelontorkan stimulus besar untuk transformasi digital, hijau, dan dukungan sosial, sementara negara-negara Asia Tenggara fokus pada insentif UMKM dan digitalisasi. Respons ini memperkuat ekonomi digital dan

pemulihan struktural, meski tantangan seperti inflasi, utang publik, dan ketimpangan global masih membayangi arah kebijakan ke depan.

Krisis iklim telah memicu transformasi kebijakan fiskal dan moneter di berbagai negara. Pemerintah mulai menerapkan carbon tax, memberikan insentif kendaraan listrik, dan secara bertahap menghapus subsidi energi fosil. Di Indonesia, insentif kendaraan listrik diatur melalui PMK No. 12 Tahun 2025 dan PMK No. 38 Tahun 2023, yang memberikan potongan PPN dan PPnBM untuk kendaraan rendah emisi karbon (Pajak.go.id, 2025; DPR RI, 2023). Di tingkat global, bank sentral seperti European Central Bank (ECB) dan Bank of England (BoE) mulai memperhitungkan risiko iklim dalam kebijakan moneter melalui climate stress testing dan pengembangan pasar obligasi hijau (green bond markets) sebagai instrumen pembiayaan transisi (*World Economic Forum*, 2024).

Secara empiris, *World Economic Forum* mencatat bahwa investasi hijau global mencapai \$1,5 triliun pada tahun 2024, mencerminkan pergeseran strategi pembangunan dari model ekstraktif menuju model low-carbon, high-resilience economy (*World Economic Forum*, 2024). Investasi ini mencakup sektor energi terbarukan, kendaraan listrik, teknologi karbon rendah, dan infrastruktur berkelanjutan. Pergeseran ini menunjukkan bahwa keberlanjutan kini bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga menjadi strategi ekonomi utama dalam menghadapi risiko sistemik dan membangun ketahanan jangka panjang.

Pasca-2025, kebijakan ekonomi global mengarah pada integrasi pertumbuhan hijau, stabilitas moneter, dan digitalisasi inklusif. Di Indonesia, sinergi fiskal-moneter mendukung transisi energi bersih melalui reformasi pajak karbon, efisiensi belanja, dan pembiayaan inovatif untuk mencapai Net Zero Emission 2060 serta menciptakan lapangan kerja hijau. Bank Indonesia memperluas peran dengan kebijakan makroprudensial hijau, sistem pembayaran digital (QRIS, BI-FAST), dan eksplorasi CBDC (Rupiah Digital). Secara global, bank sentral seperti ECB dan BoE mulai mengadopsi climate stress testing dan pasar obligasi hijau dalam pengawasan makroprudensial.

Proyeksi arah kebijakan global pasca-2025 menunjukkan bahwa kombinasi smart fiscal-monetary alignment, digitalisasi terukur, dan pembangunan berkelanjutan akan menjadi basis kebijakan ekonomi baru. Survei Ekonomi Indonesia 2024 oleh OECD dan Kementerian Keuangan RI menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter untuk mendukung transformasi hijau dan digitalisasi ekonomi (OECD, 2024). Negara-negara yang berhasil menyusun strategi transisi ini diproyeksikan akan lebih tangguh menghadapi krisis masa depan dan kompetitif dalam ekonomi hijau global. Strategi ini mencakup penguatan infrastruktur digital, reformasi fiskal hijau, dan pengembangan pasar karbon serta green sukuk sebagai instrumen pembiayaan transisi (Indonesia.go.id, 2024; Kemenkeu, 2025).

Tabel 7.2. Proyeksi Strategi Kebijakan Ekonomi Global dalam Menghadapi Ketidakpastian Pasca-2025

Tantangan Utama	Strategi Kebijakan	Contoh Global	Hasil yang Diharapkan
Pandemi, perubahan iklim, geopolitik	Kebijakan fiskal ekspansif, digitalisasi, dan inklusi ekonomi	NextGenerationEU (UE), American Rescue Plan (AS), insentif UMKM (ASEAN)	Pemulihan ekonomi, penguatan sektor informal, perluasan akses ekonomi digital
Krisis iklim dan transisi energi	Carbon tax, insentif kendaraan listrik, penghapusan subsidi energi fosil	PMK No. 12/2025 & No. 38/2023 (Indonesia), ECB & BoE (Eropa)	Ekonomi rendah karbon, penciptaan lapangan kerja hijau, ketahanan jangka panjang
Ketimpangan dan utang publik	Spending better, pembiayaan inovatif, green sukuk, reformasi perpajakan karbon	OECD & Kemenkeu RI (2024), IESR (2022)	Stabilitas fiskal, pembiayaan berkelanjutan, penguatan daya saing
Disrupsi teknologi dan digitalisasi finansial	Sistem pembayaran digital, CBDC, kebijakan makroprudensial hijau	QRIS, BI-FAST, Rupiah Digital (Indonesia), climate stress testing (ECB, BoE)	Efisiensi transaksi, inklusi keuangan, mitigasi risiko sistemik
Ketidakpastian global dan integrasi pasar	Sinergi fiskal-moneter, penguatan infrastruktur digital, diplomasi ekonomi adaptif	Survei OECD (2024), Indonesia.go.id, Kemenkeu (2025)	Ketahanan ekonomi, daya saing global, respons cepat terhadap krisis

BAB 8. PENUTUP

Learning Objectives

1. Merefleksikan evolusi kebijakan makroekonomi dari pendekatan stabilisasi menuju transformasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
2. Mengidentifikasi implikasi strategis bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam merancang kebijakan ekonomi yang adaptif dan berbasis data.
3. Menjelaskan arah masa depan kebijakan ekonomi, termasuk integrasi lintas sektor, inovasi teknologi, dan komitmen terhadap keberlanjutan.
4. Menilai pentingnya kolaborasi lintas disiplin dan generasi dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
5. Merumuskan harapan dan visi kebijakan ekonomi yang inklusif, resilien, dan berorientasi pada keadilan sosial serta ketahanan jangka panjang.

8.1 Refleksi atas Transformasi Kebijakan Makroekonomi

Sepanjang Bab 1 hingga Bab 7, buku ini telah menelusuri evolusi paradigma dan pendekatan kebijakan makroekonomi yang semakin kompleks dan multidimensi. Di era global-digital, kebijakan makro tidak lagi cukup hanya berfokus pada stabilisasi jangka pendek seperti pengendalian inflasi, nilai tukar, dan defisit fiskal. Sebaliknya, pendekatan baru menuntut integrasi antara stabilisasi dan transformasi struktural yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Transformasi ini tercermin dalam beberapa dimensi utama:

- **Paradigma Baru:** Dari pendekatan Keynesian dan monetaris yang menekankan intervensi fiskal dan moneter, kini berkembang ke arah kebijakan yang lebih holistik, berbasis data, dan responsif terhadap disrupsi teknologi, perubahan iklim, dan dinamika geopolitik.
- **Digitalisasi dan Inovasi Teknologi:** Peran *fintech*, digital banking, big data, dan AI telah mengubah cara bank sentral dan pemerintah merancang serta mengimplementasikan kebijakan. Digitalisasi bukan hanya alat, tetapi juga menjadi arena baru bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
- **Kebijakan Struktural dan Sisi Penawaran:** Deregulasi, reformasi kelembagaan, investasi dalam SDM, dan peningkatan produktivitas menjadi fokus

utama dalam mendorong daya saing dan ketahanan ekonomi jangka panjang.

- **Ekonomi Hijau dan Keberlanjutan:** Kebijakan makro kini juga harus mempertimbangkan transisi energi, risiko iklim, dan insentif fiskal untuk mendorong ekonomi berbasis ekologi.
- **Koordinasi Lintas Sektor dan Negara:** Dalam menghadapi ketidakpastian global, koordinasi kebijakan antar lembaga dan antar negara menjadi semakin penting, baik dalam konteks perdagangan, investasi, maupun stabilitas keuangan.

Dengan demikian, refleksi ini menegaskan bahwa kebijakan makroekonomi modern harus bersifat dinamis, interdisipliner, dan berorientasi pada transformasi jangka panjang. Stabilitas tetap penting, tetapi tidak lagi menjadi satu-satunya tujuan. Transformasi struktural dan digitalisasi kini menjadi inti dari strategi makroekonomi yang relevan dan berdaya tahan.

8.2 Implikasi Strategis bagi Pembuat Kebijakan dan Akademisi

Dalam menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian ekonomi global, desain kebijakan makroekonomi ke depan harus lebih adaptif, berbasis data, dan kontekstual. Penggunaan teknologi digital untuk pengumpulan dan analisis data real-time memungkinkan respons kebijakan yang lebih presisi, cepat, dan terukur terhadap dinamika pasar dan guncangan eksternal. Kebijakan yang fleksibel dan

evidence-based akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong transformasi ekonomi. Di sisi lain, institusi pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk pemikiran ekonomi masa depan, tidak hanya sebagai pusat pengembangan teori, tetapi juga sebagai laboratorium kebijakan yang mengintegrasikan analisis empiris, simulasi kebijakan, dan pendekatan interdisipliner. Melalui kurikulum yang relevan, riset yang aplikatif, dan kolaborasi dengan pembuat kebijakan, perguruan tinggi dapat melahirkan generasi ekonom dan analis kebijakan yang mampu menjawab tantangan era global-digital dengan cara yang inovatif, kritis, dan berkelanjutan.

8.3 Arah Masa Depan: Integrasi, Inovasi, dan Keberlanjutan

Era global-digital menghadirkan tantangan lintas sektor dan lintas negara yang semakin kompleks, mulai dari disrupsi rantai pasok, volatilitas pasar keuangan, hingga ketimpangan akses terhadap teknologi dan sumber daya. Interdependensi ekonomi global menuntut koordinasi kebijakan yang lebih erat antarnegara, serta integrasi lintas sektor seperti keuangan, energi, dan teknologi informasi dalam perumusan kebijakan makro. Dalam konteks ini, pendekatan silo tidak lagi memadai; kebijakan harus dirancang secara holistik, responsif terhadap dinamika global, dan mampu menjembatani kepentingan nasional dengan komitmen internasional.

Di tengah tantangan tersebut, muncul urgensi untuk mengarusutamakan ekonomi hijau, tata kelola yang baik, dan pemanfaatan teknologi digital sebagai fondasi kebijakan makro yang berkelanjutan dan inklusif. Ekonomi hijau mendorong transisi menuju sistem produksi dan konsumsi yang rendah karbon dan efisien sumber daya, sementara tata kelola yang baik menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses kebijakan. Teknologi digital, di sisi lain, menjadi enabler utama dalam pengumpulan data, analisis kebijakan, dan pelaksanaan program secara adaptif dan terukur. Kombinasi ketiganya akan menentukan efektivitas, ketahanan, dan legitimasi kebijakan makro di masa depan.

8.4 Penutup dan Harapan

Ke depan, arah kebijakan ekonomi diharapkan semakin inklusif dan resilien, mampu menjangkau kelompok rentan, memperkuat daya tahan sistem ekonomi terhadap guncangan, dan mendorong pertumbuhan yang berkeadilan. Inklusivitas bukan hanya menyangkut distribusi manfaat ekonomi, tetapi juga keterlibatan aktif berbagai aktor—termasuk masyarakat sipil, pelaku usaha kecil, dan komunitas lokal—dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan. Sementara itu, resiliensi menuntut sistem ekonomi yang adaptif terhadap perubahan iklim, disrupsi teknologi, dan dinamika geopolitik, serta mampu merespons krisis

dengan cepat dan tepat tanpa mengorbankan prinsip keberlanjutan.

Reflections on Macroeconomic Policy Transformation

- Shift from rigid models to adaptive frameworks
- Recognition of global interdependencies
- Emphasis on resilience and inclusivity

Strategic Implications for Policymakers and Academics

- Need for interdisciplinary collaboration
- Policy design must consider long-term impacts
- Academics urged to bridge theory and practice

Future Directions: Integration, Innovation, and Sustainability

- Integration of environmental and social metrics
- Innovation in data usage and modeling
- Sustainability as a core policy objective

Conclusion and Aspirations

- Call for transformative leadership
- Vision for equitable and sustainable growth
- Commitment to continuous learning and adaptation

Untuk mewujudkan visi kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan kolaborasi lintas disiplin dan generasi—melibatkan ekonom, ilmuwan data, pakar lingkungan, sosiolog, dan generasi muda. Sinergi ini memperkuat analisis, memperluas solusi, dan meningkatkan legitimasi publik. Institusi pendidikan tinggi, lembaga riset, dan komunitas profesional berperan sebagai katalisator perubahan, menjembatani teori dan praktik, serta membentuk ekosistem pemikiran ekonomi yang adaptif terhadap tantangan global.

DATAR PUSTAKA

- Academia.edu. . (2024). *Evaluasi kebijakan fiskal ekspansif dan dampaknya terhadap sektor informal*. <https://www.academia.edu>
- Academia.edu. . (2024). *Peran perguruan tinggi dalam pengembangan kebijakan ekonomi*. <https://www.academia.edu>
- AI Expert Network. (2023). *Case Study: Tesla's Integration of AI in Automotive Innovation*. <https://aiexpert.network>
- Ajarekonomi.com. . (2016). *Krisis utang Yunani dan peran IMF*. <https://www.ajarekonomi.com>
- Alfaridzi, M., Sari, N., & Wibowo, T. (2023). Pungutan liar dan biaya produksi: Studi empiris UMKM. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 18(2), 77–92.
- Alibaba Group. (2024). *Digital transformation and global retail strategy*. <https://www.alibabagroup.com>
- Alibaba Group. (2025). *Letter from our Chairman and CEO: AI-driven strategy and global commerce*. <https://www.alibabagroup.com>
- Amalinsani.org. . (2025). *Partisipasi publik dalam tata kelola kebijakan*. <https://www.amalinsani.org>
- Amazon.com. . (2024). *Amazon Personalize and logistics innovation*. <https://www.aboutamazon.com>
- Anabarja. (2024). *Kesiapan SDM dan logistik dalam integrasi AFTA*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 21(2), 88–104.
- Analytics Vidhya. (2025). *Tesla and AI: The Era of Artificial Intelligence Led Cars and Manufacturing*. <https://www.analyticsvidhya.com>
- Andersen, T. M., Holmström, B., Honkapohja, S., Korkman, S., Söderström, H. T., & Vartiainen, J. (2007). *The Nordic model: Embracing globalization and sharing risks*. The Research Institute of the Finnish Economy.

- An-Nur.ac.id. . (2024). *Peran perjanjian perdagangan internasional dalam mencegah dumping*. Universitas An-Nur.
- Anshari, M., & Rusdiyanta, D. (2023). *Brexit dan dampak regulatif*. *Jurnal Ekonomi Politik*, 18(2), 77–92.
- Anthony, S. D. (2016). Kodak’s downfall wasn’t about technology. *Harvard Business Review*.
<https://hbr.org/2016/07/kodaks-downfall-wasnt-about-technology>
- Arki Rifazka. (2025). *Fondasi digital dan tantangan HKI di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Digital*, 7(1), 55–70.
- Auerbach, A. J., & Gorodnichenko, Y. (2012). Fiscal multipliers in recessions and expansions. In *Fiscal policy after the financial crisis* (pp. 63–98). University of Chicago Press.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan RI. (2025). *Dampak perang dagang terhadap ekspor Indonesia*.
<https://www.kemhan.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik energi Indonesia*.
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table?subject=558>
- Badawi, A., Nugroho, R., & Sari, M. (2024). *Quantitative easing in Japan: Outcomes and risks*. *Jurnal Kebijakan Moneter*, 21(1), 55–70.
- Baldwin, R. (2016). *The great convergence: Information technology and the new globalization*. Harvard University Press.
- Baldwin, R., & Weder di Mauro, B. (Eds.). (2020). *Economics in the time of COVID-19*. CEPR Press.
- Baldwin, R., & Weder di Mauro, B. (Eds.). (2020). *Economics in the time of COVID-19*. CEPR Press.
- Bank Indonesia. (2021). *Laporan Perekonomian Indonesia 2021*.
<https://www.bi.go.id>
- Bank Indonesia. (2025). *Stabilitas moneter dan cadangan devisa*.
<https://www.bi.go.id>

- Bank of Japan. (2025). *Fiscal transparency and monetary communication*. <https://www.boj.or.jp>
- Bappenas. (2022). *Strategi reformasi perlindungan sosial*. <https://www.bappenas.go.id>
- Bappenas. (2024). *RPJPN 2025–2045 dan strategi industrialisasi*. <https://www.bappenas.go.id>
- Bappenas. (2025). *APBN 2025 dan alokasi perlindungan sosial*. <https://www.bappenas.go.id>
- Baraka UMA. (2024, Januari 18). *Kebijakan proteksionisme vs. liberalisasi perdagangan: Evaluasi dampak*. <https://baraka.uma.ac.id/kebijakan-proteksionisme-vs-liberalisasi-perdagangan/>
- BeInCrypto Indonesia. (2024). *Regulasi blockchain dan perlindungan konsumen*. <https://beincrypto.id>
- BI Institute. (2015). *Sistem nilai tukar dan stabilitas makroekonomi*. Bank Indonesia.
- BI.go.id. . (2024). *Kebijakan makroprudensial hijau dan sistem pembayaran digital*. Bank Indonesia.
- BI.go.id. . (2025). *Kebijakan moneter dan cadangan devisa*. Bank Indonesia.
- Biizaa.com. . (2025). *Audit regulasi dan uji kepatuhan hukum*. <https://www.biizaa.com>
- BINUS University. (2025). *Blockchain dan DeFi: Solusi inklusi keuangan dan transparansi untuk pertumbuhan ekonomi yang merata*. <https://binus.ac.id/character-building/2025/03/blockchain-dan-defi-solusi-inklusi-keuangan-dan-transparansi-untuk-pertumbuhan-ekonomi-yang-merata/>
- Bisnis.com. (2025, Agustus 9). *RI kebut negosiasi perjanjian dagang, ekonom wanti-wanti soal ini*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250809/12/1900727/ri-kebut-negosiasi-perjanjian-dagang-ekonom-wanti-wanti-soal-ini>

- Bisnis.com. . (2025). *Penurunan ekspor akibat tarif perdagangan*.
<https://www.bisnis.com>
- Bizhare. (2024). *Stabilitas politik dan keputusan investasi*.
<https://www.bizhare.id>
- BKF. (2025). *Kajian fiskal transisi energi dan dampaknya terhadap APBN*. Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI.
- Blanchard, O., & Johnson, D. R. (2013). *Macroeconomics* (6th ed.). Pearson Education.
- Blockchainmedia.id. . (2025). *Data localization and regulatory challenges in India*. <https://www.blockchainmedia.id>
- BloombergTechnoz.com. . (2023). *Komunikasi kebijakan moneter di Jepang*. <https://www.bloombergtechnoz.com>
- BloombergTechnoz.com. . (2025). *Model kebijakan adaptif terhadap teknologi*. <https://www.bloombergtechnoz.com>
- BPLawyers. (2025). *PP No. 28 Tahun 2025 dan penyederhanaan perizinan usaha*. <https://www.bplawyers.co.id>
- Brief.id. . (2025). *Stagnasi badan banding WTO dan dampaknya*.
<https://www.brief.id>
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*. W. W. Norton & Company.
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*. W. W. Norton & Company.
- CapitalPress. (2024). *Manufaktur berbasis teknologi dan daya saing ekspor*. <https://www.capitalpress.id>
- Captwapri. (2025). *Korupsi dalam proyek pembangunan dan dampaknya*. <https://www.captwapri.com>
- CCM. (2019). *EU regulatory framework and cross-border investment*. Center for Capital Markets.
- CEPR VoxEU. (2025). *The Nordic model and income equality: Myths, facts, and policy lessons*.
<https://cepr.org/voxeu/columns/nordic-model-and-income-equality-myths-facts-and-policy-lessons>

- Chainalysis. (2023). *Global Crypto Adoption Index 2023*. <https://www.chainalysis.com>
- CIPS. (2023). *Evaluasi sandbox regulasi di sektor fintech*. Center for Indonesian Policy Studies.
- Cleverence. (2025). *How Tesla and Ford Use Robotics to Revolutionize Manufacturing Efficiency*. <https://www.cleverence.com>
- CNBC Indonesia. (2022). *Stagflasi dan krisis energi global*. <https://www.cnbcindonesia.com>
- CNBC Indonesia. (2025, February 11). *Indonesia peringkat 3 Global Crypto Adoption Index*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250211134231-17-609735/indonesia-peringkat-3-global-crypto-adoption-index-ini-kata-bos-ojk>
- Coinvestasi. (2025). *Blockchain di Indonesia diakui resmi lewat PP 28/2025*. <https://coinvestasi.com>
- Cryptorobotics.ai. . (2024). *India's crypto tax policy and startup impact*. <https://www.cryptorobotics.ai>
- CSIS. (2025). *Tumpang tindih regulasi dan dampaknya terhadap iklim investasi*. <https://www.csis.or.id>
- Dahua Technology. (2025). *Smart factory and digital twin integration*. <https://www.sourcesecurity.com>
- Deloitte. (2023). *Digital transformation 2023: Accelerating productivity through technology*. <https://www2.deloitte.com/global/en/pages/technology/articles/digital-transformation.html>
- Denpasar Institute. (2025). *Program pengembangan SDM dan pelatihan teknologi digital*. <https://www.denpasarinstitute.com>
- DetikFinance. (2024). *Subsidi tekstil dan dampak liberalisasi*. <https://finance.detik.com>
- DFDLab. (2023). *Dashboard emisi berdasarkan sektor*. <https://dfdlab.org/dashboard/emisi-berdasarkan-sektor-bps/>

- DHL. (2024). *Global shipping trends and supply chain resilience*. <https://www.dhl.com>
- Digination.id. . (2024). *Transformasi digital industri nasional*. <https://www.digination.id>
- Diklat LPKN. (2025). *Implementasi e-budgeting dan ERP dalam tata kelola fiskal*. Lembaga Pengembangan Kapasitas Nasional.
- Diklatkerja. (2025). *Climate-smart irrigation and agricultural resilience*. <https://www.diklatkerja.com>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Insentif pajak untuk energi hijau*. <https://stats.pajak.go.id/index.php/id/artikel/insentif-pajak-untuk-energi-hijau>
- Diswansena. (2024). *Klausul pembangunan dalam perjanjian perdagangan*. <https://www.diswansena.id>
- DJPB. (2025). *Peran APBN dalam menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI.
- DJPPR. (2018). *Program Indonesia Pintar dan JKN sebagai investasi SDM*. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- Dornbusch, R., Fischer, S., & Startz, R. (2014). *Macroeconomics* (12th ed.). McGraw-Hill Education.
- DPR RI. (2022). *Kapasitas negosiator dan diplomasi ekonomi*. <https://www.dpr.go.id>
- DPR RI. (2024). *Reformasi regulasi dan daya saing nasional*. <https://www.dpr.go.id>
- DPR RI. (2025). *Laporan Komisi VI tentang ekspor dan proteksionisme*. <https://www.dpr.go.id>
- DSN Solar. (2024). *Renewable energy access in Africa*. <https://www.dsnsolar.com>
- DW. (2024, March 5). *Climate change and food insecurity in Ethiopia*. <https://www.dw.com>
- EBC Financial Group. (2025). *Swiss economic resilience and monetary strategy*. <https://www.ebcgroup.com>

- Educareforma.com.br. . (2024). *Kemiskinan dan penurunan PDB di Venezuela*. <https://www.educareforma.com.br>
- Ejournal.goacademica.com. . (2025). *Tantangan kelembagaan dalam ekonomi digital*. <https://ejournal.goacademica.com>
- Ekon.go.id. . (2024). *Integrasi UMKM dalam Making Indonesia 4.0*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Ekon.go.id. . (2024). *Koordinasi kebijakan industri dan inovasi*. <https://www.ekon.go.id>
- Eprints UNRAM. (2025). *Gugatan Tiongkok terhadap tarif AS di WTO*. Universitas Mataram.
- ERIA & Bappenas. (2021). *Integrasi rantai nilai global dan daya saing industri*. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia & Kementerian PPN/Bappenas.
- EUR-Lex. (2024). *General Data Protection Regulation (GDPR) summary*. <https://eur-lex.europa.eu>
- European Commission. (2022). *Antitrust: Commission fines Google for abusive practices in online advertising*. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6463
- Familiarize. (2025). *Risiko ketergantungan ekonomi global*. <https://www.familiarize.id>
- FEB Unesa. (2025). *Strategi diversifikasi ekspor Indonesia*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya.
- Fintech.id. . (2024). *POJK No. 3 Tahun 2024 dan inovasi keuangan digital*. <https://www.fintech.id>
- Freedom-Institute.org. . (2021). *Antikorupsi dan reformasi birokrasi di Georgia*. <https://www.freedom-institute.org>
- Friedrich-Ebert-Stiftung. (2020). *Democratic governance and inclusive reform*. <https://www.fes.de>
- GDPR.eu. . (2024). *What is GDPR, the EU's data protection law?*. <https://gdpr.eu/what-is-gdpr/>
- Generasi Peneliti. (2024). *Dampak konflik Ukraina terhadap harga pangan Indonesia*. <https://www.generasipeneliti.id>

- Geotimes. (2024). *Ketergantungan ekspor komoditas dan risiko fiskal*. <https://www.geotimes.co.id>
- Ghosh, S., & Qureshi, M. S. (2020). *Spillovers from advanced economies: Implications for emerging markets*. IMF Working Paper No. 20/45. <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/03/06/Spillovers-from-Advanced-Economies-Implications-for-Emerging-Markets-49193>
- Good News From Indonesia. (2023). *Harga energi dan dampak fiskal*. <https://www.goodnewsfromindonesia.id>.
- GoodStats. (2023, Oktober 10). *Emisi karbon di Indonesia terus meningkat*. <https://data.goodstats.id/statistic/emisi-karbon-di-indonesia-terus-meningkat-7hqfg>
- Gopinath, G. (2020). *The great lockdown: Dissecting the economic effects*. IMF Blog. <https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2020/05/10/the-great-lockdown-dissecting-the-economic-effects>
- Government of Canada. (2023). *Carbon pricing in Canada: Progress and projections*. <https://www.canada.ca/en/services/environment/weather/climatechange/pan-canadian-framework.html>
- Hartini, S., Nugroho, A., & Prasetyo, D. (2023). Dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 20(1), 45–60.
- Hestanto, R. (2024). *Perlindungan data dan regulasi digital di Uni Eropa*. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 9(1), 55–70.
- Hukum.uma.ac.id. . (2025). *UU Hak Cipta dan Paten sebagai dasar inovasi*. Universitas Medan Area.
- Hukumonline. (2025). *Ketidakpastian hukum dan investasi di Afrika*. <https://www.hukumonline.com>
- Human Rights Watch. (2018). *EU: General Data Protection Regulation (GDPR)*. <https://www.hrw.org>
- IBM. (2024). *Digital transformation and investment in Europe*. <https://www.ibm.com>

- IESR. (2016). *Energiewende: Lessons from Germany's energy transition*. Institute for Essential Services Reform.
- IESR. (2024). *Indonesia energy transition outlook 2024*. <https://iesr.or.id/en/publications>
- IMF & FSB. (2023). *Synthesis Paper: Policies for Crypto-Assets*. <https://www.fsb.org/uploads/R070923-1.pdf>
- IMF Country Report No. 18/297. (2018). *Argentina: Request for Stand-By Arrangement*. <https://www.imf.org>
- IMF. (2013). *Greece: Ex-post evaluation of exceptional access under the 2010 Stand-By Arrangement*. <https://www.imf.org>
- IMF. (2018). *Redistribution of Income and Reducing Economic Inequality*. Finance & Development Magazine. <https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2018/03/bourguignon>
- IMF. (2023). *G20 Note on the Macroeconomic Implications of Crypto Assets*. <https://www.imf.org/-/media/Files/Research/imf-and-g20/2023/g20-report-macroeconomic-implications-crypto-assets-february23.ashx>
- IMF.org. . (2025). *Argentina: Extended Fund Facility arrangement*. <https://www.imf.org>
- Indodax Academy. (2025). *Blockchain sebagai infrastruktur digital RI*. <https://indodax.com/academy>
- Indonesia.go.id. . (2024). *Proteksi industri tekstil nasional*. <https://www.indonesia.go.id>
- InfoEV. (2025). *EV adoption in Norway: Policy and market impact*. <https://infoev.org>
- Institute for Development of Economics and Finance. (2025, Juli 21). *Dampak penurunan tarif impor terhadap stabilitas makroekonomi dan keuangan*. <https://indef.or.id/wp-content/uploads/2025/07/Materi-1-Diskusi-Publik-INDEF-21072025.pdf>
- International Energy Agency. (2022). *Global energy crisis and oil price trends*. <https://www.iea.org>

- International Monetary Fund. (2024). *The rise of CBDCs: Implications for monetary policy and financial stability*. <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2024/01/15/The-Rise-of-CBDCs>
- Invesnesia.com. . (2025). *Extended Fund Facility IMF dan stabilisasi nilai tukar*. <https://www.invesnesia.com>
- Investthink. (2024). *Kebijakan energi pasca krisis minyak*. <https://www.investthink.id>
- Investing.com. . (2024, February 20). *India's water crisis threatens economic growth*. <https://www.investing.com>
- Irwin, D. A. (2016). *Free trade under fire* (4th ed.). Princeton University Press.
- Issartel, J., & Hardini, R. (2023). *Social spending and macroeconomic stability in France*. *Jurnal Ekonomi Sosial*, 18(2), 77–92.
- JDIH BPK RI. (2022). *Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2022 tentang KIN*. <https://jdih.bpk.go.id>
- Jemarimu.id. . (2025). *Stabilitas franc Swiss dan intervensi pasar SNB*. <https://www.jemarimu.id>
- Jurnal Indonesia Sosial Teknologi. (2024). *Implementation and challenges of UU PDP 2022*. <https://jst.publikasiindonesia.id>
- JurnalPatroliNews. (2025). *Vietnam dan stabilitas kebijakan ekonomi*. <https://www.patrolinews.com>
- JurnalPost. (2023). *Krisis ekonomi Venezuela dan dampak kelembagaan*. <https://www.jurnalpost.com>
- KADIN Indonesia. (2025). *Stabilitas hukum dan iklim investasi*. <https://www.kadin.id>
- Kaji.id. . (2024). *Kebijakan Industri Nasional dan Perpres No. 74 Tahun 2022*. <https://www.kaji.id>
- Katadata. (2023). *Proyek DARES dan elektrifikasi pedesaan di Nigeria*. <https://www.katadata.co.id>
- Kemdiktisaintek.go.id. . (2025). *Sinergi riset dan industri untuk ekonomi inovatif*. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

- Kemenkeu. (2025). *APBN 2025 dan strategi pembiayaan hijau*. Kementerian Keuangan RI.
- Kemenkeu. (2025). *APBN 2025 dan strategi pembiayaan hijau*. Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2024). *Statistik energi nasional 2024*. <https://www.esdm.go.id>
- Kementerian ESDM. (2023). *Strategi bauran energi nasional*. <https://www.esdm.go.id>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2023). *Handbook of energy & economic statistics of Indonesia 2023*. <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-handbook-of-energy-and-economic-statistics-of-indonesia-2023.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Insentif fiskal untuk energi terbarukan*. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). *Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon*. <https://www.menlhk.go.id>
- Kementerian PANRB. (2024). *Transformasi digital birokrasi melalui SPBE dan SIPD*. <https://www.panrb.go.id>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2024). *Desain kelembagaan antikorupsi dan strategi pembangunan*. <https://www.bappenas.go.id>
- KMTech.id. . (2025). *Smart factory dan teknologi industri Jerman*. <https://www.kmtech.id>
- Komisi VII DPR RI. (2025). *Evaluasi kebijakan TKDN dan penguatan kapasitas produksi*. <https://www.dpr.go.id>
- SIP Law Firm. (2023). *Kebijakan insentif pajak untuk energi hijau*. <https://siplawfirm.id/kebijakan-insentif-pajak-untuk-energi-hijau/?lang=id>
- Zonamahasiswa.id. . (2025). *Georgia sebagai model reformasi kelembagaan*. <https://www.zonamahasiswa.id>

PENULIS



Dr. Ir. Jan Horas Veryady Purba, M.Si., CBPA., CPSP., CSRP., C.PIM. adalah dosen tetap di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor. Penulis menempuh pendidikan S1 di Institut Pertanian Bogor, lulus tahun 1989. Menyelesaikan studi S2 (2001) dan S3 (2012) di Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian (EPN) IPB. Mata kuliah yang diampu adalah Statistika, Metodologi Penelitian, Pengantar

Ekonomi Makro dan Ekonomi Mikro. Tahun 2014-2018, menekuni riset CPO sebagai salah satu komoditas strategis nasional, dan telah mempublikasikan 5 buku tentang Minyak Sawit. Sebagai Dosen, aktif dalam kegiatan ilmiah, antara lain *Expert Meeting* CPO di Singapura (2015) Simposium Minyak Sawit di Universitas Wageningen, Belanda (2016), serta aktif menulis *Journal International* bereputasi, dan menghadiri *International Conference* di Jakarta (2017), Lombok (2018), Kuala Lumpur (2018), Medan (2017), Bangkok (2018), Bogor, (2018), dan Bandung (2018). Menerbitkan Buku Statistika Ekonomi dan Bisnis I (2018) dan Statistika Ekonomi dan Bisnis II (2018), *Sustainable Tourism* (2024), *Book Chapter: Dasar Manajemen: Chapter 4, Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan Secara Kreatif* (2024), *Hipotesis Penelitian Kuantitatif* (2025), *Kebijakan Fiskal dan Moneter Indonesia: Analisis, Perkembangan, dan Prospek* (2025), *Perekonomian Indonesia: Pengantar dan Isu Kontemporer berbagai Sektor dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi di Indonesia* (2025). Buku Ajar Pengantar Ekonomi Makro (2025).

RINGKASAN BUKU

Buku ini mengkaji secara komprehensif transformasi kebijakan makroekonomi dalam menghadapi era globalisasi, digitalisasi, dan disrupsi teknologi. Dimulai dari latar belakang perubahan paradigma ekonomi, buku ini menyoroti pergeseran dari pendekatan stabilisasi menuju transformasi struktural yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Melalui analisis peran bank sentral, kebijakan sisi penawaran, perdagangan, dan investasi, serta respons terhadap krisis ekonomi global, pembaca diajak memahami bagaimana kebijakan makro berevolusi untuk menjawab tantangan kompleks di era modern. Digitalisasi, fintech, dan ekonomi platform menjadi sorotan utama dalam bab-bab yang menghubungkan inovasi teknologi dengan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, buku ini memperluas cakupan dengan membahas ekonomi hijau, tata kelola institusional, dan integrasi internasional sebagai elemen strategis dalam pembangunan berkelanjutan. Perubahan iklim, reformasi fiskal, dan peran lembaga global seperti IMF dan Bank Dunia dianalisis dalam konteks kebijakan ekonomi yang inklusif dan resilien. Di bagian akhir, penulis mengajak pembaca untuk merefleksikan arah masa depan ekonomi makro, termasuk implikasi teknologi terhadap pasar tenaga kerja, distribusi kesejahteraan, dan dinamika geopolitik global. Buku ini menjadi referensi penting bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi ekonomi yang ingin memahami dan merancang kebijakan makro yang relevan, inovatif, dan berkelanjutan.